

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA TERHADAP
PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA DI BIDANG LAGU
DAN / ATAU MUSIK**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Derajat Sarjana-S2 Magister Ilmu Hukum**



**Oleh :
YANATA ALI GUNAWAN
NIM. B4A.000.256**

**KAJIAN HUKUM EKONOMI DAN TEKNOLOGI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2003**

UPT-PUSTAK-UNDIP

LEMBAR PENGESAHAN

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA TERHADAP
PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA DI BIDANG LAGU DAN/ATAU
MUSIK**

Tesis

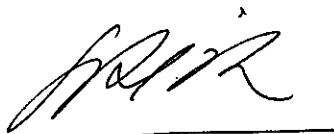
**Disusun dalam Rangka Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Derajat
Sarjana S2 Magister Ilmu Hukum**

Disusun Oleh

YANATA ALI GUNAWAN

Nim : B4A.000.256

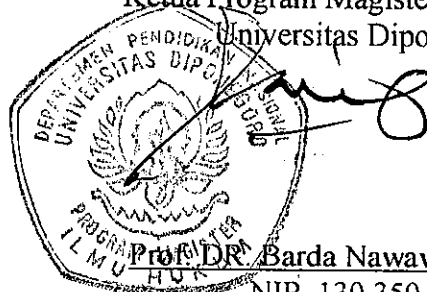
Pembimbing Tesis



Prof. DR. Sri Redjeki Hartono, S.H.
NIP. 130 368 053

Mengetahui

**Ketua Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro**



Prof. DR. Barda Nawawi Arief, S.H.
NIP. 130 350 519

UPT-PUSTAK-UNDIP	
No. Daft.	2130/T/MIH/01
Tgl.	29/1/24

ABSTRACT

The development of science and technology also conditional of Indonesian society in economic, social, culture would give biggest influence for international property right especially in creating song or music, which is the influence for intellectual property right and legal protection, whether the influence for development of intellectual property right crime itself.

The appearance of intellectual property right crime as it were has been losses on right holder, particularly for economic countries. Legal protection for song author or music connected with several factor such as unrespected society attitude for creative power, attitude and action author to protect their right and disestablishment of equally understanding, attitude and legal officer action in deal of copy right breach.

This research would examine and criticize the application of copy right act against legal enforcing in song or music. Where as this study attempt to focused copy right act in application would give legal protection against song writer or music. This research proceeding data with normative approach and supported by emphirical method.

From this research it could be concluded that copy right act has giving a wide space for protection against master art particularly song or music so that if would create a condusive atmosphere in order to rouse original creativity. In general, copy right breach devided in to 3 type which is counterfeit, pirate and bootlegging. The legal enforcing barrier against copy right breach in song or music, internally comes from author, general director of intellectual property right and copy right profession. Externally, it influenced with social environment, economic, public and submissive consciousness to appreciate creative power.

Key words : Intellectual property right, copy right, author

ABSTRAKSI

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kondisi lingkungan social masyarakat Indonesia di bidang ekonomi, sosial, budaya ternyata telah memberi pengaruh besar terhadap HaKI khususnya karya cipta lagu dan / atau musik, baik pengaruh obyek yang menjadi hak milik dan perlindungan hukum, maupun pengaruh terhadap perkembangan kejahatan HaKI itu sendiri.

Timbulnya kejahatan HaKI dirasakan sangat merugikan bagi pemegang haknya, juga merugikan perekonomian negara. Perlindungan hukum terhadap pencipta lagu dan / atau musik tidak terlepas dari beberapa faktor diantaranya sikap masyarakat yang kurang menghargai sebuah karya cipta, sikap dan tindakan pencipta dalam melindungi hak-haknya dan belum cukup terbinanya kesamaan pengertian, sikap dan tindakan aparat penegak hukum dalam menghadapi pelanggaran hak cipta.

Dalam penelitian ini akan mengkaji dan membahas tentang penerapan Undang-Undang hak cipta terhadap perlindungan hukum pencipta di bidang lagu dan / atau musik. Sedangkan fokus atau obyek yang akan diteliti adalah mengenai Undang-Undang hak cipta dalam penerapannya dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta karya cipta lagu dan / atau musik. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan pendekatan normatif yang didukung dengan penelitian empiris.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa Undang-Undang hak cipta telah memberikan ruang bagi perlindungan terhadap karya seni khususnya lagu dan / atau musik sehingga tercipta suasana kondusif yang akan merangsang daya kreativitas untuk lahirnya ciptaan-ciptan original. Bentuk pelanggaran terhadap karya cipta lagu dan / atau musik secara umum adalah *counterfeit*, *pirate* dan *bootlegging*. Hambatan terhadap penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta lagu dan / atau musik, secara internal datang dari pencipta, Dirjen HaKI dan organisasi profesi hak cipta. Secara eksternal dipengaruhi oleh kondisi lingkungan social, ekonomi, masyarakat dan rendahnya kesadaran untuk menghargai sebuah karya cipta.

Kata kunci : HaKI, UU Hak Cipta, Pencipta

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1 : Skema penggolongan HaKI	44
Table 2 : Dua macam hak cipta.....	107
Tabel 3 : Jumlah ciptaan, album dan penciptanya	109
Tabel 4 : jumlah produksi kaset	109
Tabel 5 : Jumlah/angka penjualan album rekaman	110
Tabel 6 : Penggolongan pencipta	111
Tabel 7 : Cara pembagian royalty	112
Tabel 8 : Permohonan pendaftaran ciptaan Th. 1991 s/d 16-11-2002	120
Tabel 9 : Data statistic permintaan pendaftaran hak cipta Th. 2001	121
Tabel 10 : Permohonan pendaftaran ciptaan Th. 1991 s/d Juli 2002	121
Tabel 11 : Data statistic Permintaan pendaftaran hak cipta Th. 2002	122
Tabel 12 : pengelompokkan beberapa anggota society	125
Table 13 : Alur kuasa dan izin secara kolektif	126
Tabel 14 Skala distribusi musik bukan milik umum.....	141
Tabel 15 : Contoh perhitungan royalty kaset KCI	144
Tabel 16 ; Contoh perhitungan royalty CD KCI	144
Tabel 17 : Contoh perhitungan royalty VCD KCI	145
Tabel 18 : Daftar pengumpulan royalty hak memperbanyak 1993-2000	146
Tabel 19 : Ikhtisar pengumpulan dana distribusi royalty untuk tahun yang berakhir 31-12 2001-2002	148
Tabel 20 : Daftar organisasi tersangka pelanggaran di bidang hak cipta	

musik dan rekaman suara 154

Tabel 21 : Hak yang terkandung dalam hak cipta 199

DAFTAR SINGKATAN

ASIRI	: Asosiasi Industri Rekaman Indonesia
AW	: Auteurswet
BIEM	: International Organization for Administration of Mechanical Reproduction Rights
BIRPI	: Birieaux International Reunis Pour la Propriete Intellectuelle
BPPHC	: Badan Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta
CD	: Compact Disc
CISOC	: International Confederation of Societies Of Authors and Composers
CMO	: Collective Management Organization
ECOSOC	: Economic and Social Council
EPC	: European Patent Convention
GATT	: General Agreement on Tariff and Trade
GC	: General Council
GSP	: Generalized System of Preferences
HaKI	: Hak atas Kekayaan Intelektual
Keppres	: Keputusan Presiden
KUHPer	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
MC	: Ministerial Conference
PAPPRI	: Persatuan Artis Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia
POLRI	: Polisi Republik Indonesia
PPD	: Price Published to Dealer
PPh	: Pajak Penghasilan
PPn	: Pajak Pertambahan Nilai
Stb	: Staatblad
SEO	: Stichting Voor Economische Orderzoek
TRIMs	: Trade Related Investment Measures
TRIPs	: Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
UCC	: Universal Copyright Convention
UPA	: Unlogged Performance Allocation
VCD	: Video Compact Disc
WIPO	: Covention Establishing the World Intellectual Property Organization
WTO	: World Trade Organization
YKCI	: Yayasan karya Cipta Indonesia

KATA PENGANTAR

Dengan segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul :

“ Penerapan Undang-undang Hak Cipta Terhadap Perlindungan Hukum Pencipta atas Karya Cipta Lagu dan/atau Musik “

Tesis ini disusun guna memenuhi persyaratan menyelesaikan Program Pascasarjana (S2) di Magister Ilmu Hukum Program Kajian Hukum Ekonomi dan Teknologi Universitas Diponegoro Semarang.

Sehubungan dengan telah diselesaikannya tesis ini, penulis menghaturkan rasa terima kasih yang tak terhingga serta penghargaan yang tulus kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. DR. Barda Nawawi Arief, S.H., Selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
2. Ibu Prof. DR. Sri Redjeki Hartono, S.H., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia memberikan petunjuk serta pengarahan dalam penyusunan tesis ini.
3. Bapak Budi Santoso, S.H., M.S., yang telah memberikan dukungan dan bimbingan sepenuhnya kepada penulis.
4. Bapak, Ibu (alm), dan adik-adik, yang telah memberikan dukungan dan dorongan setiap saat demi kesuksesan penulis.
5. Bapak Adi Supanto, S.H., M.H. dari Dir.Jen HKI, yang telah memberikan penjelasan dan data pendukung untuk penyusunan tesis ini.
6. Bapak Irwan B. Indrakesuma dari Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) yang telah memberikan penjelasan dan data pendukung untuk penyusunan tesis ini.

7. Dian Triyani, yang telah memberikan dukungan, dan dorongan semangat dalam penulisan tesis ini.
8. Edo, Mba Fia, Donnie, Alfa, Agus, Pak Bambang, Bang Zein, Pak Endang, Haryo, Mas Gusdan dan semua rekan HET Angkatan 2000 Pagi yang telah memberikan bantuan teknis, gagasan serta teman diskusi.
9. Serta semua pihak yang telah banyak membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan tesis ini jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu atas saran dan kritik yang bersifat membangun akan penulis terima dengan senang hati.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis dapat bermanfaat bagi para pembaca dan siapa saja yang membutuhkan.

Semarang, Mei 2003

Penulis,

(YANATA ALI GUNAWAN)

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembaran Pengesahan	ii
Abstraksi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Singkatan	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	6
C. Tinjauan Pustaka	6
D. Tujuan Penelitian	11
E. Kontribusi Penelitian	12
F. Metode Penelitian	12
1. Objek atau Fokus yang Diteliti	12
2. Metode Pendekatan	13
3. Penentuan Lokasi Penelitian / Penentuan Sampel	13
4. Sumber Data	14
5. Metode Pengumpulan Data	15
6. Metode Analisa Data	16
7. Metode Pengecekan Validitas Data	16
BAB II : INTRODUKSI TEORI	18
A. Tinjauan Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual Pada Umumnya	18
1. Latar Belakang Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual	18
2. Konvensi Internasional Mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual	24
2.1. Konvensi Yang Mengatur Masalah Hak Cipta	25
2.2. Konvensi Hak Kekayaan Industrial	26
3. Beberapa Organisasi dan Konvensi Internasional Berkaitan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual	28
3.1. Organisasi Hak atas kekayaan Intelektual Dunia (World Intellectual Property organization/WIPO)	28
3.2. Persetujuan umum Mengenai Tarif dan Perdagangan (General Agreement on Tariff and Trade/GATT)	31
3.2.1. Masalah Hak atas Kekayaan Intelektual dalam GATT	34
3.3. Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO)	37

3.4. Persetujuan Tentang Aspek-Aspek Dagang Dari Hak atas Kekayaan Intelektual (Trade-related Aspects of intellectual Property rights/TRIPs)	39
3.4.1. Umum	39
3.4.2. Isi TRIPs	41
3.4.3. Standar pengaturan TRIPs	43
4. Hak atas Kekayaan Intelektual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia	44
4.1. Sebelum TRIPs	44
4.2. Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Pasca TRIPs)	45
4.3. Setelah TRIPs	48
4.4. Beberapa Konvensi Internasional yang telah diratifikasi	56
5. Teori-Teori yang Berkaitan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual	57
5.1. Teori Hak Alami	58
5.2. Teori Karya	59
5.3. Teori Tawar Menawar	60
5.4. Teori Dominasi	61
5.5. Teori Public Benefit	62
B. Hak Cipta dan Pengaturannya	63
1. Konvensi Internasional Tentang Hak Cipta	63
1.1. Konvensi Bern 1886 tentang Perlindungan Karya Sastra dan Seni	63
1.2. Konvensi Hak Cipta Universal 1955	68
2. Beberapa Konvensi Lain Yang Berkaitan Dengan Hak Cipta	71
2.1. International Convention Protection for Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organization (Rome Convention/Neighboring Convention) 1961	71
3. Sejarah Pengaturan Hak Cipta Di Indonesia	76
3.1. Auteurswet 1912	77
3.2. Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982	79
3.3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987	81
3.4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1997	88
3.5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002	91
C. Prinsip-prinsip Dasar dalam Hak Cipta dan Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu dan/atau Musik dalam Undang-undang Hak Cipta Indonesia	95

1. Prinsip-Prinsip Dasar Hak Cipta	96
1.1. Hak Cipta adalah hak Khusus	96
1.2. Hak Cipta dapat dialihkan	97
1.3. Ciptaan-Ciptaan yang Dilindungi Hak Cipta	98
1.4. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta Terhadap Jenis-jenis Ciptaan	100
2. Pengertian Pencipta dan Hak Terkait	102
3. Hak yang Berkait dengan Lagu dan/atau Musik	105
3.1. Hak Ekonomi	105
3.2. Hak Moral	106
4. Faktor Ekonomi Dalam Perlindungan Hak Cipta yang Berkaitan dengan Lagu dan/atau Musik.....	108
5. Pelanggaran terhadap Karya Cipta Lagu dan/atau Musik	113
6. Yayasan Karya Cipta Indonesia.....	116
 BAB III : HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN	118
A. Hasil Penelitian	118
1. Perlindungan Hukum terhadap Pencipta Musik dan/atau Lagu.	118
2. Bentuk-bentuk Pelanggaran Terhadap Hak Pencipta atas Karya Lagu dan/atau Musik.....	150
3. Hambatan-Hambatan dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Pencipta atas Karya Lagu dan/atau Musik ...	157
B. Pembahasan	160
1. Perlindungan Hukum terhadap Pencipta Musik dan/atau Lagu.	165
2. Bentuk-bentuk Pelanggaran Terhadap Hak Pencipta atas Karya Lagu dan/atau Musik.....	205
3. Hambatan-Hambatan dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Pencipta atas Karya Lagu dan/atau Musik	211
 BAB IV : PENUTUP	220
A. Kesimpulan	220
B. Saran.....	221

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

PENERAPAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA Atas KARYA CIPTA LAGU Dan/ Atau MUSIK

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi, komunikasi, industri dan transportasi pada akhir abad ini terasa semakin canggih dan cepat. Kondisi tersebut telah membawa pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan hubungan antar bangsa dan negara di dunia ini. Negara-negara yang mempunyai/menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi canggih secara stratifikasi/tingkatan derajat akan menempati posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara yang miskin di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan seperti itu, menjadi hal yang dapat dipahami adanya tuntutan kebutuhan bagi pengaturan dalam rangka perlindungan hukum yang baik dan pasti.

Keikutsertaan Indonesia dalam beberapa Konvensi Internasional di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual¹ dan telah meratifikasinya, antara lain; *Paris Convention for the protection of Industrial Property* and *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*

¹ Hak atas Kekayaan Intelektual selanjutnya disingkat dengan HaKI

(disahkan dengan keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Keputusan presiden nomor 24 Tahun 1979), *Berne Convention for the Protection of literary and Artistic Works* (disahkan dengan Keputusan presiden nomor 18 Tahun 1997), *WIPO Copyright Treaty* (disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 19 tahun 1997), dan *Agreement Establishing The World Trade Organization* yang mencakup pula *Agreement on Trade related Aspects of Intellectual Property Rights-TRIPs* (disahkan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994).

Sebagai konsekwensi dari keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO (*World trade Organization*) mengharuskan Indonesia menyesuaikan segala peraturan perundangannya di bidang HaKI dengan standar TRIPs. Lahirnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagai pengganti tiga undang-undang yang telah ada sebelumnya yaitu Undang-undang No 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1997. tentang perubahan atas Undang-undang No 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 7 Tahun 1997, walaupun perubahan itu telah memuat beberapa penyesuaian pasal yang sesuai dengan TRIP's namun masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuik memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang hak cipta, dilandasi oleh kebutuhan bangsa Indonesia untuk memiliki suatu sistem perlindungan hukum bagi pencipta sebagai salah satu sarana untuk

menciptakan iklim atau suasana yang kondusif yang mampu merangsang serta menggairahkan semangat Pencipta untuk menuangkan segala inspirasinya dalam sebuah karya cipta di bidang lagu dan / atau musik yang khas dan bersifat pribadi², dengan demikian Hak atas kekayaan Intelektual (HAKI) adalah suatu institusi yang muncul dari dalam suatu komunitas yang sangat sadar akan hak-hak dan kemerdekaan individu, bukan dari suatu komunitas yang lebih berbasis kolektifitas.³

Permasalahan mengenai HaKI akan menyentuh berbagai aspek seperti aspek teknologi, industri, sosial, budaya dan berbagai aspek lainnya. Namun aspek yang terpenting jika dihubungkan dengan perlindungan bagi karya intelektual adalah aspek hukum. Hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan HaKI tersebut. Hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga mampu mengembangkan daya kreasi masyarakat yang pada akhirnya bermuara pada tujuan berhasilnya perlindungan HaKI.

Bagi Indonesia dengan meningkatnya perdagangan internasional yang cenderung menciptakan pasar global yang semakin mengarah kepada perdagangan bebas dan sekaligus mengantisipasi pelaksanaan TRIP's 2000, maka perlindungan hukum Pencipta lagu dan / atau musik harus dilakukan secara maksimal. Hal tersebut secara nyata akan terlihat dari

² Dalam bentuk yang khas, artinya karya tersebut harus telah selesai diwujudkan sehingga dapat dilihat atau didengar atau dibaca. Secara pribadi artinya asli atau tidak meniru. Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 12 tahun 1997 tentang Hak Cipta.

³ Satjipto Rahardjo, *Aspek Sosio-Kultural Dalam Pemajuan HaKI*, Seminar HaKI, FH UNDIP, Semarang, 2000

dampak yang diperoleh dari perlindungan hukum di bidang HAKI khususnya karya cipta lagu dan / atau musik, di luar negeri akan meningkatkan citra Indonesia di forum internasional, sedangkan di dalam negeri akan merangsang kualitas dan kreatifitas pencipta lagu, penyanyi, produksi rekaman kaset, CD maupun VCD serta perlindungan konsumen dari barang-barang bajakan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kondisi lingkungan sosial masyarakat Indonesia di bidang ekonomi, sosial, budaya, ternyata telah memberi pengaruh sangat besar terhadap HaKI khususnya karya cipta lagu atau musik, dimana pengaruh tersebut tidak terbatas pada obyek yang menjadi hak milik dan perlindungan hukumnya saja, melainkan juga terhadap perkembangan kejahatan HaKI itu sendiri yang secara kuantitas relatif tinggi.

Secara umum kejahatan HAKI, seperti pembajakan karya cipta lagu, baik dalam bentuk kaset, CD (Compact Disc) maupun VCD (Video Compact Disc) nampak belum dapat dikatakan meresahkan masyarakat luas,⁴ namun timbulnya kejahatan HAKI dirasakan sangat merugikan, bukan saja bagi pemegang haknya, tetapi juga akan merugikan perekonomian negara dengan memberikan kontribusi yang baik terhadap pendapatan pajak negara yang berpengaruh kepada peningkatan

⁴ dikatakan nampak belum begitu meresahkan masyarakat karena factor social dan ekonomi serta perbandingan harga yang begitu tinggi antara original dengan bajakan, menyebabkan masyarakat memilih kaset, VCD dan CD bajakan dengan harga yang lebih murah dan sesuai dengan kemampuan mereka.

kesejahteraan rakyat banyak, dan citra Indonesia di forum internasional dalam menyongsong era perdagangan bebas.

Perlindungan hukum terhadap Pencipta lagu dan/atau musik tidak terlepas dari beberapa faktor diantaranya sikap masyarakat yang kurang menghargai sebuah karya cipta, sikap dan keinginan untuk memperoleh keuntungan dagang dengan cara cepat dan mudah, belum cukup terbinanya kesamaan pengertian, sikap dan tindakan dari Pencipta dalam melindungi hak-haknya dan belum cukup terbinanya kesamaan pengertian, sikap dan tindakan aparat penegak hukum dalam menghadapi pelanggaran Hak Cipta.

Perlindungan hukum terhadap HaKI tidak dapat terlepas dari adanya sebuah system informasi HaKI yang integral dan mudah diakses oleh masyarakat luas; dan penegakan hukum secara integral, pelanggaran dalam bentuk pembajakan hasil karya intelektual yang dilindungi oleh undang-undang akan semakin berkurang. Sinergi antara keduanya, system informasi yang integral dan penegakan hukum yang integral pada akhirnya akan membawabangsa Indonesia kepada kehidupan yang lebih beradab, yang menghargai hasil karya cipta intelektual orang lain. Namun demikian peran serta dan dukungan masyarakat secara aktif tetap merupakan kunci sukses dalam penegakan HaKi secara keseluruhan.

Untuk itu penelitian ini mencoba untuk mengkaji dan membahas tentang Penerepan Undang-Undang Hak Cipta terhadap perlindungan hukum Pencipta di bidang lagu dan / atau musik .

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum kepada Pencipta dalam penerapan Undang-undang hak Cipta di bidang lagu dan/atau musik ?
2. Bentuk-bentuk pelanggaran apakah yang ditemui dalam rangka perlindungan hukum terhadap hak pencipta di bidang lagu dan/atau musik ?
3. Apakah hambatan-hambatan yang ditemui dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran hak pencipta atas karya lagu dan/atau musik ?

C. TINJAUAN PUSTAKA

Kerangka atau dasar pemikiran diberikannya seorang individu perlindungan hukum terhadap ciptaannya bermula dari teori yang tidak lepas dari dominasi pemikiran mazhab atau doktrin hukum alam yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal seperti yang dikenal dalam Sistem Hukum Sipil (*Civil Law System*) yang merupakan sistem hukum yang dipakai di Indonesia.⁵

Pengaruh mazhab hukum alam ini terhadap seorang individu yang menciptakan pelbagai ciptaan yang kemudian memperoleh perlindungan

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, 1958, hal. 292.

hukum atas ciptaan yang merupakan kekayaan intelektual sangat berpengaruh di negara-negara dengan system hukum sipil dan mendapatkan tempat sebagai refleksi pada Pasal 27 ayat 1 deklarasi Universal hak-hak Asasi Manusia yang menetapkan :⁶

Setiap orang mempunyai hak sebagai pencipta untuk mendapat perlindungan kepentingan-kepentingan moral dan material yang merupakan hasil dari ciptaannya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra,

Dengan adanya pengakuan secara universal ini, tidak diragukan lagi bahwa suatu ciptaan mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia (*life worthy*) dan mempunyai nilai ekonomi sehingga menimbulkan adanya tiga macam konsepsi :⁷

1. Konsepsi kekayaan;
2. Konsepsi Hak;
3. Konsepsi perlindungan hukum.

Kehadiran tiga konsep hukum ini lebih lanjut menimbulkan kebutuhan akan adanya pembangunan hukum dalam bentuk pelbagai perundang-undangan. Tentang pembangunan hukum ini, Mochtar Kusumaatmadja⁸ mempunyai pendapat dan pemikiran bahwasannya hukum adalah sebagai sarana bagi pembangunan dan sarana pembaharuan masyarakat. Selanjutnya Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa

⁶ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal 17-18.

⁷ *Ibid*

⁸ Mochtar Kusumaatmadja (1) *Fungsi dan Perkembangan hukum dalam Pembangunan Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, hal 2-3, tanpa tahun

tanpa kepastian hukum dan ketertiban masyarakat yang dijelmakan olehnya tidak mungkin mengembangkan bakat-bakat dan kemampuan yang diberikan tuhan kepadanya secara optimal di dalam masyarakat tempat ia hidup.

Selaras dengan pemikiran yang dikemukakan di atas, kita mengetahui bahwa pengembangan bakat-bakat dan kemampuan manusia memerlukan adanya upaya-upaya untuk mewujudkannya termasuk melalui penumbuhan pelbagai aturan yang mendukungnya sehingga tercapai suatu kepastian hukum. Penumbuhan pelbagai aturan ini diperlukan sehingga timbulah sikap dan kebutuhan masyarakat yang memberi penghargaan penghormatan dan perlindungan terhadap bakat-bakat dan kemampuan yang dipunyai seseorang, yang diwujudkan dalam bentuk berbagai karya. Termasuk didalamnya berbagai kekayaan intelektual yang lebih besar, lebih baik dan lebih banyak timbul dari kemampual intelektual manusia sebagai refleksi pribadinya.⁹

Sehubungan dengan itu, Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta telah disusun dan disahkan. Perlindungan hukum atas hak cipta bukan saja merupakan pengakuan negara terhadap hak karya cipta seorang pencipta, tetapi juga diharapkan bahwa perlindungan tersebut akan dapat membangkitkan semangat dan minat yang lebih besar dalam melahirkan ciptaan baru di bidang lagu dan/atau musik.

⁹ Eddy Damian, *Op. Cit.*, hal 20

Namun demikian, di dalam pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, ternyata banyak dijumpai terjadinya pelanggaran terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan terhadap Hak Cipta. Sehingga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 diperbaharui¹⁰ oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dalam upaya untuk meningkatkan efektifitas penindakan, ketentuan bahwa pelanggaran terhadap hak cipta merupakan tindak pidana aduan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga diperlakukan sebagai tindak pidana biasa diatur dalam Pasal 46 Undang-undang No. 7 tahun 1987 ialah : tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 adalah kejahatan. Dengan demikian penindakan yang diambil tidak lagi semata-mata didasarkan pada adanya pengaduan¹¹ dan perubahan masalah jangka waktu perlindungan, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 berlaku selama pencipta hidup dan terus berlangsung selama 25 tahun, menjadi 50 tahun. Perubahan ini berkaitan dengan praktek yang dianut oleh negara-negara lain dan juga dalam rangka kebutuhan Indonesia untuk menyesuaikan diri bilamana suatu saat akan mempertimbangkan

¹⁰ Lihat Saidin, *Ibid.*, hlm 2. Kata "diperbaharui" ini merupakan tanda Tanya, oleh karena terlalu sering dalam peraturan perundang-undangan yang keluar dalam bentuk demikian. Tidak jelas alasan lembaga legislative membuat produk hukum yang demikian. Akibat lebih lanjut adalah bertumpuknya peraturan perundang-undangan hukum positif. Peraturan yang baru dikeluarkan justru tidak menggantikan peraturan yang lama, tetapi menambah. Seyogyanya meskipun diubah satu pasal saja, peraturan terakhir ini harus merumuskan semua pasal dalam peraturan sebelumnya yang tidak turut diubah, segera setelah itu peraturan yang lama tersebut harus dinyatakan dicabut agar peraturan perundang-undangan hukum positif menjadi jelas dan rinci.

¹¹ Lihat Saidin, *Ibid.*, hlm. 74. Hak Cipta menyangkut perlindungan terhadap hak pencipta sebagai hak kebendaan yang bersifat social.

keikutsertaan dalam suatu perjanjian internasional di bidang perlindungan Hak Cipta.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara antara lain menegaskan bahwa perkembangan dunia yang mengandung peluang untuk menunjang dan mempercepat pelaksanaan pembangunan nasional perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Perkembangan dunia teknologi informasi dan transportasi yang berlangsung begitu cepat dan pesat di masa yang akan datang dengan meluasnya arus globalisasi di bidang ekonomi, sosial, budaya maupun bidang lainnya, bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama. Indonesia menyempurnakan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 7 Tahun 1987 dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, yang kemudian revisi sebagai pengganti tiga undang-undang hak cipta sebelumnya dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, sebagai konsekwensi keikutsertaan Indonesia dalam konvensi internasional seperti yang telah diterangkan di atas.

Adanya berbagai peraturan perundangan yang memberikan perlindungan Hak Cipta terhadap Pencipta lagu dan / atau musik apakah dapat secara efektif melindungi dari tangan pembajak karya cipta. Lebih dari tiga puluh tahun yang lalu, sewaktu membicarakan hambatan mental dalam pembangunan Indonesia, anthropologi Prof. Koentjoroningrat (alm.) sudah melontarkan kritik terhadap bangsa Indonesia, bahwa

hambatan besar untuk membangun adalah (1) mentalitas menerobos dan (2) sikap tidak menghargai karya / mutu.¹² Kedua hal itu menurut Satjipto Rahardjo menimbulkan gangguan ketika kita ingin memajukan HaKI, mentalitas HaKI erat hubungannya dengan penghargaan terhadap mutu karya seseorang, disini terdapat prinsip repositas.¹³

Apabila kita belum dapat menghargai mutu / karya, maka dilain pihak “mentalitas menerobos” merusak kemampuan sendiri untuk dengan tekun dan telaten menghasilkan karya – karya yang berkualitas, sikap menerobos adalah sikap orang bodoh dan berjiwa kasar¹⁴ dan melanggar ketentuan Undang - undang yang berlaku.

D. TUJUAN PENELITIAN

Bertitik tolak dari pokok permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mengetahui dan mendalami peranan Undang - Undang Hak Cipta terhadap perlindungan hukum Pencipta di bidang lagu dan/atau musik ; dan
- b. Mengetahui dan mendalami bentuk-bentuk pelanggaran yang ditemui dalam rangka perlindungan hukum terhadap pencipta di bidang lagu dan/atau musik.

¹² Koentjoroningrat, *Rintangan – Rintangan Mental dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia*, 1969. Lihat Satjipto Rahardjo, *Aspek Sosio Kultural Dalam Pemajuan HaKI* (makalah seminar nasional UNDIP, November 2000).

¹³ Lihat, Satjipto Rahardjo, *Ibid.* Prinsip Repositas yaitu kita ingin karya kita dihargai dan pada waktu yang sama kita tidak menghargai karya orang lain.

¹⁴ Lihat Satjipto Rahardjo, *Ibid.*

- c. Mengetahui dan mendalami penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta atas karya lagu dan/atau musik dalam rangka perlindungan hukum terhadap pencipta di bidang lagu dan/atau musik.

E. KONTRIBUSI PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat :

1. secara teoritis, sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan substansi disiplin dibidang Ilmu Hukum khususnya Hukum Ekonomi dan Teknologi, dan ;
2. secara praktis, sebagai bahan yang dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah atau para pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan karya cipta lagu atau musik sebagai pengembangan kreatifitas dan khasanah budaya bangsa.

F. METODE PENELITIAN

1. Objek atau Fokus yang Diteliti

Dalam penelitian ini, objek atau fokus yang akan diteliti adalah mengenai Undang - Undang Hak Cipta dalam penerapannya dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta karya cipta lagu dan / atau musik.

2. Metode Pendekatan

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan pendekatan penelitian normatif yang didukung dengan penelitian empiris.¹⁵

Pendekatan penelitian hukum normatif dilakukan dengan penelitian inventarisasi hukum positif penelitian terhadap asas – asas hukum positif, penelitian terhadap sistematika hukum positif, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan terhadap taraf sinkronisasi horizontal dari peraturan perundang-undangan hukum positif¹⁶ dan penelitian perbandingan hukum positif.¹⁷ Sedangkan penelitian hukum empiris yang dilakukan termasuk penelitian kualitatif induktif fenomenologis, yang menggunakan data primer.¹⁸

3. Penentuan Lokasi Penelitian / Penentuan Sampel

Penelitian ini akan dilakukan di Jakarta pada :

- Direktorat Jenderal Cipta, Paten dan Merk Departemen Kehakiman
- Yayasan Karya Cipta Lagu Indonesia
- Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI)
- Persatuan Artis Pencipta Lagu dan penata Musik rekaman Indonesia (PAPPRI)

¹⁵ Menurut Sunaryati Hartono, dalam penulisan tesis penggunaan pendekatan penelitian hukum empiris disamping penelitian hukum normative akan memberikan bobot lebih pada penelitian yang bersangkutan, dalam CFE Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke – 21* (Bandung, Alumni, 1994), hlm. 142.

¹⁶ Ronny Hanintjo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 12.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta; Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 14 – 15.

¹⁸ Ronny Hanintjo Sumitro, *op. Cit.*, hlm. 10.

Berdasarkan lokasi penelitian diatas, maka sample yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

- Kepala / Pimpinan pada Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merk Departemen Kehakiman yang membidangi Hak Cipta.
- Ketua YKCI (Yayasan Karya Cipta Lagu Indonesia).
- Ketua Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI)
- Ketua Persatuan Artis Pencipta Lgu dan penata Musik rekaman Indonesia (PAPPRI)

4. Sumber Data

sebagai dasar pembahasan dalam penelitian ini digunakan bahan penelitian yang bersumber pada data penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Penelitian kepustakaan antara lain :

a. Bahan penelitian hukum Primer, yaitu :

1. Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945,
2. Ketetapan – ketetapan MPR, dan;
3. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan perlindungan Hak Cipta.

b. Bahan hukum Sekunder, berupa :

1. Buku-buku literature yang berkaitan langsung dengan perlindungan Hak Cipta,
2. Hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, dan;

3. Berbagai jurnal, makalah/bahan penataran maupun artikel – artikel yang berkaitan dengan materi penelitian.
- c. Bahan Hukum Tertier, yaitu kamus, ensiklopedia, dan bahan- bahan lain yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan- bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

5. Metode Pengumpulan Data

Data yang ingin diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara :

- a. Data kepustakaan, dilakukan dengan studi / literature. Dalam hal ini dilakukan dengan inventarisasi dan pengumpulan buku-buku, bahan- bahan bacaan, peraturan perundang-undangan dan dokumen- dokumen lain. Dari bahan-bahan tersebut dibuat ringkasan- ringkasannya. Bahan-bahan yang dicatat meliputi permasalahan, argumentasi, langkah-langkah yang diambil serta konsekuensi dan alternatif pemecahan masalah. Kepustakaan yang dipilih dibatasi menurut sifat keilmuan yaitu ilmu hukum, dan ilmu hukum ekonomi dan teknologi. Bidang yang akan ditelaah ditekankan pada hukum Hak Cipta dengan tetap memperhatikan bidang ilmu lain yang mendukung pemecahan masalah.
- b. Data lapangan, dikumpulkan dengan menggunakan alat penelitian wawancara. Wawancara dilakukan terhadap informasi yang telah ditentukan sebelumnya dengan berdasarkan pada pedoman

wawancara, sehingga wawancara yang dilakukan merupakan wawancara yang difokuskan (focused interview) ¹⁹. Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan terhadap sumber informasi yang mempunyai pengalaman tertentu atau terlibat langsung pada obyek tertentu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

6. Metode Analisa Data

Analisa dalam penelitian ini dilakukan dengan analisa normatif kualitatif untuk hasil penelitian hukum normatif. Untuk hasil penelitian empiris dilakukan dengan penelitian domain untuk memperoleh gambaran atau pengertian yang bersifat umum dan relatif menyeluruh, analisis taksonomi untuk menelaah lebih rinci dan mendalam dimana focus penelitian ditetapkan terbatas pada domain tertentu. Kemudian dilakukan analisa komponensial yang berguna menemukan pengertian yang komprehensif, menyeluruh, rinci dan mendalam mengenai suatu domain sehingga dapat memahami makna dari masing – masing domain secara holistik.

7. Metode Pengecekan Validitas Data

Pengecekan data yang dilakukan dengan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan atas kebenaran suatu informasi yang diperoleh dalam waktu dan dengan instrumen yang berbeda ²⁰ sebagai berikut :

1. membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;

¹⁹ Ronny Hanintjo Sumitro, *Ibid*.

²⁰ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung; 1997), hlm. 178.

2. membandingkan apa yang dikatakan didepan umum dengan yang dikatakan secara pribadi;
3. membandingkan apa yang dikatakan pada situasi penelitian dengan yang dikatakan sepanjang waktu;
4. membandingkan keadaan dan perspektif dengan berbagai pendapat yang berbeda stratifikasi sosialnya;
5. membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.



BAB II

INTRODUKSI TEORI

A. TINJAUAN TERHADAP HAK atas KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA UMUMNYA

1. Latar Belakang Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual

Sejak awal dasawarsa delapan puluhan HaKI kian berkembang menjadi bahan percaturan yang sangat menarik. Di bidang ekonomi, terutama industri dan perdagangan internasional, HaKI menjadi penting. Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi, komunikasi, industri dan transportasi pada akhir abad ini terasa semakin canggih dan cepat. Kondisi tersebut telah membawa pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan hubungan antar bangsa dan negara serta perkembangan perdagangan dunia yang didukung oleh kemajuan teknologi telah menjadikan perubahan dunia yang cukup besar dewasa ini. Jarak antar negara tidak lagi menjadi kendala dalam suatu transaksi perdagangan berkat kemajuan teknologi.

HaKI senantiasa terkait dengan persoalan perekonomian suatu negara. Pada negara-negara maju, kesadaran akan manfaat HaKI dari sudut ekonomi telah tertanam dengan kuat. Beberapa studi ekonomi yang dilakukan di negara-negara maju membuktikan produk-produk yang dilindungi dengan

HaKI mampu meningkatkan pendapatan nasional suatu negara serta menambah angka angkatan kerja nasional.¹⁵

Manfaat ekonomi yang sedemikian besar dari HaKI menjadikan suatu negara dapat peka terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum HaKI oleh negara lain. Bahkan tidak mustahil akan timbul berbagai ketegangan dalam hubungan internasional apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran semacam itu.¹⁶

Karya-karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra dilahirkan atau dihasilkan dengan pengorbanan tenaga, waktu dan bahkan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan memiliki nilai. Apalagi ditambah adanya manfaat yang dapat dinikmati, dari sudut ilmu ekonomi karya-karya seperti itu memiliki nilai ekonomi. Karena adanya nilai, terutama nilai ekonomi itulah kemudian timbul konsepsi kekayaan (*property*) terhadap karya-karya intelektual tersebut.¹⁷

Konsepsi kekayaan ini pada gilirannya mendorong kebutuhan mengenai pengamanannya. Dari segi ini pula kemudian timbul kepentingan untuk menumbuhkan dan mengembangkan sistem perlindungan hukum HaKI tersebut.

Prinsip utama pada HaKI yaitu bahwa hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya tersebut, maka pribadi yang

¹⁵ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), *Op.Cit.*, hal. 2

¹⁶ *Ibid.* Hal.3

¹⁷ Bambang Kesowo, *Perlindungan Hukum serta Langkah-Langkah Pembinaan Oleh Pemerintah dal Bidang Hak Milik Intelektual*, Makalah, Jakarta, 7 Agustus 1990.

menghasilkannya mendapatkan kepemilikannya berupa hak alamiah (*natural*). Begitulah sistem Hukum Romawi menyebutkannya sebagai cara perolehan alamiah (*natural acquisition*) berbentuk spesifikasi yaitu melalui penciptaan. Pandangan demikian terus di dukung, dan dianut banyak sarjana, mulai dari Locke sampai kepada kaum sosialis. Sarjana-sarjana hukum Romawi menamakan apa yang diperoleh di bawah sistem masyarakat, ekonomi dan hukum yang berlaku sebagai perolehan sipil, dan dipahami bahwa asas *cuique tribuere* menjamin, bahwa benda yang diperoleh secara demikian adalah kepunyaan seseorang itu.¹⁸

HaKI ini baru ada bila kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu yang bisa dilihat, didengar, dibaca maupun digunakan secara praktis.¹⁹ Menurut W. R Cornish, milik intelektual melindungi pemakaian ide dan informasi yang mempunyai nilai komersil atau nilai ekonomi.²⁰

David I Bainbridge mengatakan bahwa "*Intellectual property*" is the collective name given to legal rights which protect the product of the human intellect.²¹ The term intellectual property seem to be the best available to

¹⁸ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah Teori dan Perakteknya di Indonesi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 1993), hal. 19. Lihat dalam buku Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum: Terjemahan Mohammad Radjab*, Cetakan ketiga, (Jakarta: Bantara Karya Aksara, 1982), hal. 118.

¹⁹ Lihat Undang-undang No 12 Tahun 1997, Pasal 1 ayat (1).

²⁰ Paingot Rambe Manalu, *Hukum Dagang Internasional: Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Hukum nasional, Khususnya Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Novindo pustaka Mandiri, 2000), hal. 122.. Lihat juga dalam W.R. Cornish, *Intellectual Property*, Edisi 2 (London: Sweet & Maxwell 1989), hal.5

²¹ David I, Bainbridge, *Computers and The Law*, (London: Pitman Publishing, cetakan ke-1, 1990), hal.7. lihat dalam Muhammad Djumhana dan R. Djubaidillah, *Op. Cit.* hal. 16.

*cover that body of legal rights which arise from mental and artistic endeavour.*²²

Dari uraian di atas kita dapat menyimpulkan bahwa HaKI merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi, bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual tersebut bisa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra.²³

Perlindungan hukum terhadap HaKI ini pada dasarnya berintikan pengakuan terhadap hak atas kekayaan tersebut, dan hak untuk dalam waktu tertentu menikmati atau mengeksploitasi sendiri kekayaan tersebut. Selama kurun waktu tertentu itu, orang lain hanya dapat menikmati atau menggunakan atau mengeksploitasi hak tersebut atas ijin pemilik hak. Karena perlindungan dan pengakuan tersebut hanya diberikan khusus kepada orang yang memiliki kekayaan tadi, maka sering dikatakan eksklusif sifatnya.

Sebagai suatu hak milik yang timbul dari karya, karsa, cipta manusia, atau dapat pula disebut sebagai hak atas kekayaan yang timbul karena, atau lahir dari kemampuan intelektualitas manusia. Atas hasil kreasi tersebut, dalam masyarakat beradab diakui bahwa yang menciptakan boleh menguasai untuk tujuan yang menguntungkan. Kreasi sebagai milik berdasarkan postulat hak

²² John F. Williams, *A Manager's Guide to Patent, Trade Marks & Copy Rights*, (London: Kogan Page, cetakan ke-1, 1986), hal.11. Lihat dalam Muhammad Djumhana dan R. Djubaidillah, *Ibid.*, hal. 16.

²³ Muhammad Djumhana dan R. Djubaidillah, *Ibid.*, hal.16.

milik dalam arti seluas-luasnya yang juga meliputi milik yang tidak berwujud.²⁴

Sebagaimana yang kita ketahui bersama dalam tataran wacana di masyarakat, kita menyaksikan ada dua hal perdebatan tentang HaKI, yaitu menerima atau menolak HaKI sebagai sebuah fenomena budaya baru yang tumbuh subur di tengah-tengah kehidupan kita. Bagi masyarakat yang menerima HaKI, kita akan menemukan argumentasi yang sangat logis untuk tidak dapat menolak perlindungan HaKI dalam kehidupan kita, berdasarkan asumsi-asumsi bahwa untuk mendapatkan HaKI, maka seseorang atau sekelompok orang (penemu) telah mengeluarkan tenaga, modal dan pikiran.²⁵

Analisa yang berbeda menyebutkan bahwa HaKI hanya sebuah alat dari “Imperialisme dalam bentuk baru” yang dilakukan oleh negara-negara maju terhadap negara berkembang. Alasan ini sangat beraalasan, bila kita memandang HaKI dalam perspektif yang lebih luas, yaitu analisa perkembangan sejarah ekonomi politik dunia. Analisa ini berdasarkan fakta sejarah bahwa kepentingan dagang selalu menjadi faktor utama dalam sejarah masyarakat dunia.²⁶

Dengan gambaran singkat di atas, kiranya menjadi jelas mengapa upaya untuk melindungi HaKI menjadi hal yang penting bagi negara-negara di dunia ini. Perlindungan terhadap HaKI sama pentingnya dengan perlindungan

²⁴ Muhammad Djumhana dan R. Djubaidillah, *Ibid.*, hal. 17. lihat dalam buku Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum* (Terjemahan Mohammad Radjab), Cetakan ketiga, (Jakarta :Bantara Karya Aksara, 1982), hal. 118.

²⁵ M. Sofyan, P., *Latar Belakang Ekonomi Politik Terhadap Perlindungan Hukum HaKI*, Lembaga Kajian Hukum Teknologi-Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001

²⁶ *Ibid.*

kepentingan ekonomi, terutama dalam perdagangan internasional. Pertikaian HaKI sudah tidak lagi menjadi masalah teknis hukum, tetapi juga merupakan pertikaian dagang.²⁷ Seperti pertikaian antara AS dan RRC, pada awalnya bermula terutama dari sengketa di bidang Hak Cipta, yaitu permintaan AS agar RRC dengan tegas memberi perlindungan terhadap komputer program. Ketidakpuasan AS terhadap sikap RRC yang dinilainya tidak sungguh-sungguh dalam masalah ini, telah mendorong AS mengeluarkan ancaman sanksi berupa pencabutan prefensi dagang atas produk ekspor RRC yang selama ini diberikan oleh AS. Ancaman yang bernilai kurang lebih US\$ 200 juta per tahun tersebut (yang dinikmati RRC karena pemberian status "*most favoured nation*" oleh AS), pada gilirannya telah menyulut ketegangan diantara kedua negara.²⁸

Secara nasional, pertumbuhan, perkembangan dan memperhatikan arti dan peran HaKI dalam kehidupan ekonomi, serta kecenderungan yang terjadi dalam tatanan kehidupan antar bangsa di bidang perdagangan, tidak dapat disangsikan lagi betapa perlunya perhatian dan perlindungan yang baik terhadap HaKI ini.

²⁷ Bambang Kesowo. *Pengantar Umum Mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) di Indonesia*, Tanpa Penerbit dan Tanpa Tahun, hal. 3-4.

²⁸ *Ibid.*, hal. 5

2. Konvensi Internasional Mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual

Berkembangnya perdagangan internasional, dan adanya gerakan perdagangan bebas mengakibatkan makin terasa kebutuhan perlindungan terhadap HaKI yang sifatnya tidak lagi timbal balik tetapi sudah bersifat antar negara secara global. Pada akhir abad kesembilan belas, perkembangan pengaturan masalah HaKI mulai melewati batas-batas negara. Tonggak sejarahnya dimulai dengan dibentuknya Uni Paris untuk perlindungan Internasional Milik Perindustrian pada tahun 1883. selang beberapa tahun kemudian, pada tahun 1886 di bentuk pula sebuah konvensi untuk perlindungan di bidang Hak Cipta yang dikenal dengan *International Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, yang ditandatangani di Bern.²⁹ Pada awalnya kedua konvensi itu masing-masing membentuk union yang berbeda, yaitu : Union Internasional untuk perlindungan Hak Milik Perindustrian (*The International Union for The Protection of Industrial Property*), dan Union Internasional untuk perlindungan Hak Cipta (*International Union for the Protection of Literary and Artistic Works*). Meskipun terdapat dua union, tetapi pengurusan administrasinya dalam satu manajemen yang sama, yaitu *United Biro for the Protection of Intellectual Property*., yang dalam bahasa Perancisnya *Bivieaux International Reunis pour la Protection de la Propriete Intelectuelle (BIRPI)*.

²⁹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaidillah, 1993, *Op.Cit.*., hal. 11

Perkembangan selanjutnya timbul keinginan agar terbentuk suatu organisasi dunia untuk hak atas Kekayaan Intelektual secara keseluruhan. Melalui Konferensi Stockholm tahun 1967, telah diterima suatu konvensi khusus untuk pembentukan organisasi dunia untuk HaKI (*Convention establishing the World Intellectual Property Organization/WIPO*). WIPO sebagai Organisasi HaKI kemudian menjadi pengelola tunggal kedua konvensi tersebut.³⁰

2.1. Konvensi Yang Mengatur Masalah Hak Cipta

Pengaturan internasional tentang hak cipta dapat dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral atau berdasarkan perjanjian multilateral.³¹ Konvensi Hak Cipta dimulai dari Konvensi Bern 1886 di Bern, ibu kota Switzerland, sepuluh kepala negara Belgium, France, Germany, Great Britain, Haiti, Italy, Liberia, Spain, Switzerland, Tunisia (*Original Members*) menandatangani pendirian suatu organisasi internasional Bern Union yang bertujuan melindungi karya-karya cipta di bidang seni dan sastra. Bersamaan dengan pendirian organisasi internasional ini, ditandatangani juga suatu kesepakatan mengikatkan diri pada Perjanjian Internasional, yaitu *International Convention for the Protection of Literary and Artistic Work*, (disingkat Bern Convention). Kemudian diikuti tujuh negara (Denmark, Japan, Luxemburg, Monaco, Montenegro, Norway, Sweden) yang menjadi peserta dengan cara aksesi menandatangani naskah asli Konvensi Bern.

³⁰ *Ibid.*, hal. 11

³¹ Edy Damian, Op.Cit., hal. 57.

Konvensi Bern yang tergolong sebagai *Law Making Treaty*, terbuka bagi semua negara yang belum menjadi anggota. Keikutsertaan sebagai negara anggota baru harus dilakukan dengan meratifikasinya dan menyerahkan ratifikasinya kepada Direktur Jenderal WIPO.

2.2. Konvensi Hak Kekayaan Industrial

Hak milik perindustrian meliputi tiga komponen, yaitu Paten, Merk dan Desain Industri, pengaturannya hanya dalam satu konvensi, yaitu *the Paris convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris), dengan demikian pengaturan dalam Konvensi Paris mencakup hak merk, hak paten dan hak desain industri. Isi dari Konvensi Paris dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian penting, yaitu *Pertama*, ialah ketentuan-ketentuan pokok mengenai prosedur. *Kedua*, yaitu mengenai prinsip-prinsip yang dijadikan pedoman wajib negara-negara anggota Uni. *Ketiga*, yaitu ketentuan-ketentuan mengenai materi hak milik perindustrian yaitu paten, merk dan desain industri itu sendiri.

Konvensi dan perjanjian mengenai konvensi hak kekayaan perindustrian antara lain adalah :³²

Bidang Paten, antara lain :

1. *European Convention Relating to the Formalities Required to Patent Application* (1953)

³² Muhammad Djumhana dan R. Djubaidillah, *Op. Cit.*, hal. 13-16.

2. *European Convention for International Classification of Patent* (1954)
3. Perjanjian Paten lainnya, adalah yang mengatur klasifikasi secara internasional yaitu *Strasbourg Agreement Concerning the International Patent Classification*
4. Perjanjian kerjasama Paten Washington 1970 (*Patent Cooperation Treaty disingkat (PCT)*)
5. *European Patent Convention* (EPC) tahun 1973
6. *The Community Patent convention* (CPC) tahun 1975

Bidang Merk, antara lain :

1. Perjanjian Madrid 1891, (*Madrid Agreement Concerning the Repression of False Indications of Origin*)
2. *Madrid Arrangement Concerning the International registration of trade marks*
3. Perjanjian Den Haag, 1925 mengenai Deposit internasional tentang gambar-gambar atau model kerajinan (*The hague Arrangement Concerning the International Deposit of Industrial Patern and Design*) dan perjanjian ini pernah diperbaharui di London pada tahun 1934
4. Agreement Lisabon mengenai perlindungan pendaftaran internasional mengenai keterangan-keterangan asal barang (*Lisabon Agreement Concerning the Protection and International Registration of Declaration of origin*, 31 Oktober 1938)
5. *Agreement Nice* mengenai klasifikasi internasional berkenaan dengan *Trademark* (*Nice Agreement Concerning the international*

Classification of Good and Service to which Trademarks Apply, 15 juni 1975).

Konvensi mengenai desain industri bersatu dalam Konvensi Paris, yaitu Konvensi untuk perlindungan hak perindustrian 1883, Konvensi Den Haag 1925 atau *"The Hague Arrangement Concerning the International Deposit of Industrial Pattern and Design"*.

3. Beberapa Organisasi dan Konvensi Internasional Berkaitan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual

3.1. Organisasi Hak atas kekayaan Intelektual Dunia (*World Intellectual Property organization/WIPO*)

Selain revisi dan penyempurnaan, baik konvensi Paris dan Konvensi Bern yang telah dirumuskan di atas, dalam perkembangan kedua konvensi ini timbul keinginan negara-negara peserta konvensi agar dibentuk suatu organisasi dunia untuk HaKI secara keseluruhan. Oleh karena itu, melalui Konferensi Stockholm tahun 1967 telah diterima suatu konvensi khusus untuk pembentukan organisasi dunia untuk HaKI (*Convention Establishing the World Intellectual Property organization/WIPO*). WIPO sebagai organisasi HaKI kemudian menjadi pengelola tunggal kedua konvensi tersebut.

Pada mulanya WIPO ini menganut beberapa prinsip diantaranya Prinsip Teritorial (*the territorial principle*), negara-negara anggota berhak untuk menentukan sendiri konkrit HaKI negaranya dalam penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan WIPO, tidak memiliki mekanisme penegakan hukum dan mekanisme penyelesaian perselisihan (*law enforcement and dispute settlement*), dan lain-lain.

Sebagaimana telah disinggung di atas, keberadaan WIPO seperti ini telah menjadikan negara-negara maju/industri meragukan peranan WIPO. Terutama mengenai mekanisme penegakan hukum dan penyelesaian perselisihan. Oleh karena itulah, masalah ini menjadi agenda pembahasan di dalam GATT pada putaran Uruguay yang dimulai sejak tahap permulaan perundingan awal tahun 1986 di Punta del Este Uruguay. Selanjutnya di dalam perundingan tahap akhir di Marakesh, Maroko, diambil keputusan pada tanggal 15 April 1994. salah satu diantaranya mengenai *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights-TRIPS*) yaitu mengenai Aspek Dagang yang Terkait dengan HaKI.

Kekawatiran negara-negara maju terhadap keberadaan WIPO terutama dalam masalah mekanisme penegakan hukum dan penyelesaian perselisihan. Pada dasarnya, sebelum menetapkan permasalahan ini di dalam TRIPs pada perjanjian Marakesh dalam Putaran Uruguay dalam rangka GATT pada bulan April 1994, WIPO telah membentuk *Arbitration Center* pada sidang WIPO

bulan September 1993. pusat Arbitrase ini berpusat di Swiss dan mulai beroperasi pada bulan Oktober 1994.³³

Badan ini bertugas mengatur arbitrase, dan sebagai nara sumber bagi negara-negara anggota WIPO. Saat ini badan tersebut mempunyai lebih dari seratus limapuluh anggota.³⁴ Sebagai pusat arbitrase, badan ini memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan HaKI, melalui prosedur mediasi, arbitrase, arbitrase yang dipercepat, dan prosedur secara kombinasi.

Dengan tenaga ahli dari berbagai negara sebagai arbiterator dan mediator, badan ini memberikan putusan-putusan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa dengan sistem hukum dan tempat yang bebas, yang tidak terikat pada sistem hukum dan tempat tertentu, tetapi tergantung kepada pilihan hukum para pihak.³⁵

Sebagai pusat nara sumber (*Resource Center*), badan ini menjembatani bidang HaKI dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dengan memberi bantuan, antara lain, membantu menyusun klausula arbitrase guna diselesaikan melalui Dewan Arbitrase, menyusun naskah persetujuan para pihak (*Submission Agreement*) dalam sengketa yang ada, dan memberikan jasa menyelenggarakan pertemuan para pihak. Dengan demikian, khusus masalah penyelesaian sengketa di bidang HaKI, pada dasarnya WIPO

³³ Sudargo Gautama, *Jurnal hukum Bisnis*, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Volume 1 (Jakarta: 1997) hal. 87

³⁴ *Ibid.*, hal 87

³⁵ Sudargo Gautama, salah satu tenaga ahli arbitrase WIPO dari Indonesia atas rekomendasi Pemerintah Republik Indonesia. Lihat dalam Paingot Rambe Manalu, *Op. Cit.*, hal. 144

telah memiliki perangkat yang memadai dan telah permanen, sementara hal serupa belum dimiliki TRIPs.

Selain dari pada itu GATT tetap mensyaratkan, bahwa setiap anggota di dalam kewajiban internasional yang berkaitan dengan HaKI memasukkan TRIPs ke dalam hukum nasionalnya, termasuk konvensi-konvensi internasional lainnya, seperti Bern Convention tentang *Copyright* dan *Washington Treaty on intellectual Property in Respects of Integrated Circuits*.³⁶ Dengan demikian, dalam rangka GATT, konvensi-konvensi yang ada di dalam naungan WIPO tetap dipakai sebagai acuan.

3.2. Persetujuan umum Mengenai Tarif dan Perdagangan (*General Agreement on Tariff and Trade/GATT*)

Persetujuan umum Mengenai Tarif dan Perdagangan (*General Agreement on Tariff and Trade/GATT*) adalah suatu perjanjian internasional di bidang perdagangan internasional yang bertujuan menciptakan suatu iklim perdagangan yang aman dan jelas bagi masyarakat bisnis agar tercipta perdagangan dunia yang bebas tanpa diskriminasi serta untuk menciptakan liberalisasi perdagangan dalam bidang-bidang penanaman modal, lapangan kerja dan mencegah terjadinya perang dagang yang merugikan dan lain-lain.³⁷ Dengan tujuan demikian, sistem perdagangan internasional yang diupayakan oleh GATT adalah sistem perdagangan yang dapat meningkatkan

³⁶ Normin S. Pakpahan, *Jurnal Hukum Bisnis*, volume 3, (Jakarta : 1998), hal. 42.

³⁷ Huala Adolf & Chanrawulan A., *Masalah-Masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional*, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 1994), hal. 1.

pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dunia.³⁸ Peran GATT yang sedemikian besar, didukung lebih dari 120 negara, yang berarti 90 % nya dari negara-negara produksi di dunia.³⁹

Benih sejarah pembentukan GATT berawal pada waktu ditandatangani Piagam Atlantik (*Atlantic Charter*) pada bulan Agustus 1941, yang bertujuan menciptakan suatu sistem perdagangan dunia yang didasarkan pada non-diskriminasi dan kebebasan tukar menukar barang dan jasa. Hal ini dilakukan untuk mencegah terulangnya praktek proteksionisme yang berlangsung pada tahun 1930-an yang sangat memukul perekonomian dunia.⁴⁰ Dengan tujuan tersebut, serangkaian pembahasan dan perundingan telah dilaksanakan, yang berkisar di dalam upaya-upaya pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, yang dilakukan terutama oleh Amerika Serikat, Inggris dan Kanada.

Usul pembentukan organisasi perdagangan ini disambut baik oleh Ecosoc (*Economic and Sosial Council*) suatu badan khusus PBB, Ecosoc membentuk suatu komisi persiapan, dan komisi ini melakukan persidangan-persidangan di London pada tanggal 18 Oktober-26 Desember 1946,⁴¹ berhasil mengeluarkan suatu rancangan Piagam London (*The London Draft Chapter*), namun para anggota gagal mencapai kata sepakat untuk mengesahkan rancangan piagam tersebut dan selanjutnya ditambah dengan negara-negara Benelux dan Perancis membentuk komisi perancang rumusan

³⁸ Paingot rambe Manalu, *Op.Cit.*, hal. 146.

³⁹ Huala Adolf & Chanrawulan A., *Op.Cit.*, hal. 1.

⁴⁰ *Ibid.*, hal.6.

⁴¹ *Ibid.*, hal. 7. mengutip dari M.A.G. Van Meerhaeghe, *International Economic Institutions*, The Netherlands: Kluwer, 1987. hal. 101.

baru organisasi perdagangan baru.⁴² Pertemuan selanjutnya diadakan di Lake Succes, New York tanggal 20 Januari-25 Februari 1947 yang membahas masalah tertentu saja, tidak membahas hal-hal penting. Pertemuan penting diadakan di Jenewa dari bulan April sampai dengan Oktober 1947, dalam periode ini panitia persiapan melanjutkan tugasnya membuat rancangan Piagam ITO. Selain itu, juga diadakan perundingan-perundingan bilateral antara negara-negara anggota komisi.⁴³

Hasil perundingan khusus mengenai tariff timbal balik (*Reciporal tariff concession*) dari perundingan-perundingan ini dicantumkan ke dalam *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT), yang ditandatangani tanggal 30 Oktober 1947. *The General Agreement* ditetapkan tanggal 1 Januari 1948, sambil tetap berlakunya ITO.⁴⁴

Selanjutnya pembahasan mengenai ITO diadakan di Havana oleh 66 negara tanggal 21 November 1947 sampai dengan 24 Maret 1948 dan berhasil mengesahkan Piagam Havana. Namun, negara-negara peserta tidak berhasil meratifikasinya karena Amerika Serikat sebagai pelaku utama perdagangan dunia pada saat itu menyatakan tidak akan meratifikasi piagam tersebut. Itulah sebabnya ITO tidak pernah berlaku secara efektif.⁴⁵

GATT pada awalnya hanya sebagai protokol yang ditetapkan dalam rangka ITO, akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya menjelma menjadi GATT, melalui perundingan yang mengeluarkan suatu perjanjian

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*, hal. 7.

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 8.

⁴⁵ *Ibid.*, Mengutip dari M.A.G. Meerhaege, *International Economic Institutions*, The Netherlands: Kluwer, 1987, hal. 102.

internasional baru, yaitu *The Protocol of Provisional Application*. Sejak saat itulah GATT terus berlaku sampai dengan sekarang. Pertemuan Jenewa pada bulan Oktober 1947 dinyatakan sebagai putaran pertama perundingan GATT dan sampai dengan saat ini telah berlangsung delapan putaran, yang terakhir dimulai pada 1986 di Punta del Este, Uruguay yang lazim disebut dengan Putaran Uruguay. Hal yang penting di dalam perjanjian Putaran Uruguay ini adalah pernyataan bersama para anggota yang menyatakan bahwa penandatanganan mereka atas ketentuan akhir hasil-hasil perundingan multilateral Putaran Uruguay ini (*Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*) merupakan peralihan dari GATT ke WTO. Selanjutnya WTO merupakan organisasi payung yang membawahkan semua perjanjian dalam Putaran Uruguay dan akan menjadi pengganti GATT.

3.2.1. Masalah Hak atas Kekayaan Intelektual dalam GATT

Masalah HaKI dalam GATT, baru dibicarakan yaitu pada putaran kedelapan (Putaran Uruguay) yang dimulai sejak tahun 1986 di Punta del Este, Uruguay, maka pada bulan April 1994 di Marakesh, Maroko (masih dalam Putaran Uruguay), telah disepakati satu paket hasil perundingan perdagangan yaitu persetujuan tentang aspek-aspek dagang HaKI (*Agreement on trade Related Aspect of intellectual Property Rights/TRIPs*).

Persetujuan TRIPs ini memuat norma-norma dan standar perlindungan bagi karya intelektualitas manusia, merupakan perjanjian internasional di bidang HaKI sebagai dasar serta mengatur pula aturan pelaksanaan penegakan hukum di bidang HaKI secara ketat. Persetujuan ini bertujuan untuk memperjelas aturan-aturan GATT yang mengatur tentang perlindungan HaKI dan merundingkan aturan-aturan baru yang sesuai dan membahas perdagangan barang palsu dan lain-lain.

Latar belakang diadakannya persetujuan TRIPs ini adalah bahwa para peserta melihat dan mengakui adanya praktik-praktik dari negara-negara di dunia yang berbeda dalam memberikan standar perlindungan dan pelaksanaan HaKI.

Adanya perbedaan praktik ini telah menimbulkan ketegangan dalam hubungan ekonomi internasional oleh karena itu, untuk mengakhiri hal tersebut diperlukan suatu persetujuan untuk mengantisipasi ketegangan tersebut. Itulah sebabnya GATT dalam Putaran Uruguay menetapkan penerapan prinsip-prinsip dasar tentang HaKI yang relevan.

Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam tiga (3) bagian, yaitu **Bagian Pertama**, menetapkan ketentuan umum dari prinsip-prinsip dasar, berupa komitmen perlakuan nasional yang memperlakukan warga negara lain dengan perlakuan yang sama seperti kepada warga negaranya sendiri dalam hal perlindungan HaKI. Ketentuan ini juga mengandung suatu klausul perlakuan yang sama terhadap semua warga negara (*most favoured*

nations), yang diberikan secara langsung dan tanpa syarat kepada warga asing lain.⁴⁶

Bagian Kedua, mengatur bentuk HaKI. Standar mengenai keberadaan, lingkup, dan penggunaan HaKI terdiri dari Hak Cipta, dan Hak-Hak Terkait lain (*Copyright and Related Rights*), Merk Dagang (*Trademarks*), Indikasi Geografis (*Geographical Indications*), Desain produk industri (*Industrial Design*), Paten (*Patents*), Desai Lay-Out (*Topografi*) dari rangkaian Elektronik terpadu (*Lay-Out-Design (Topographis) of Integrated Circuits*), Perlindungan terhadap Informasi yang dirahasiakan (*Protection of Underclosed Information*), dan pengendalian atas Praktik-Praktik Persaingan Curang dalam Perjanjian Lisensi (*Control of Anti-Competitive Practices in Contractual Licencies*). Khusus mengenai Hak Cipta, para pihak diwajibkan untuk mematuhi isi ketentuan-ketentuan Konvensi Berne (1971), bagi perlindungan karya-karya literatur dan seni. **Bagian Ketiga**, mengatur antara lain, kewajiban-kewajiban pemerintah negara-negara anggota untuk memberikan prosedur-prosedur dan upaya-upaya penanggulangan menurut hukum nasionalnya masing-masing. Tujuannya adalah untuk menjamin HaKI negara tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, baik pemegang hak warga negara asing maupun warga negaranya sendiri.

Dalam rangka mendukung upaya di atas, TRIPs menetapkan kewajiban-kewajiban umum (*General Obligations*) penegakan HaKI, antara lain setiap negara anggota wajib menjamin prosedur penegakan HaKI yang

⁴⁶ Paingot Rambe Manalu, *Op.Cit.*, hal. 155.

ditentukan dalam TRIPs (*Section 1, Article 41*) tersedia dalam hukum nasionalnya, penegakan hukum HaKI harus wajar dan adil (*shall be fair and equitable*), keputusan atas penyelesaian sengketa harus diambil secara tertulis dengan mencantumkan alasannya (*shall preferably be in writing and reasoned*), dan lain-lain.

3.3. Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization/WTO*)

WTO terbentuk dalam persetujuan akhir perundingan-perundingan GATT dalam Putaran Uruguay. Persetujuan akhir ini menetapkan semua deklarasi dan keputusan-keputusan tingkat menteri dan persetujuan mengenai komitmen-komitmen dalam jasa-jasa keuangan. Kesemuanya dilampirkan dalam persetujuan akhir dan merupakan bagian dari persetujuan pembentukan WTO. Berlakunya WTO disepakati sejak tanggal 1 Januari 1995 atau sesegera mungkin sesudahnya.

Secara operasional dan organisatoris, WTO bertujuan untuk menciptakan suatu lembaga yang lebih tetap dan solid untuk mengakomodasi pelaksanaan administrasi dan operasi perjanjian-perjanjian perdagangan yang telah disepakati bersama. Untuk, dibentuk *Ministerial Conference* (MC), sebagai lembaga tertinggi yang bersidang sekurang-kurangnya satu kali dalam dua tahun. Sedangkan fungsi harian dilaksanakan oleh *General Council* (GC), selanjutnya dibawah GC dibentuk tiga Dewan, yaitu :

- a) *Council for Trade in Goods*, yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengawasan perjanjian-perjanjian dan peraturan-peraturan mengenai pertanian, pemeliharaan sanitasi fitosanitasi, tekstil dan pakaian jadi, hambatan-hambatan teknis perdagangan, perdagangan yang berkaitan dengan investasi (*Trade related Investment Measures/TRIMs*), anti dumping, *custom valuation*, pemeriksaan pra-pengapalan, ketentuan asal barang, prosedur lisensi impor, subsidi dan tindakan balasan dan pengamanan.
- b) *Council for Trade in Service*, meliputi pengaturan dan pengawasan terhadap pengadaan dan pelayanan jasa perpindahan orang (*movement of persons supplying services*), jasa transpor udara (*air transport services*) dan jasa transpor maritim (*maritime transport services*).
- c) *Council for trade related Aspects of intellectual property Rights*, mengawasi pengaturan dan pelaksanaan persetujuan-persetujuan mengenai HaKI, dalam rangka pelaksanaan persetujuan TRIPs.

Dengan demikian, terdapat tiga (3) dewan di dalam WTO, yaitu dewan Bidang Perdagangan Barang-Barang, Dewan Bidang Perdagangan Jasa-Jasa, Dewan Bidang perdagangan HaKI, yang bekerja di bawah Dewan Umum, (*General Council*).

3.4. Persetujuan Tentang Aspek-Aspek Dagang Dari Hak atas Kekayaan Intelektual (Trade-related Aspects of Intellectual Property rights/TRIPs)

3.4.1. Umum

Bertujuan untuk mengurangi gangguan dan halangan atas perdagangan internasional, dan mengingat perlunya untuk mempromosikan perlindungan yang efektif dan layak atas hak milik intelektual serta untuk menjamin bahwa tindakan dan prosedur untuk memberlakukan hak milik intelektual itu sendiri tidak menjadi penghalang bagi perdagangan yang sah.⁴⁷

Dengan demikian TRIPs lahir dalam rangka persetujuan tentang pembentukan organisasi Perdagangan Dunia (WTO), pada persetujuan akhir Putaran Uruguay di Marakesh, Maroko tanggal 15 April 1994. persetujuan ini dilampirkan sebagai lampiran C (Annex C) pada persetujuan akhir tersebut.⁴⁸

Apabila di kaji isi lampiran C mengenai persetujuan akhir Perundingan Marakesh, yaitu tentang Aspek-Aspek dagang yang Terkait dengan HaKI (TRIPs) tujuannya adalah :⁴⁹

⁴⁷ Yayasan Klinik HaKI, Kompilasi Undang-undang Hak Cipta, Paten, Merk dan terjemahan Konvensi-Konvensi di Bidang HaKI, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 22

⁴⁸ Understanding on Trade Related Aspects of intellectual Property rights, Including Trade in Counterfeit Goods (Persetujuan mengenai Aspek-Aspek Dagang yang terkait dengan Hak atas Kekayaan intelektual, termasuk perdagangan barang palsu). Undang-undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), dalam Yayasan Klinik HaKI, Kompilasi Undang-undang Hak Cipta, Paten, Merk dan terjemahan Konvensi-Konvensi di Bidang HaKI, *Ibid*, hal.18

⁴⁹ Paingot Rambe Manalu, *Op. Cit.*, hal 167

1. meningkatkan perlindungan terhadap HaKI dari produk-produk yang diperdagangkan;
2. menjamin prosedur pelaksanaan HaKI yang tidak menghambat kegiatan perdagangan;
3. merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap HaKI
4. mengembangkan prinsip-prinsip aturan dan mekanisme kerjasama internasional untuk menangani kasus-kasus perdagangan barang-barang hasil pemalsuan dan pembajakan.

Mengingat juga kebutuhan khusus atas para anggota negara terbelakang sehubungan dengan fleksibilitas maksimum dalam implementasi domestik peraturan dan perundang-undangan dalam rangka memungkinkan mereka untuk menghasilkan dasar teknologi yang potensial dan menyeluruh⁵⁰

"Memperhatikan pentingnya mengurangi ketegangan dengan meraih komitmen yang diperkuat untuk menyelesaikan sengketa atas isu-isu kekayaan intelektual yang berhubungan dengan perdagangan melalui prosedur multilateral".

TRIPs sebagai persetujuan internasional di bidang HaKI, pada dasarnya tidak terlepas dari persetujuan-persetujuan yang telah ada sebelumnya, seperti *Paris Convention* (1967) yang melahirkan Akta Stockholm tanggal 14 Juli 1967, *Berne Convention* (1971) tentang perlindungan terhadap karya tulis dan seni, yang tertuang dalam Akta Paris

⁵⁰ Terjemahan resmi mengenai Perjanjian Trade related Aspects of Intellectual Property Rights (Perjanjian TRIPs 1994), Yayasan Klinik HaKI, Kompilasi Undang-undang Hak Cipta, Paten, Merk dan terjemahan Konvensi-Konvensi di Bidang HaKI, *Op. Cit.*, hal.23.

dari Konvensi tersebut tanggal 24 Juli 1971. Konvensi Roma yaitu Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Pelaku Pertunjukan, Produser rekaman Musik dan Organisasi Siaran yang disepakati di Roma tanggal 26 oktober 1961. Selain itu, terdapat Traktat tentang HaKI atas *Integrated Circuits* yang dikenal dengan IPIC Treaty yang disepakati di Washington 25 Mei 1989.⁵¹

Mulai berlakunya TRIPs secara efektif secara efektif dinayatakan tanggal 1 Januari 1995, dan bagi negara-negara berkembang diberi waktu masa peralihan selama lima tahun. Dengan demikian, bagi negara-negara berkembang akan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2001.

3.4.2. Isi TRIPs

Apabila kita melihat *Annex C Agreement The World Trade Organization* mengenai persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang dariu HaKI (TRIPs), cakupannya cukup luas. Pengaturan aspek-aspek dagang HaKI juga mencakup perdagangan barang-barang hasil pelanggaran HaKI, pencegahan dan penyelesaian sengketa dan lain-lain.

Jelasnya isi HaKI dalam TRIPs dapat dikemukakan **Bagian I** Ketentuan-Ketentuan Umum dan Prinsip-Prinsip Dasar, **Bagian II** Standar- Standar Mengenai Kegunaan, Cakupan dan penggunaan Hak atas Kekayaan Intelektual, meliputi, Hak Cipta dan Hak-hak yang Terkait (*Copy Right and*

⁵¹ Fidel S. Djaman, *Beberapa Aspek dan Kebijakan Penting di Bidang Hak Milik Intelektual*, (mengutip dari Charles Himawan: 1992), Varia Peradilan, No. 106 jakarta: 1994. hal. 408.

related Right), Merk dagang (*Trademarks*), Indikasi Geografis (*Geographical Indications*), Desain Produk Industri (*Industrial Designs*), Paten (*Patent*), Desain Lay-Out (Topografi) dari Rangkaian Elektronik terpadu (*Lay-Out Designs (Topography) of Integrated Circuits*), Perlindungan terhadap Informasi yang Dirahasiakan (*Protection of Undisclosed Information*), Pengendalian atas Praktik-Praktik Persaingan Curang dalam Perjanjian Lisensi (*Control of Anti-Dumping Practices in Contractual Licencies*)

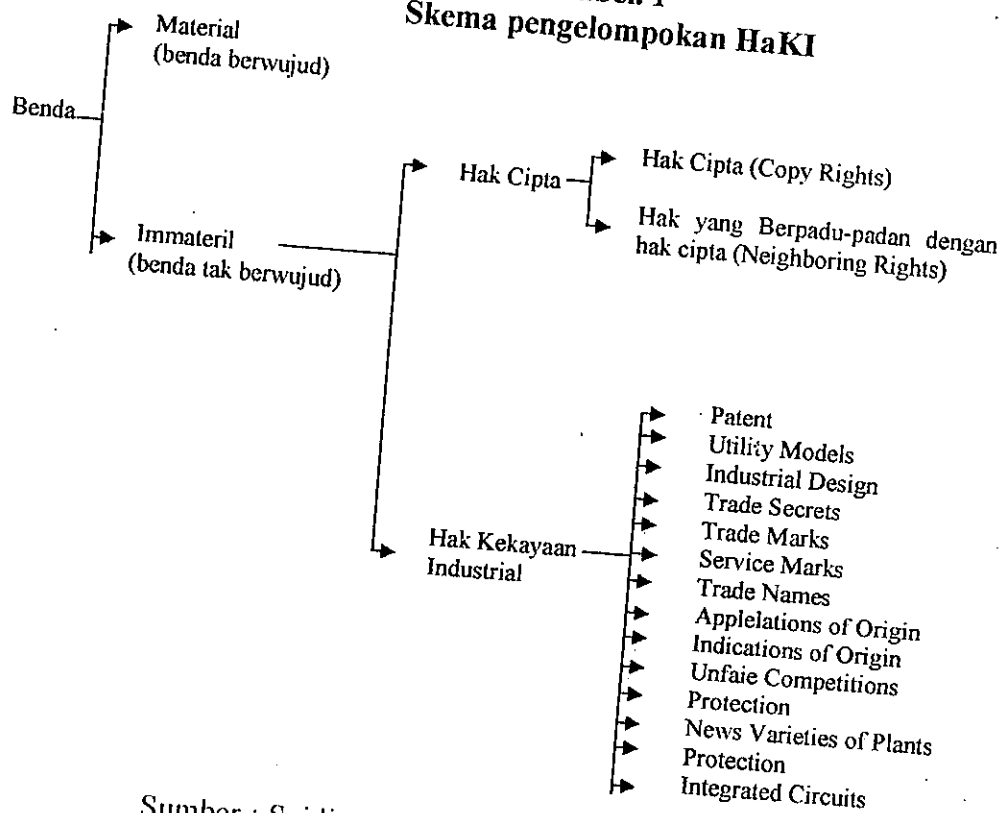
Bagian III Penegakan hak atas kekayaan intelektual meliputi, Kewajiban umum (*General Obligations*), Prosedur dan Penyelesaian Perdata serta Administratif (*Civil and Administrative Procedures and Remedies*), Tindakan Sementara (*Provisional Measures*), Persyaratan Khusus yang Berkaitan dengan Tindakan yang Sifatnya tumpang-tindih (*Special Requirements Related to Border Measures*), Prosedur Pidana (*Criminal Procedures*)

Bagian IV Akuisisi dan pemeliharaan hak atas Kekayaan intelektual dan Prosedur Inter-Parties yang berhubungan, **Bagian V** Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa (*Dispute Prevention And Settlement*), **Bagian VI** Pengaturan Peralihan/Transisional (*Transitional Arrangements*), **Bagian VII** Pengaturan Institusional/Kelembagaan: Ketentuan Penutup (*Institutional Arrangement : Final Provisions*)

3.4.3. Standar pengaturan TRIPs

Di dalam Pasal 1 Ayat (2) TRIPs ditentukan bahwa yang dimaksud dengan istilah “*Intellectual Property*” adalah semua jenis Hak atas kekayaan Intelektual yang tunduk kepada ketentuan Bab II Bagian I sampai dengan Bagian 7 (*Part II Section 1 to Section 7*), yaitu mengenai : Hak Cipta (*Copyright*), Merk Dagang (*Trademarks*), Paten (*Patent*), Desain Produk Industri (*Industrial Designs*), Indikasi Geografis (*Geographical Indications*), Desain Lay-Out (Topografi) dari Rangkaian Elektronik terpadu (*Lay-Out Designs (Topography) of Integrated Circuits*), Perlindungan terhadap Informasi yang Dirahasiakan (*Protection of Undisclosed information*)

Tabel. 1
Skema pengelompokan HaKI



Sumber : Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual : Intellectual Property Rights*, (Jakarta :Rajawali Pers, 1997), hal. 11

4. Hak atas Kekayaan Intelektual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia

4.1. Sebelum TRIPs

Perkembangan HaKI di tanah air, sistem hukum *Intellectual Property Rights* yang pertama kali diterjemahkan menjadi "*hak milik intelektual*" dan kemudian diterjemahkan menjadi "*hak atas kekayaan intelektual*" atau HaKI telah dimulai sejak masa penjajahan Belanda dengan disahkannya

Octrooi Wet Nomor 136 Tahun 1911 Staatsblad Nomor 313, yang diikuti pula oleh *Industrieel Eigendom Kolonien* 1912 yang memberikan perlindungan kepada paten, merk dan desain. Pada tahun yang sama disahkan pula *Auterswet* 1912 Staatsblad Nomor 600 Tahun 1912 yang memberikan perlindungan kepada hak-hak pengarang.

Setelah Indonesia menjadi negara merdeka, pada tahun 1953 dikeluarkan "Pengumuman Menteri Kehakiman Republik Indonesia" Nomor JG.1/2/17 tanggal 29 Oktober 1953 yang mengatur tentang Pendaftaran Sementara Paten. Baru pada tahun 1982 Indonesia mempunyai Undang-undang Hak Cipta adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982. Kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Peraturan perundang-undangan terhadap paten baru ada pada tahun 1989 yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989, yang mulai diberlakukan tanggal 1 Agustus 1991. Ketentuan tentang merk diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merk ini kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992.

4.2. Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Pasca TRIPs)

Indonesia telah menyetujui pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia yang diadakan pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh, Maroko yang kemudian pembentukannya itu disahkan oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun

1994 pada tanggal 2 November 1994 tentang Pengesahan persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing The World Trade Organization*). Salah satu bagian dari pembentukan organisasi itu adalah Persetujuan Aspek-Aspek Dagang Hak atas Kekayaan Intelektual (*Agreement On Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights, Including Trade In Counterfeit Goods/TRIPS*).

Sebagai konsekuensi persetujuan aspek di bidang HaKI ini maka Indonesia harus mengharmonisasikan sistem HaKI yang dimilikinya dengan system HaKI yang berlaku secara internasional. Mengharmonisasikan sistem HaKI bukanlah berarti sistem HaKI Indonesia harus sama sepenuhnya dengan negara lain tetapi yang disamakan atau diharmonisasikan adalah prinsip-prinsip dasar atau standar minimal sistem HaKI yang sama yang diberlakukan dengan negara-negara lain dan harus diterapkan di tanah air.

Adapun alasan Pemerintah Indonesia untuk ikut bergabung dalam perjanjian-perjanjian internasional tersebut adalah :⁵²

1. untuk menjamin terlaksananya sistem perdagangan internasional yang tertib, adil dan berkelanjutan;
2. untuk ikut menjaga terciptanya keseimbangan dalam perdagangan internasional antar negara anggota perjanjian internasional tersebut.

Selanjutnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka tiap-tiap negara-negara anggota membuat konsepsi tatanan dan perangkat hukum/perundang-undangan yang merupakan hukum positif di masing-

⁵² Muhammad Yusuf, *Masalah-Masalah Baru Di Bidang Hak Cipta dan Trade Mark. Di Australia*, Laporan Pelaksanaan Pelatihan Hak atas Kekayaan Intelektual, Phase II tingkat Advance di fakultas Hukum University of technology, Sydney New South Wales Australia. Hal 2

masing negara. Salah satu perangkat hukum dimaksud adalah ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan HaKI. Peraturan di bidang HaKI ini mengatur sekaligus memberikan perlindungan hukum terhadap karya-karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia di bidang seni (*Art*) sastra (*Literary work*), ilmu pengetahuan dan teknologi.⁵³

Indonesia sebagai negara berkembang tergolong baru dalam memberikan perhatian terhadap pengembangan dan perlindungan hukum terhadap HaKI jika dibandingkan dengan negara-negara maju, seperti Inggris, Amerika dan Australia yang sudah sejak dulu telah memberikan perhatian terhadap pengembangan dan perlindungan HaKI. Perhatian tersebut dilakukan negara Indonesia karena didasarkan pada beberapa alasan, antara lain :⁵⁴

1. Sebagai wujud rasa tanggung jawab sebagai negara yang telah ikut menyetujui dan menandatangani kesepakatan internasional di bidang HaKI
2. Sebagai upaya untuk menumbuhkan minat para ilmuwan/pakar/peneliti, seniman/seniwati, musisi, untuk mau menciptakan karya-karya yang lebih banyak dan lebih bermutu.
3. Sebagai upaya untuk menumbuhkan minat dan rasa percaya investor agar mau menanamkan modalnya, terutama di bidang usaha yang berhubungan dengan HaKI di Indonesia.

⁵³ *Ibid.*, hal 2-3

⁵⁴ *Ibid.*

4. Dalam mencapai tujuan-tujuan yang berhubungan dengan pengembangan HaKI tersebut, pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa usaha, antara lain :
 - a. Membuat peraturan perundang-undangan di bidang HaKI yang sesuai dengan tuntutan zaman dan perkembangan dunia internasional.
 - b. Menyiapkan tenaga pendidik (pengajar) untuk melakukan sosialisasi HaKI melalui jalur formal di universitas/ perguruan tinggi.
 - c. Menyiapkan tenaga penyuluh lainnya, seperti wartawan untuk memasyarakatkan HaKI melalui jalur informal.
 - d. Menyiapkan aparaturnya penegak hukum, mulai dari penyidik (POLRI, Bea dan Cukai, PPNS), Jaksa hingga hakim yang akan melaksanakan penegakan hukum HaKI secara efektif dan konsisten.

4.3. Setelah TRIPs

Ratifikasi terhadap beberapa konvensi-konvensi internasional maupun regional di bidang perdagangan dan industri telah mengarah kepada upaya-upaya untuk memberikan perlindungan secara lebih besar, dan selanjutnya diikuti dengan pembentukan dan pembaharuan beberapa perangkat hukum dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan internasional sehingga peluang makin terbukanya pasar internasional bagi produksi barang dan jasa

dalam negeri serta upaya untuk berperan aktif bagi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kerja sama internasional dapat diwujudkan.⁵⁵

Dalam kaitan ini perhatian masyarakat dunia terhadap persoalan perlindungan hukum di bidang HaKI tercermin dalam langkah-langkah negara-negara mengadakan perjanjian-perjanjian di bidang HaKI. Kebijakan ini lebih penting lagi setelah adanya kebijakan berbagai negara, khususnya negara-negara yang sedang berkembang untuk alih teknologi dari negara-negara maju.⁵⁶

Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (*General Agreement on Tariff and Trade / GATT*) yang merupakan perjanjian perdagangan multilateral pada dasarnya bertujuan menciptakan perdagangan bebas dengan perlakuan yang sama, dan membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan manusia. Dalam kerangka perjanjian multilateral tersebut, pada bulan April 1994 di Marakesh, Maroko, telah berhasil disepakati satu paket hasil perundingan perdagangan yang paling lengkap yang pernah dihasilkan *GATT*, perundingan yang dimulai sejak tahun 1986 di *Punta de Este*, Uruguay, yang dikenal dengan putaran Uruguay, antara lain memuat Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak atas Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights / TRIPs*), memuat norma-norma dan standar

⁵⁵ Indonesia *Garis-Garis Besar Haluan Negara*. TAP Majelis Permusyawaratan Rakyat/II/Majelis Permusyawaratan Rakyat/1998

⁵⁶ Cita Citrawinda Priapanca, "*Aspek-Aspek Hukum Lisensi Paten*", Disampaikan pada Seminar Nasional Sosialisasi Paten di Indonesia, Yogyakarta : 9 Desember 1995.

perlindungan bagi karya intelektualika manusia dan menempatkan perjanjian internasional di bidang HaKI sebagai dasar.⁵⁷

Sebagai langkah konkret dalam implementasi penegakan dan perlindungan HaKI, Pemerintah Republik Indonesia bersama DPR telah mngeluarkan beberapa undang-undang, yaitu sebagai berikut :

1. Hak Cipta dan Hak-Hak yang Berkaitan dengan hak Cipta

Sumber utama hukum HaKI di bidang Hak Cipta adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak Cipta yang kemudian disempurnakan pada tahun 1987 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta yang kemudian disempurnakan kembali pada tahun 1997 dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, atas pertimbangan pemberian perlindungan yang lebih maksimal dan menyesuaikan dengan apa yang tertuang dalam TRIPs pada tahun 2002 DPR mengesahkan Undang-undang tunggal yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang dengan otomatis tiga undang-undang sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi setelah berlakunya undang-undang ini.

Untuk mendukung dapat dilaksanakannya undang-undang Hak Cipta secara maksimal diperlukan adanya Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana, yaitu peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta, yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1989. Peraturan yang lain, yaitu, Peraturan Pemerintah

⁵⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Cipta*, Undang-Undang No. 12 Tahun 1997, LN. No 29 Tahun 1997. TLN. No. 3679 Tahun 1997, Penjelasan

Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan/atau Perbanyakan Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan. Peraturan ini pada dasarnya mengatur operasionallisasi ketentuan mengenai Lisensi Wajib di bidang Hak Cipta (*Compulsory Licensing*).

Dalam rangka perlindungan Hak Cipta yang bersifat timbal balik dengan negara lain, terdapat Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1988 tentang Ratifikasi persetujuan Indonesia dengan Masyarakat Eropa mengenai perlindungan rekaman suara. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1989 tentang ratifikasi antara Indonesia dengan Amerika Serikat, dan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1993 tentang ratifikasi persetujuan perlindungan Hak Cipta antara Indonesia dengan Australia. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1994 tentang ratifikasi perjanjian bilateral antara Indonesia dengan Inggris mengenai perjanjian perlindungan Hak Cipta. Diadakannya perjanjian-perjanjian bilateral tersebut di atas karena adanya pernyataan tidak aktif dalam Konvensi Bern (Perjanjian Internasional di bidang Hak Cipta) di awal tahun 1960-an. Pernyataan tersebut dikeluarkan dalam gelora semangat pembebasan Irian Jaya, yang penuh dengan nuansa politik.⁵⁸

⁵⁸Paingot Rambe Manalu, *Hukum Dagang Internasional; Pengaruh Globalisasi Ekonomi terhadap Hukum Nasional, Khususnya Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Op.Cit. hal. 241, Lihat Bambang Kesowo, Sambutan dalam Seminar HaKI, diselenggarakan Perhimpunan Masyarakat HaKI Indonesia, di Hotel Borobudur Inter Continental, Jakarta: 13-14 Oktober 1997.

2. Hak Paten

Sumber hukum atau pengaturan paten di Indonesia sudah ada sejak penjajahan belanda, yaitu dengan berlakunya *Octrooiwet 1910 Stb. Nomor 33*, yang mulai berlaku sejak tahun 1912. setelah Indonesia merdeka undang-undang *Octrooi* ini dinyatakan tidak berlaku karena berlakunya tidak sesuai dengan suasana negara yang berdaulat.

Hal yang sangat bertentangan dengan kedaulatan Indonesia adalah adanya ketentuan di dalam undang-undang Oktroi tersebut bahwa permohonan oktroi di wilayah Indonesia diajukan melalui Kantor Pembantu di Indonesia yang selanjutnya diteruskan ke *Octrooiraad* di Negeri Belanda.⁵⁹

Pernyataan tidak berlakunya undang-undang oktro ini tidak segera diikuti dengan pembentukan undang-undang Paten baru. Pengaturan selanjutnya dan guna menampung permintaan Paten di dalam negeri dikeluarkan Pengumuman Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor J.S. 5/41/4 B.N. 55 tanggal 5 Agustus 1953, yaitu memberikan suatu upaya yang bersifat sementara. Selanjutnya untuk menampung permintaan Paten luar negeri, dikeluarkan Pengumuman Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor J.G. 1/2/17 B.N. 53-91 tanggal 29 Oktober 1953.

Kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989, tentang Paten diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997.

⁵⁹ Muhammad Djumhana & Djubaidilah R. *Hak Milik Intelektual*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993. Hal. 80

Pada Tahun 2001 DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Dalam pada itu telah pula dikeluarkan tiga peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1991 tentang impor bahan baku atau produk tertentu yang dilindungi Paten bagi produksi obat di dalam negeri. Peraturan pemerintah Nomor 33 Tahun 1991 tentang Pendaftaran Khusus Konsultan Paten, dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten.

3. Merk dan Indikasi Geografis

Pengelolaan merk dalam sistem hukum Indonesia sudah berlangsung lama dibanding dengan jenis-jenis HaKI lainnya. Pengelolaan itu dimulai sejak tahun 1912, dengan berlakunya *Auteurswet* 1912, *Staatsblad* Nomor 600 Tahun 1912 dan kemudian dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 (Lembaran negara Nomor 290 Tahun 1961) tentang Merk Perusahaan dan Merk Perniagaan, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 (Lembaran Negara Nomor 81 tahun 1992) sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merk.

Selain undang-undang ini, terdapat pula dua Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merk dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Kelas Barang dan Jasa Bagi Pendaftaran Merk..

4. Rahasia Dagang

Sumber utama hukum HaKI di bidang perlindungan terhadap Rahasia Dagang adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Dasar pertimbangannya ditetapkannya undang-undang ini, bahwa Indonesia telah meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup *Agreement on Trade related Aspects of Intellectual Property rights* (Persetujuan TRIPs) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3564) sehingga perlu diatur mengenai Rahasia Dagang.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 untuk membedakan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat. Dengan memperhatikan definisi rahasia dagang dalam Pasal 1 angka (1) yang menyatakan :

"Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang"

Dengan demikian definisi ini dapat mencakup kegiatan perlindungan terhadap tidak hanya rahasia dagang saja, tetapi juga mencakup (industrial) Know-How dan undang-undang ini hanya mengatur hanya untuk tindakan yang berkaitan dengan persaingan curang (*unfair*

competition) dan bukan *unfair business practices* sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

5. Desain industri

Sumber utama hukum HaKI di bidang perlindungan terhadap Desain Industri adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Ditetapkannya undang-undang ini, mengingat bahwa Indonesia telah mempunyai Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3274).

Dasar pertimbangannya bahwa Indonesia telah Meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup *Agreement on Trade related Aspects of Intellectual Property rights* (Persetujuan TRIPs) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3564) sehingga perlu diatur mengenai Desain Industri.

6. Desain Tata Letak Sirkuit

Sumber utama hukum HaKI di bidang perlindungan terhadap Desain Tata Letak Sirkuit adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. Dasar pertimbangannya ditetapkannya undang-undang ini, bahwa Indonesia telah Meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

yang mencakup *Agreement on Trade related Aspects of Intellectual Property rights* (Persetujuan TRIPs) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564) sehingga perlu diatur mengenai Desain Tata Letak Sirkuit.

7. Perlindungan Varietas Tanaman

Perlindungan varietas tanaman yang selanjutnya disingkat PVT, adalah perlindungan khusus yang diberikan negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Perlindungannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

4.4. Beberapa Konvensi Internasional yang telah diratifikasi

Beberapa konvensi internasional yang telah mendapat pengesahan dari Pemerintah Republik Indonesia yang secara otomatis mengikat dengan segala ketentuan didalamnya. Konvensi tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Paris Convention for the Protection of Industrial property and Conention on Establishing the World Intellectual Property Organization*, disahkan melalui Kepres Nomor 15 Tahun 1997.

2. *Patent Cooperation Treaty (PCT and regulation under the PCT)* disahkan melalui Kepres Nomor 16 Tahun 1997.
3. *Trademark Law Treaty*, disahkan melalui Kepres Nomor 17 Tahun 1997.
4. *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, disahkan melalui Kepres Nomor 18 Tahun 1997
5. *World Intellectual Property Organization/WIPO Copyright Treaty*, disahkan melalui Kepres Nomor 19 Tahun 1997.

Apabila kita perhatikan apa yang termasuk dalam lingkup pengaturan HaKI di dalam TRIPs lebih luas pengaturannya dibanding pengaturan di dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia. Hal demikian bukan berarti pengingkaran terhadap ketentuan TRIPs, karena di dalam TRIPs sendiri pada pernyataan bersama di dalam *Konsiderans (b)*, dinyatakan :

"Members, recognizing to this end, the need to new rules and disciplines concerning : the provision of adequate standards and principles concerning the availability, scope and use of trade-related intellectual property rights"

Dengan demikian, negara-negara anggota bebas membuat standar yang memadai tentang pengaturan HaKI di negara masing-masing, sepanjang tidak menjadi hambatan dalam perdagangan multilateral.

5. Teori-Teori yang Berkaitan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual

Pengertian "pemilikan" (*ownership*) merupakan suatu lembaga social dan hukum yang selalu terkait dengan 2 (dua) hal, yaitu pemilik (*Owner*) dan

suatu benda yang dimiliki (*something owned*).⁶⁰ Apabila konsep milik dan kekayaan dikaitkan dengan konsep tentang hak (*right*) maka di dalam hukum dikenal hak yang menyangkut pemilikan dan hak yang menyangkut perbendaan. Pada dasarnya hak perbendaan meliputi juga hak pemilikan, karena pemilikan tidak bisa lain kecuali selalu menunjuk ke suatu benda tertentu.⁶¹ Dalam hal ini ada beberapa teori yang menjelaskan tentang benda yang dimiliki atau disebut juga kekayaan (*property*).

5.1. Teori Hak Alami

Sebagai seorang filsuf yang beraliran liberalis, **John Locke** (1632-1704) dalam *Two Treatises on Government* berpendapat bahwa manusia secara alami adalah agen moral. Dengan teorinya tentang Hak Alami (*Natural Rights Theory*) ia memahami manusia sebagai substansi mental dan hak-hak seseorang bahkan tubuh orang itu sendiri merupakan kekayaan (*property*)nya. Di luar manusia ada sesuatu aturan hukum yang bebas yang harus diikutinya untuk mewujudkan diri sebagai agen moral. Kebebasan dan kesamaan manusia diatur oleh hukum alam yang mewajibkan manusia untuk menghormati kebebasan untuk menentukan diri sendiri dalam manusia yang lain. Hukum alam menurut **Locke** adalah hukum kebebasan.⁶²

⁶⁰ Oentoeng Soeropati, *Hukum kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi*, Fakultas Hukum Universitas Satya Wacana, Salatiga : 1999, hal. 9.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.* hal.12.

Menurut teori ini, penemuan atau penciptaan merupakan hasil usaha mental dari seseorang. Akibatnya terhadap kekayaan ini secara alami orang yang menemukan atau menciptakannya mempunyai hak untuk memilikinya. Penemu atau pencipta bebas untuk menggunakan atau tidak menggunakan haknya dan tidak mempunyai kewajiban untuk mengungkapkan temuannya atau ciptaannya kepada siapapun. Akan tetapi negar memberikan perlindungan hukum berupa hak khusus kepada penemu atau pencipta atas temuan atau ciptaannya selama jangka waktu tertentu agar orang lain mengetahuinya. Setelah jangka waktu perlindungan hukum itu lewat diharapkan penemu atau pencipta atau orang lain dapat menemukan atau menciptakan sesuatu yang baru sebagai kelanjutan temuan atau ciptaan sebelumnya.⁶³

5.2. Teori Karya

Seperti telah diuraikan dalam Teori Hak Alami, pengertian kekayaan seseorang mencakup segala karya dari tubuh dan otaknya sendiri. Oleh sebab itu seseorang tidak berhak untuk memiliki karya dari tubuh dan otak orang lain yang bukan merupakan kekayaan-nya. Jika hal demikian diterapkan pada kekayaan yang bersifat cendekiawi (baca : Kekayaan intelektual), sepatutnyalah bahwa seorang penemu adalah yang paling berhak atas penemuannya seperti halnya pencipta dan ciptaannya. Kemudian dari itu jika suatu karya tubuh dan otak seseorang diterapkan pada suatu kekayaan tertentu

⁶³ Oentoeng Soeropati., Ibid., mengutip dari Arthur R. Miller & Micahel H. Davis, *Intellectual Property : Patents, Trademarks and Copyright*, West Publishing Company, St. Paul, Minnesota, 1983. hal. 14.

yang dimiliki orang lain, maka berakibat timbulnya suatu hak kebendaan bagi orang tersebut, terhadap karya milik orang lain, dimana karya tubuh dan otaknya diterapkan. Dengan kata lain jika suatu kekayaan cendikiawi seseorang diterapkan pada kekayaan orang lain, maka orang yang berhak atas kekayaan cendikiawi tersebut juga mempunyai hak kebendaan atas produk yang dihasilkan orang lain yang menggunakan temuan atau ciptaannya.⁶⁴

Dengan demikian teori karya ini memperluas lingkup kekayaan cendikiawi, dari temuannya atau ciptaannya sebagai hasil karya sendiri ke produk hasil karya orang lain yang menggunakan temuan atau ciptaannya.⁶⁵

5.3. Teori Tawar Menawar

Teori Tawar Menawar (*Bargain Theory*) menganggap bahwa penemu atau pencipta mendapat imbalan berupa hak khusus yang dilindungi oleh hukum negara untuk jangka waktu tertentu karena hasil tawar menawar. Di satu pihak, negara memberikan hak khusus kepada penemu atau pencipta dengan maksud agar temuan atau ciptaan itu dilindungi terhadap pelanggaran oleh orang lain yang tidak berhak sehingga menguntungkan kepentingan penemu atau pencipta. Akan tetapi negara yang memberikan hak khusus tersebut setiap saat dengan alasan tertentu, misalnya demi pertahanan dan keamanan, dapat saja mengesampingkan hak tersebut dan mewajibkan dimanfaatkannya temuan atau ciptaan yang bersangkutan oleh negara atau mengharuskan

⁶⁴ *Ibid.*, hal. 13

⁶⁵ Oentoeng Soeropati., *Ibid.*, hal. 12, mengutip dari John Holyhoak & Paul Torremans, *Intellectual Property Law*, Butterworth, London: 1995. hal. 113-119

diberikannya lisensi kepada orang lain. Di pihak lain, penemu atau pencipta yang diberi hak khusus oleh negara demi dapat melaksanakan temuan atau ciptaan olehnya sendiri.. di samping itu, penemu atau pencipta juga dapat mengizinkan dimanfaatkannya temua atau ciptaannya oleh orang lain untuk keuntungannya secara ekonomis, misalnya dengan pembayaran *royalty*. Akan tetapi jika penemu atau pencipta ternyata tidak dilindungi oleh negara terhadap pelanggaran hak khususnya, maka ia dapat berhenti melakukan penemuan atau penciptaan baru.⁶⁶

5.4. Teori Dominasi.

Dalam pembangunan ekonomi juga dikenal Teori Modernisasi (*Modernnization Theory*) yang berpendapat bahwa pembangunan ekonomi hanya bisa berhasil jika dilakukan proses modernisasi. Modernisasi dalam hal ini umumnya diartikan dengan berkiblat ke Barat, yaitu dengan mengikuti contohnya negara-negara maju.⁶⁷ Modernisasi mengandung asumsi ada supremasi Barat atas Timur dan bahwa tanpa berkiblat ke Barat pembangunan ekonomi akan gagal.⁶⁸ Sejalan dengan itu, Teori Dominasi beranggapan bahwa pengalihan teknologi dilakukan untuk melestarikan dominasi dalam perdagangan internasional.⁶⁹

⁶⁶ Oentoeng Soeropati., *Ibid.*, hal. 13, mengutip dari Arthur R. Miller & Micahel H. Davis, *Intellectual Property : Patents, Trademarks and Copyright*, West Publishing Company, St. Paul, Minnesota, 1983. hal. 14

⁶⁷ *Ibid.*, hal. 14

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

Dalam kontrak alih teknologi biasanya terjadi sub-ordinasi terhadap penerima teknologi oleh pemasok teknologi, dengan dicantumkannya klausula-klausula yang lebih melindungi pemasok teknologi daripada penerima teknologi, agar penerima teknologi tidak menyempurnakan atau mengembangkan sendiri teknologi yang diberikan tanpa sepengetahuan pemasok teknologi, biasanya dibuat klausula yang mewajibkan penerima teknologi memberikan informasi tentang penyempurnaan atau pengembangan teknologi dalam penggunaan teknologi yang bersangkutan.

5.5. Teori Public Benefit.

Teori ini disebut juga teori *Economic Growth Stimulus* atau Teori Sosial *rate of return* atau *More things will happen Theory*. Dasar dari teori ini adalah bahwa HaKI merupakan suatu alat bagi pengembangan ekonomi. Pengembangan ekonomi merupakan keseluruhan dari tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan HaKI.⁷⁰

⁷⁰ Nico Kansil, kejahatan Hak Milik Intelektual, UNDIP, (Semarang :makalah Seminar Nasional Kejahatan Hak Milik Intelektual, 27 April 1993), hal 4.

B. HAK CIPTA Dan PENGATURANNYA

1. Konvensi Internasional Tentang Hak Cipta

1.1. Konvensi Bern 1886 tentang Perlindungan Karya Sastra dan Seni

Konvensi Bern 1886, pada garis besarnya memuat tiga prinsip dasar, berupa sekumpulan ketentuan yang mengatur standar minimum perlindungan hukum (*minimum standard of protection*) yang diberikan kepada pencipta dan juga memuat sekumpulan ketentuan yang berlaku khusus bagi negara-negara berkembang.⁷¹ Keikutsertaan suatu negara sebagai anggota Konvensi Bern, menimbulkan kewajiban negara peserta untuk menerapkan dalam perundang-undangan nasionalnya di bidang hak cipta, tiga prinsip dasar yang dianut Konvensi Bern, yaitu :⁷²

1. *Prinsip National Treatment* :

Ciptaan yang berasal dari salah satu negara peserta perjanjian (yaitu ciptaan seorang warga negara, negara peserta perjanjian, atau suatu ciptaan yang pertama kali diterbitkan disalah satu negara peserta perjanjian) harus mendapat perlindungan hukum hak cipta yang sama seperti diperoleh ciptaan seorang pencipta warga negara sendiri.

2. *Prinsip Automatic Protection*

⁷¹ Eddy damian, *Op. Cit.*, hal.61.

⁷² *Ibid.*, hal. 61

Pemberian perlindungan hukum harus diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat apapun (*must not be conditional upon compliance with any formality*)

3. *Prinsip Independence of protection*

Suatu perlindungan hukum diberikan tanpa harus bergantung kepada pengaturan perlindungan hukum negara asal pencipta.

Mengenai pengaturan standar-standar minimum perlindungan hukum ciptaan-ciptaan, hak-hak pencipta dan jangka waktu perlindungan yang diberikan, pengaturannya adalah sebagai berikut :⁷³

- (1) Ciptaan yang dilindungi, adalah semua ciptaan di bidang sastra, ilmu pengetahuan dan seni, dalam bentuk apapun perwujudannya.
- (2) Kecuali jika ditentukan dengan cara reservasi (*reservation*), pembatasan (*limitation*) atau pengecualian (*exception*), yang tergolong sebagai hak-hak eksklusif :
 - a. hak untuk menterjemahkan,
 - b. hak mempertunjukkan di muka umum suatu ciptaan sastra, drama musik, dan ciptaan musik,
 - c. hak mendeklamasi (*to recite*) di muka umum semua ciptaan sastra,
 - d. hak penyiaran (*broadcast*)
 - e. hak membuat reproduksi dengan cara dan bentuk perwujudan apapun,

⁷³ Ibid., hal. 61-62.

- f. hak menggunakan ciptaannya sebagai bahan untuk ciptaan audio visual,
- g. hak membuat aransemen (*arrangements*) dan adaptasi (*adaptations*) dari suatu ciptaan.

Selain dari pada hak-hak eksklusif ini di dalam Konvensi Bern juga mengatur apa yang dinamakan dengan Hak Moral (*droit moral*). Hak dimaksud ini adalah hak pencipta untuk mengklaim sebagai pencipta suatu ciptaan dan hak pencipta untuk mengajukan keberatan terhadap setiap perbuatan yang bermaksud mengubah, mengurangi, atau menambah keaslian ciptaannya (*any mutilation or deformation or other modification or other derogatory action*), yang dapat merugikan kehormatan dan reputasi pencipta (*author's honor or reputations*).⁷⁴

Hak-hak Moral yang diberikan kepada seorang pencipta, menurut seorang penulis mempunyai kedudukan yang sejajar dengan hak-hak ekonomi (*economic right*)⁷⁵ yang dimiliki pencipta atas ciptaannya.

Pengertian Hak Moral yang termuat dalam diagram diatas, ada sedikit perbedaan dalam soal arti hak moral dengan yang dikemukakan oleh seorang penulis lain dari Perancis : Desbois dalam bukunya *Le Droit d'auteur*

⁷⁴ *Ibid.*, hal. 62

⁷⁵ Hak-hak ekonomi sering juga disinonimkan dengan hak-hak eksploitasi, karena hak cipta memberikan kepada pencipta atau pemegangnya dalam waktu tertentu, hak mengeksploitasi manfaat ekonomi dari ciptaan seorang pencipta. Kegiatan eksploitasi dapat misalnya berupa suatu kegiatan seorang pelaku (*performer*) yang merupakan seorang penari yang mempertunjukkan suatu karya (ciptaan) di atas panggung pertunjukkan umum. Contoh lain adalah kegiatan pelaku (*performer*) yang merupakan seorang penyanyi yang menyanyikan suatu karya (ciptaan) musik yang direkam dalam compact disk dan pita rekaman oleh suatu badan usaha produser rekaman misalnya Remaco untuk dijual secara umum kepada konsumen. *Ibid.*, hal. 62.

(1966)⁷⁶ berpendapat bahwa sebagai suatu doktrin, Hak Moral seorang pencipta mengandung empat (4) makna, yaitu :

- (1) *Droit de publication* : hak untuk melakukan atau tidak melakukan pengumuman ciptaannya;
- (2) *Droit de repentier*, hak untuk melakukan perubahan-perubahan yang dianggap perlu atas ciptaannya, dan hak untuk menarik dari peredaran, ciptaan yang telah diumumkan.
- (3) *Droit au respect*, hak untuk tidak menyetujui dilakukannya perubahan atas ciptaannya oleh pihak lain.
- (4) *Droit a la paternite*, hak untuk mencantumkan nama pencipta: hak untuk menyetujui perubahan atas nama pencipta yang akan dicantumkan; dan hak untuk mengumumkan sebagai pencipta setiap waktu yang diinginkan.

Standar minimum yang berlaku mengenai jangka waktu berlakunya perlindungan hukum Hak Cipta, Konvensi Bern menentukan sebagai ketentuan umum: selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Terhadap ciptaan yang tidak diketahui (*anonymous*) atau penciptanya memakai nama samaran (*pseudonymous*) atau pencipta merahasiakan jati dirinya, jangka waktu perlindungan hukum adalah 50 tahun, semenjak pengumumannya secara sah dilakukan, kecuali jika pencipta yang memakai nama samaran atau merahasiakan namanya diketahui identitas pribadinya, jangka waktu

⁷⁶ *Ibid.*, hal. 63. baca juga A. Komen, D.W.F. verkade. Hal.76-78

perlindungan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum, yaitu selama hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah meninggal dunia.

Selanjutnya Konvensi Bern mengatur jangka waktu perlindungan hukum ciptaan-ciptaan audiovisual (*cinematographic*), jangka waktu minimum perlindungan hukum adalah 50 tahun sejak ciptaan direkam dan dapat diperoleh oleh konsumen. Atau jika tidak di rekam dan tidak dapat diperoleh konsumen perlindungan hukumnya adalah minimum 50 tahun semenjak diciptakan. Untuk ciptaan-ciptaan yang tergolong seni terapan dan fotografi, jangka waktu minimum perlindungan diberikan adalah 25 tahun sejak diciptakan.

Konvensi ini telah mengalami beberapa kali revisi, yaitu Stockholm 1967 bagi negara-negara yang tergolong negara-negara berkembang Konvensi Bern memberikan kemudahan tertentu⁷⁷, dan terakhir di Paris pada tahun 1971 yang antara lain mengubah *Protokol* Konvensi Bern dengan revisi di Stockholm 1967, menjadi *Appendix*, (tanpa perubahan).

Menurut *Appendix* ini, negara-negara berkembang pada waktu melakukan ratifikasi atau akses dapat memperoleh kemudahan-kemudahan

⁷⁷ *Ibid.*, hal.65, Catt. Kaki No.40. Yang dipakai sebagai kriteria oleh Konvensi Bern untuk menggolongkan suatu negara sebagai negara berkembang, menurut pasal 1 Appendix Konvensi Bern adalah praktek Majelis Umum PBB dalam menggolongkan suatu negara sebagai negara berkembang karena keadaan perekonomiannya dan kebutuhan-kebutuhan cultural dan sosialnya, dikutip Sudargo gautama dan Rizawanto Winata, dalam bukunya *Pembaharuan Undang-undang Hak Cipta (1997)*, Citra Aditya Bakti, (Bandung:1997), hal. 79 mengutip Kriteria *developing countries* Prakash Shinta, *New Nations and the Law of Nations* (1967) :

- penghasilan perkapita di bawah US \$ 300 pertahun;
- pertumbuhan penduduk besar sekali : 1,9% s.d. 3,6% pertahun;
- impor lebih besar dari ekspor;
- adanya ketegangan-ketegangan social dan adat istiadat yang kuat;
- ketergantungan kepada ekonomi internasional;
- perlu adanya penanaman modal asing; dan sebagainya.

tertentu yang merupakan *Faculties*⁷⁸ *Open Developing Countries*. Kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh *Appendix* kepada negara-negara berkembang berupa :

- (1) hak melakukan penerjemahan (*Right of Translation*)
- (2) hak melakukan reproduksi (*Right of Reproduction*)

Setelah perang dunia ke-II, muncul suatu gagasan yang ingin menyatukan suatu sistem hukum hak cipta yang universal. Gagasan ini timbul dari peserta Konvensi Bern, dan Amerika Serikat dilain pihak. Dengan sponsor Perserikatan Bangsa Bangsa utamanya UNESCO, gagasan itu dicoba dikonkritkan dengan diadakannya suatu konvensi di Jenewa pada September 1952. di kota Jenewa inilah maka ditandatangani sebuah konvensi baru yaitu Konvensi Universal mengenai Hak Cipta atau dikenal dengan *Universal Copyright Convention (UUC)*.⁷⁹

1.2.Konvensi Hak Cipta Universal 1955

Universal Copy Right telah tercipta di jenewa pada tanggal 6 September 1952. konvensi ini mulai berlaku untuk negara-negara penanda tangan pada tanggal 16 september 1955, dilampirkan tiga protocol, yaitu :⁸⁰

⁷⁸ Istilah *faculties* oleh *The Concise Oxford dictionary*, Oxford University Press, 1964. hal 433 diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan sesuatu yang diberikan oleh hukum atau oleh atasan. *Ibid.*, hal. 66.

⁷⁹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaidillah, 1993, *Op.Cit.*, hal 12

⁸⁰ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, Pembaruan Undang-Undang Hak Cipta (1997), *Op.Cit.*, hal. 79

- (1) Mengenai perlindungan karya dari orang-orang yang tanpa kewarganegaraan dan orang-orang pelarian.
- (2) Tentang berlakunya konvensi ini atas karya-karya dari pada organisasi-organisasi internasional tertentu.
- (3) Berkenaan dengan cara-cara untuk memungkinkan turut serta secara bersyarat.

Konvensi ini menganut merupakan suatu hasil kerja PBB melalui sponsor UNESCO untuk menjembatani aliran-aliran yang terdapat di benua Eropa dan Amerika berkenaan dengan dengan hak cipta⁸¹

Secara ringkas, garis-garis besar ketentuan-ketentuan paling signifikan yang ditetapkan dalam Konvensi Hak Cipta Universal antara lain, adalah hal-hal berikut :⁸²

- (1) *Adequate and effective Protection*. Menurut Pasal 1 Konvensi, setiap negara peserta perjanjian berkewajiban memberikan perlindungan hukum yang memadai dan efektif terhadap hak-hak pencipta dan pemegang hak cipta.
- (2) *Duration of Protection*. Suatu kompromi lain yang amat penting dalam rangka mengakomodasi dua aliran falsafah yang saling berhadapan satu sama lain, adalah ditetapkannya dalam Pasal IV konvensi, suatu jangka

⁸¹ Baca Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Ibid.*, hal 79. Negara-negara dengan sistem *Civil Law* (Eropa) menganut falsafah hak cipta : dianggap sebagai hak alamiah yang dimiliki oleh pencipta, sedangkan negara dengan sistem *Common Law* (Amerika) menganut falsafah bahwa hak cipta dianggap sebagai hak yang diberikan oleh negara kepada pencipta melalui keharusan dilaksanakannya pendaftaran suatu ciptaan oleh pencipta.

⁸² Eddy Damian, *Op.Cit.*, hal 68. lihat juga dalam Arpad Bogisch (II), *Universal Copyright Convention, An Analysis and Commentary*, R.R. Bowker, 1958 dan Paul Goldstein (II), *Copyright, Patent, Trademark and related State Documents, Cases and Materials on the Law of Intellectual Property, Fourth Editions, The Foundation Press, 1997, Op.Cit.*, hal. 1002-1003

minimum sebagai ketentuan untuk perlindungan hukum; selama hidup pencipta ditambah paling sedikit 25 tahun setelah kematian pencipta.

Universal Copyright Convention sebagai suatu perjanjian multilateral di bidang hak cipta telah menarik cukup banyak negara-negara menjadi peserta. Sampai kini, telah 55 negara meratifikasinya, walaupun masih lebih sedikit jika dibandingkan dengan negara-negara peserta konvensi Bern. *Universal Copyright Convention* menjadi suatu konvensi yang mempunyai daya tarik tersendiri bagi negara-negara berkembang, karena adanya beberapa kemudahan, diantaranya tentang pengaturan standar minimum dari hak-hak eksklusif yang hanya memakai kriteria sederhana *adequate and effective* dan syarat-syarat jangka waktu minimum perlindungan (*minimum duration of protection*) yang pengaturannya sangat longgar.⁸³

Hal demikian menimbulkan kekhawatiran negara-negara anggota Konvensi Bern pada waktu awal diadakannya *Universal Copyright Convention*, akan terjadinya pembelotan besar-besaran anggota-anggotanya. Selain itu timbul kekhawatiran dengan adanya aturan-aturan yang demikian longgar merupakan suatu *set back* atau *retogressive step* bagi perlindungan hak cipta. Kekhawatiran-kekhawatiran demikian tidak terbukti, sebaliknya telah terjadi kerjasama yang harmonis antara lembaga-lembaga yang mengadministrasikan kedua konvensi. Baik lembaga sekretariat maupun eksekuti kedua belah pihak mengadakan pertemuan-pertemuan berkala yang

⁸³ *Ibid.* hal 71-72

tujuan akhirnya dimaksudkan untuk mengadakan merger yang akan menangani bersama pelaksanaan kedua konvensi tersebut.⁸⁴

Realisasi kerjasama kedua konvensi, diperkenalkannya negara-negara anggota *Universal Copyright Convention* menjadi peserta konvensi Roma 1961 tentang Perlindungan Hukum para Artis Pelaku (*Performers*), Produsen Rekaman Suara (*Producers of Phonogram*), dan Lembaga Penyiaran (*Broadcasting Organization*).

2. Beberapa Konvensi Lain Yang Berkaitan Dengan Hak Cipta

Beberapa konvensi lain yang akan dibahas adalah konvensi-konvensi yang berkaitan erat dengan hak cipta dan telah banyak diratifikasi oleh negara-negara yang menjadi peserta *Bern Convention* dan *Universal Copyright Convention*, adalah :

- (1) *International Convention Protection for Performers, Producers of Phonograms and broadcasting Organizations (Rome Convention/Neighbouring Convention)* 1961.
- (2) *Convention for The Protection of Phonograms Againsts Unauthorised Duplication of their Phonograms (Geneva Convention)* 1971.

⁸⁴ *Ibid.*, hal 72

**2.1. International Convention Protection for Performers, Producers of
Phonograms and Broadcasting Organizations (Rome
Convention/Neighboring Convention) 1961.**

Prakarsa diadakannya konvensi ini adalah Bern Union⁸⁵, dalam rangka usahanya untuk lebih memajukan perlindungan hak cipta di seluruh dunia, khususnya perlindungan internasional terhadap mereka yang mempunyai hak-hak yang dikelompokkan dengan nama Hak-hak yang Berkaitan (*Neighboring Rights/Related Rights*)⁸⁶

Pembahasan pertama kali pada tingkat internasional tentang hak-hak yang berkaitan terjadi pada tahun 1928. pada konferensi internasional yang membicarakan revisi Konvensi Bern pada tahun 1928 di Roma, suatu rekomendasi dikemukakan oleh negara-negara peserta Bern Union yang

⁸⁵ Ibid., lihat catt. kaki no.46, hal. 72. Dalam teks asli Konvensi Bern (1886) dikemukakan untuk pertama kali istilah UNION yang diartikan sebagai suatu badan yang didirikan dengan maksud untuk menjamin adanya hubungan tetap (*permanent link*) antara sesama anggota. Selain itu juga adanya badan ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak pencipta di bidang sastra dan seni. *Bern Union* anggota-anggotanya terdiri dari wakil-wakil Pemerintah negara-negara anggota yang tugas-tugas hariannya dilaksanakan oleh *Bureau of Intellectual Property*.

⁸⁶ Ibid., lihat catt. kaki no.47, hal. 72-73. Tentang hak-hak yang berkaitan (*Neighboring Rights/Related Rights*) suatu penjelasan yang komprehensif, tetapi ringkas dikemukakan dalam suatu kuliah oleh Henry Olsson (*Legal Council, Ministry of Justice of Norwegia*), *The Role of Copyright and Neighboring Right in Economic and Culture Development*, diperbanyak WIPO : WIPO/ACAD/E/93/5 Sept. 1993, yang penjelasannya adalah sebagai berikut:

Hak-hak ini dinamakan hak-hak-hak yang berkaitan karena hak-hak ini sangat berkaitan dengan hak-hak atas ciptaan seorang pencipta di bidang seni dan sastra, dan malahan di beberapa undang-undang hak cipta nasional merupakan bagian yang terintegrasi dalam undang-undang hak ciptanya. Yang dimaksud dengan hak-hak yang berkaitan adalah misalnya : hak-hak para pelaku artis (*performing artist*) yang dapat terdiri dari para penyanyi, aktor, musisi dan sebagainya yang menyampaikan kepada publik suatu pertunjukan hidup (*live performance*), fiksasi dari pertunjukan demikian dan perbanyakan (*reproduksi*) dari pertunjukan-pertunjukan. Juga para produser rekaman suara (*producer of sound recording/phonograms*) menikmati hak-hak tertentu, terutama hak mengontrol reproduksi rekaman suara yang dibuat oleh pemegang hak cipta. Selanjutnya, lembaga-lembaga penyiaran yang menghasilkan karya-karya siaran, menikmati karya-karya suaranya, seperti hak mengontrol siaran ulang, fiksasi dan reproduksi karya suaranya yang dilakukan pemegang hak cipta.

berkeinginan untuk mengatur perlindungan hak-hak para pelaku artis (*performing artist*).⁸⁷

Setelah mengalami suatu proses panjang melalui pelbagai perundingan, akhirnya pada tahun 1961 dengan inisiatif dari pemerintah Itali bekerja sama dengan tiga sekretaris antar pemerintah (*BIRPI, ILO, dan UNESCO*) berhasil ditandatangani suatu perjanjian internasional pada tahun 1961 di Roma :

International Convention Protection for Performers, Producers of Phonograms and broadcasting Organizations

Maksud dan tujuan utama diadakannya Konvensi adalah menetapkan pengaturan secara internasional perlindungan hukum terhadap hak-hak yang berkaitan (*Neighboring Rights/Related Rights*), yaitu :

1. Artis-artis pelaku (*performing artist*), yang dapat terdiri misalnya penyanyi, aktor, musisi, penari, dan lain-lain pelaku yang mempertunjukkan karya-karya cipta sastra dan seni.
2. Produser-produser rekaman (*producer of phonogram*).
3. Lembaga-lembaga Penyiaran (*broadcasting organization*).

⁸⁷ Ibid., hal. 74

2.2. Convention for The Protection of Phonograms Against Unauthorised Duplication of their Phonograms (Geneva Convention) 1971.

Sembilan tahun pertama setelah berlakunya Konvensi Roma 1961, para anggotanya berpendapat bahwa perlindungan yang diberikan oleh konvensi terhadap produsen rekaman belum memberikan hasil yang memadai. Pembajakan masih saja berlangsung dan usaha-usaha untuk memberantasnya sangat tidak efisien, yang terutama disebabkan masih sedikitnya negara-negara yang menjadi peserta konvensi. Samapai tahun 1971 hanya sebelas (11) anggota yang meratifikasi atau mengaksesinya, diantaranya dua negara yang mempunyai industri rekaman suara yang berarti, yaitu Republik Federasi Jerman dan Inggris.⁸⁸

Bulan maret 1971 di Paris disebabkan makin berkembangnya industri rekaman atas prakarsa WIPO dan UNESCO diselenggarakan suatu pertemuan yang dihadiri oleh para ahli pelbagai negara yang kemudian mendirikan suatu komite para ahli. Dan, kemudian pada bulan Oktober 1971, di Geneva diselenggarakan suatu konferensi diplomatik yang berhasil menerima suatu rancangan *Phonogram Convention* dan kemudian menerimanya sebagai suatu konvensi yang pada tanggal 1 Januari 1996 peserta-pesertanya telah melonjak menjadi 50 negara. Konvensi Geneva terbuka bagi semua negara anggota PBB atau organisasi internasional yang bernaung di bawah PBB.

⁸⁸ *Ibid.*, hal. 77.

Naskah ratifikasi, *acceptance* atau *accession* harus didepositkan pada Sekretaris Jenderal PBB.⁸⁹

Convention for The Protection of Phonograms Against Unauthorised Duplication of their Phonograms menetapkan suatu kewajiban kepada setiap negara peserta konvensi untuk melindungi produsen rekaman suara yang merupakan warga negara dari negara peserta lain konvensi terhadap pembuatan duplikasi (perbanyakan) tanpa persetujuan dari produsen. Negara peserta konvensi berkewajiban juga untuk melarang pengimporan segala bentuk rekaman suara yang penggandaan atau perbanyakan dilakukan tanpa seizin produsen yang berhak.

Phonogram atau rekaman suara adalah fiksasi eksklusif dari suara yang dapat didengar dalam bentuk apapun juga, seperti *compact disc*, *tape*, *laser disc* dan sebagainya. Perlindungan hukum yang diberikan kepada produsen suara pada dasarnya adalah sekumpulan kaidah hukum yang mempunyai karakteristik tersendiri dan merupakan bagian dari pengaturan umum hak cipta, sehingga menjadi suatu hukum *Lex Specialis (Neighboring Rights)*.

Di samping konvensi yang umum tentang Hak Cipta, juga terdapat konvensi, atau perjanjian tentang Hak Cipta yang hanya mengatur satu aspek saja, misalnya :⁹⁰

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*, hal. 12

1. Di Strasbourg tahun 1960 telah di bentuk suatu perjanjian mengenai perjanjian mengenai perlindungan penyiaran televisi (*European Agreement on The Protection Television Broadcast*).
2. Perjanjian Wina 1973 yang dikenal diantaranya *Agreement for The Protection of Type Faces and their International Deposit*.
3. Konvensi Brussel 1974 (*Relating to the Distribution of Programme Carrying Signals Transmitted by satellite*).

3. Sejarah Pengaturan Hak Cipta Di Indonesia

Sejak tahun 1886, negara-negara di kawasan Eropa barat telah diberlakukan Konvensi Bern 1886 untuk perlindungan ciptaan-ciptaan di bidang seni dan sastra. Kecendrungan negara-negara Eropa Barat untuk menjadi peserta konvensi ini, mendorong negara kerajaan belanda untuk memperbaharui Undang-undang Hak Ciptanya yang sudah berlaku sejak 1881⁹¹ dengan suatu Undang-undang Hak Cipta baru tanggal 1 November tahun 1912 bernama *Auteurswet* 1912. tidak lama setelah pemberlakuan undang-undang ini, kerajaan Belanda mengikatkan diri tanggal 1 April 1913 pada Konvensi bern 1886⁹² dengan beberapa *reservation*. Indonesia sebagai

⁹¹ Undang-undang Hak Cipta ini Belanda ini merupakan pembaharuan dari undang-undang Hak Cipta yang berlaku sebelumnya pada tahun 1817; sebelum tahun ini Undang-undang Hak Cipta yang lebih awal mendahuluinya yang merupakan Undang-undang Hak Cipta pertama di Belanda diundangkan tahun 1803. Dengan demikian, baru setelah mempunyai undang-undang Hak Cipta nasional selama 110 tahun, Belanda menjadi peserta Konvensi Bern 1886

⁹² Konvensi Bern 1886 ini, dilengkapi di Paris pada 4 Mei 1896, kemudian diperbaharui di Berlin pada 13 November 1908, dilengkapi lagi di Berlin pada 10 maret 1914, diperbaharui di Roma pada 2 Juni 1928, dan diperbaharui kembali di Brussel pada 26 Juni 1948 dan Stokholm pada 14 Juli 1967. terakhir kali direvisi 24 Juli 1971 di paris.

negara jajahan Belanda diikutsertakan pada Konvensi ini sebagaimana diumumkan dalam *Staatsblad* 1914 Nomor 797.

Ketika Konvensi Bern direvisi pada 2 Juni 1928 di Roma, revisi ini juga berlaku untuk Indonesia dengan *Staatsblad* Nomor 325 tahun 1931. konvensi bern dengan revisi roma ini yang kemudian berlaku di Indonesia sebagai jajahan Belanda dalam hubungannya dengan dunia internasional yang berkenaan dengan hak cipta.

3.1. Auteurswet 1912

Pada masa penjajahan Belanda selama tiga setengah (3,5) abad, Indonesia sebagai koloni Kerajaan Belanda kedudukannya dalam hubungan internasional dan pengaturan hukum nasionalnya sebagai negara jajahan ditentukan dan bergantung sepenuhnya kepada kerajaan Belanda. Dengan demikian hukum positif hak cipta yang secara formal berlaku di Indonesia adalah *Auteurswet* 1912 (Wet van 23 September 1912, *Staatsblad* 1912-600), mulai berlaku 23 September 1912.

Pada masa penjajahan Jepang selama tiga setengah (3,5) tahun, secara *de facto* Indonesia tidak mengenal hubungan internasional sehingga dapat dikatakan tidak ada tempat bagi pelaksanaan dan pembinaan hak cipta baik di tingkat nasional maupun internasional.

Tahun 1944 berakhirnya masa penjajahan Jepang bersamaan dengan berakhirnya peperangan Asia Timur Raya, disusul dengan Proklamasi 17

Agustus 1945 yang secara formal merupakan juga pengakhiran berlakunya tertib hukum kolonial. Dilanjutkan awal berlakunya tertib hukum nasional berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 dengan empat (4) Aturan Peralihan dan satu (1) Aturan Tambahan.

Pasal II Aturan Peralihan menetapkan :

Segala badan negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-Undang Dasar ini

Untuk menguatkan dan menjelaskan pelaksanaan Aturan Peralihan ini oleh Presiden pada waktu itu dianggap perlu menetapkan Peraturan Presiden Nomor 2 tanggal 10 Oktober 1945, yang kutipan ketentuan pertamanya berbunyi :

Segala Badan-badan Negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya Negara R.I. pada tanggal 17 Agustus 1945 selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar masih berlaku asal saja tidak bertentangan dengan UUD tersebut.

Pada masa berlakunya Konstitusi RIS dan UUDs 1950 terdapat juga Peraturan-peraturan Peralihan yang pada intinya mempunyai arti yang sama seperti dalam UUD 1945, yaitu Pasal 192 Konstitusi RIS dan Pasal 142 UUDs 1950. oleh sebab itu. *Auteurswet* 1912 melalui Aturan-Aturan Peralihan yang terdapat dalam tiga macam Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia secara yuridis bagi pengaturan hak cipta di Indonesia walaupun merupakan salah satu produk hukum dari pemerintah Belanda. Setelah lebih kurang 70 tahun baru Indonesia mempunyai undang-undang Hak Cipta nasional, yaitu diundangkannya Undang-undang Nomor 6 tahun 1982.

3.2. Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982

Berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 telah dicabut Undang-undang Hak Cipta jaman Kolonialisme Belanda, yakni *Auteurswet* 1912, *Staatblad* Nomor 600 tahun 1912 yang berlaku di Indonesia semenjak 75 tahun yang lalu. Dasar pertimbangan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, **Pertama**, dalam rangka pembangunan di bidang hukum sebagaimana termaksud dalam Garis-Garis Besar Haluan negara (ketetapan majelis Permusyawaratan rakyat Nomor IV/MPR/1978), serta untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa dalam wahana negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang tentang Hak Cipta; **Kedua**, berdasarkan hal tersebut pada huruf a di atas maka pengaturan tentang hak cipta berdasarkan *Auteurswet* 1912 *Staatsblad* Nomor 600 tahun 1912 perlu dicabut karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan cita-cita hukum nasional.

Bersamaan dengan pencabutan AW 1912, oleh pemerintah Republik Indonesia dengan penetapan Dewan Perwakilan Rakyat telah menetapkan undang-undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982.

Selain dua dasar pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh pemerintah dikemukakan *lima butir latar belakang dan beberapa pengertian umum* yang digunakan sebagai dasar untuk mengganti A.W. 1912 dengan

Undang-undang nomor 12 Tahun 1982 (*Elucidation*), yang perinciannya sebagai berikut :

(a) dalam rangka pembangunan di bidang hukum demi mendorong dan melindungi penciptaan, penyebaran hasil karya ilmu, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan, kecerdasan kehidupan bangsa perlu untuk dibentuk Undang-undang tentang Hak Cipta *Auteurswet* 1912 *Staatsblad* Nomor 600 tahun 1912, perlu diganti karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan cita-cita hukum nasional.

(b) Dalam undang-undang ini selain dimaksudkan unsur baru mengingat perkembangan teknologi, diletakkan juga unsur kepribadian bangsa Indonesia yang mengayomi baik kepentingan individu maupun masyarakat sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara kedua kepentingan dimaksud

Walaupun dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, ditentukan bahwa hak cipta adalah hak khusus, tetapi sesuai dengan jiwa yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945, maka ia mempunyai fungsi sosial dalam arti ia dapat dibatasi untuk kepentingan umum

Hak ini dapat kiranya dilihat :

1. pada kemungkinan membatasi hak cipta demi kepentingan umum/nasional dengan keharusan memberikan ganti rugi pada penciptanya;
2. pada penyingkatan waktu berlakunya hak cipta dari 50 (lima puluh) tahun menurut peraturan yang lama menjadi 25 (dua puluh lima) tahun;
3. dengan diberikannya hak cipta kepada negara atas benda budaya nasional.

(c) Untuk memudahkan pembuktian dalam hal sengketa mengenai hak cipta, dalam undang-undang ini diadakan ketentuan-ketentuan mengenai pendaftaran ciptaan.

Pendaftaran ini tidak mutlak diharuskan, karena tanpa pendaftaran pun hak cipta dilindungi. Hanya mengenai ciptaan yang tidak didaftarkan akan lebih sukar dan lebih memerlukan waktu pembuktian hak ciptanya dari ciptaan yang didaftarkan. Dalam hal ini pengumuman pertama ciptaan diperlakukan sama dengan pendaftaran.

Pendaftaran ciptaan dilakukan secara pasif, artinya bahwa semua permohonan pendaftaran diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian mengenai hak pemohon, kecuali jika sudah jelas ternyata ada pelanggaran hak cipta.

Demikian dalam undang-undang ini dianutr sistem pendaftaran negatif-deklaratif, pada umumnya dalam hal terjadi sengketa, kepada hakim diserahkan kewenangan untuk mengambil keputusan.

(d) dalam undang-undang ini diatur pula tentang Dewan Hak Cipta yang mempunyai tujuan untuk penyuluhan serta bimbingan kepada pencipta mengenai hak cipta. Dewan Hak Cipta ini mempunyai fungsi ganda yaitu

sbagai wadah untuk melindungi ciptaan yang diciptakan oleh warga negara Indonesia menjadi penghubung antara dalam dan luar negeri, menjadi tempat bertanya serta merupakan badan yang memberi pertimbangan kepada pengadilan negeri atau lain-lain instansi pemerintah. Dengan adanya Dewan Hak Cipta diharapkan agar kepentingan para pencipta akan lebih terjamin.

- (e) Prinsip dalam pemberian perlindungan hak cipta yang dianut dalam undang-undang ini, ialah pemberian perlindungan kepada semua ciptaan warga negara Indonesia dengan tidak memandang tempat di mana ciptaan diumumkan untuk pertama kalinya.

Ciptaan terhadap orang asing yang tidak diumumkan untuk pertama kalinya di Indonesia tidak dapat didaftarkan.

Berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 secara utuh artinya tanpa perubahan, hanya kurang lebih lima tahun. Pada 18 September 1987 isinya ada yang diubah, atau dicabut dan diganti sebagian atau keseluruhan pasalnya oleh *Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 42*.

3.3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987

Semenjak diubahnya pada 19 September 1987, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 42) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, dengan demikian secara yuridis berlaku di Indonesia selama kurang lebih sepuluh tahun (1987-1997) adalah :

1. Pasal-pasal Undang-undang nomor 6 Tahun 1982 yang telah diganti atau ditambah dengan pasal-pasal baru Undang-undang nomor 7 Tahun 1987;
2. Pasal-pasal baru dalam Undang-undang nomor 7 Tahun 1987 yang mengganti atau menambah Undang-undang nomor 6 Tahun 1982,

menjadi latar belakang dan apa yang dipakai sebagai pengertian umum dalam mengubah Undang-undang Nomor 6 tahun 1982. hal-hal ini dipaparkan dalam Penjelasan Umum yang merupakan bagian *Inheren* dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1987.

Sehubungan dengan itu maka Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta telah disahkan. Perlindungan hukum yang telah diberikan atas Hak Cipta bukan saja merupakan pengakuan negara terhadap karya cipta seorang pencipta, tetapi juga diharapkan bahwa perlindungan tersebut akan dapat membangkitkan semangat dan minat yang lebih besar untuk melairkan ciptaan baru di bidang tersebut di atas.

Namun demikian di dalam pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta ternyata banyak dijumpai terjadinya pelanggaran terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan terhadap hak cipta. Laporan masyarakat pada umumnya dan khususnya yang tergabung dalam berbagai Asosiasi profesi yang berkepentingan erat dengan *hak cipta di bidang lagu dan atau musik*, Buku dan penerbitan, film dan rekaman video, serta komputer menyatakan bahwa pelanggaran terhadap hak cipta telah berlangsung dari waktu ke waktu dengan semakin meluas dan saat ini telah mencapai tingkat yang membahayakan dan mengurangi kreatifitas untuk mencipta.

Perkembangan kegiatan pelanggaran hak cipta tersebut dipengaruhi oleh berbagai factor. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat akan arti dan fungsi hak cipta, sikap dan keinginan untuk memperoleh keuntungan dagang

dengan cara yang mudah, ditambah dengan belum cukup terbinanya kesamaan pengertian, sikap, dan tindakan para aparat penegak hukum dalam menghadapi pelanggaran hak cipta.

Secara umum *bidang dan arah penyempurnaan* tersebut adalah :⁹³

- (1) ancaman pidana yang dinilai terlalu ringan, dan kurang mampu menjadi penangkal terhadap pelanggaran hak cipta. Selain itu untuk efektifitas penindakan, dipandang perlu menyesuaikan ancaman pidana penjara dengan ketentuan tentang penahanan dalam Pasal 21 KUHP
- (2) pelanggaran hak cipta sebagai tindak pidana aduan, diperlakukan sebagai tindak pidana biasa. Dengan demikian penindakannya tidak lagi semata-mata pada adanya aduan.
- (3) ciptaan atau barang yang terbukti merupakan hasil pelanggaran hak cipta, dirampas untuk negara atau dimusnahkan.
- (4) Adanya hak pemegang hak cipta yang dirugikan karena pelanggaran, untuk mengajukan gugatan perdata tanpa mengurangi hak negara untuk melakukan tindak pidana.
- (5) Penegasan tentang kewenangan hakim untuk memerintahkan penghentian kegiatan pembuatan, perbanyakan, pengedaran, penyiaran dan penjualan ciptaan, atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta sebelum putusan pengadilan.
- (6) Beberapa penyesuaian ketentuan baik berupa penghapusan maupun penambahan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan.

⁹³ Sumber diambil dari Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 6 Tahun 1982.

Sebagai missal, paleo antropologi seperti yang tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) undang-undang Nomor 6 Tahun 1982. pada dasarnya hal tersebut jelas bukan merupakan ciptaan manusia, oleh karenanya memang tidak tepat untuk dikaitkan dengan pengaturan mengenai hak cipta. Sebaliknya Program Komputer (computer programs) yang merupakan bagian dari daripada perangkat lunak dalam system komputer pada dasarnya merupakan karya cipta di bidang ilmu pengetahuan merupakan hal yang perlu ditegaskan sebagai ciptaan yang layak diberikan perlindungan dalam rangka hak cipta. Demikian juga seni batik, karya rekaman suara atau bunyi dan karya rekaman video sebagai karya cipta yang dilindungi.

- (7) ketentuan tentang penerjemahan atau perbanyakan yang dikaitkan dengan kepentingan nasional, tetapi pelaksanaannya diserahkan pada inisiatif perorangan, telah pula menimbulkan berbagai ketidakjelasan. Kesan bahwa ketentuan tersebut pada hakikatnya merupakan pengambilan yang terselubung, dan dilain pihak adanya kesan bahwa seakan-akan negara memberi kesempatan kepada warganya untuk mengambil keuntungan dengan cara yang kurang wajar atau dengan dalih kepentingan nasional perlu segera diperbaiki. Dalam hubungan ini, apabila benar-benar negara memerlukan untuk sesuatu alasan atau kepentingan yang jelas, maka arah pengaturannya perlu dengan tegas dikaitkan dengan pembebanan kewajiban untuk menerjemahkan atau memperbanyak, atau memberi ijin (lisensi) kepada pihak lain yang ditunjuknya untuk melakukannya.

Apabila yang bersangkutan tidak bersedia, maka negara yang akan melaksanakannya.

(8) Masalah jangka waktu perlindungan.

Jangka waktu perlindungan diberikan selama pencipta hidup dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta yang bersangkutan meninggal. Sekalipun jangka waktu tersebut diperpanjang hingga 50 (limapuluh) tahun, tetapi hal ini tidak perlu diartikan bahwa tidak ada lagi batasan tentang fungsi social atas suatu hak milik seperti hak cipta ini. Batasan tersebut tetap ada, dan bahkan secara efektif akan mudah dilaksanakan melalui mekanisme "*Compulsary Licensing*" yang sekarang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987. dalam undang ini masih tetap memberikan sarana guna mewujudkan prinsip sosial yang harus melekat pada hak milik. Ketentuan seperti Pasal 13,14 dan Pasal 17 memberikan kemungkinan kepada masyarakat untuk memanfaatkan suatu ciptaan yang dilindungi Hak Cipta sebagai hak milik.

Perpanjangan waktu perlindungan hukum bagi Hak Cipta di bidang fotografi menjadi 25 tahun.

(9) masalah lingkup dan berlakunya Undang-undang Hak Cipta khususnya yang menyangkut pemberian perlindungan hukum terhadap Hak Cipta asing, dilindungo dengan ketentuan :

e. Diumumkan untuk pertama kalinya di Indonesia atau;

- f. Negara dari Pemegang Hak Cipta asing yang bersangkutan mengadakan perjanjian bilateral mengenai perlindungan Hak Cipta dengan Negara republik Indonesia, atau
- g. Negara dari pemegang Hak Cipta asing yang bersangkutan ikut serta dalam perjanjian multilateral yang sama yang diikuti pula oleh Negara Republik Indonesia.⁹⁴

Dengan demikian hal tersebut berarti pula memberikan jaminan perlindungan Hak Cipta warga Negara Indonesia atau penduduk Indonesia, atau Badan Hukum Indonesia terhadap pelanggaran di luar negeri.

Langkah penyempurnaan di atas memang baru menyangkut beberapa ketentuan di dalam undang-undang hak cipta. Sudah barang tentu, upaya untuk mencegah pelanggaran hak cipta masih dipengaruhi oleh beberapa faktor lainnya.

Adanya penyuluhan hukum yang luas dan intensif untuk meyebarluaskan pemahaman kepada masyarakat akan arti dan fungsi hak cipta, serta isi undang-undang hak cipta itu sendiri, jelas sangat penting. Selain itu upaya untuk menyamakan pemahaman mengenai masalah hak cipta tersebut di kalangan aparat penegak hukum juga sangat penting artinya. Sebab efektifitas penindakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta pada akhirnya juga sangat

⁹⁴ Ketentuan demikian berkaitan karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi-konvensi internasional yang berkaitan dengan Hak Cipta, baru pada tahun 1997 Indonesia meratifikasinya, yaitu antara lain :

1. Agreement Establishing the World Trade Organization telah disahkan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994.
2. *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, disahkan melalui Kepres Nomor 18 Tahun 1997
3. *WIPO Copyright Treaty*, disahkan melalui Kepres Nomor 19 Tahun 1997.

dipengaruhi oleh kesamaan pemahaman, sikap, dan tindakan diantara aparat penegak hukum tersebut. Disamping itu, juga dipandang perlu pengangkatan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen Kehakiman sebagai penyidik dalam rangka penanggulangan pelanggaran hak cipta, yang pelaksanaannya didasarkan atas ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

3.4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1997

Perubahan mendasar *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987*, diundangkan dalam *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1997*, menggunakan tiga pertimbangan hukum yang sekaligus merupakan tujuan pengundangannya yang kutipannya adalah sebagai berikut :

- 1) pemberian perlindungan hukum yang semakin efektif terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual, khususnya di bidang hak cipta perlu lebih ditingkatkan dalam rangka mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya semangat mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan terciptanya masyarakat Indonesia yang adil, makmur, maju dan mandiri berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

- 2) Melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional di bidang HaKI termasuk hak cipta terhadap TRIPs.
- 3) Mengubah dan menyempurnakan beberapa ketentuan undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dengan Undang-undang nomor 12 tahun 1997.

Kalau ketiga pertimbangan hukum Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 ini dibandingkan dengan pertimbangan hukum yang dipakai untuk mengubah Undang-undang Nomor 6 tahun 1982, tampak adanya perbedaan yang cukup mencolok mengenai alasan yang dipakai untuk diadakannya perubahan-perubahan.

Pada pertimbangan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 titik berat lebih banyak diletakkan pada aspek perlindungan hak cipta terhadap pelanggaran hak cipta yang dianggap telah mencapai tingkat yang membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya dan minat untuk mencipta pada khususnya.

Menjelang diundangkannya Undang-undang nomor 7 Tahun 1987, negara-negara industri maju dengan dipelopori Amerika Serikat mendesak negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dengan cara melakukan tekanan-tekanan politis dan ekonomis dalam usahanya memperoleh perlindungan hukum sebaik mungkin bagi produk-produk HaKI-nya yang dipasarkan di negara-negara berkembang yang memerlukannya. Indonesia sebagai suatu negara berkembang, termasuk sebagai negara-negara yang

ditakut-takuti tidak akan diberi lagi fasilitas-fasilitas secara timbal balik oleh Amerika Serikat yang menjadi pendekar di kalangan negara-negara industri maju.⁹⁵

Dengan demikian pertimbangan hukum yang digunakan bagi penyempurnaan dan perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 jelas berbeda dengan yang digunakan untuk Undang-undang nomor 12 Tahun 1997. pertimbangan hukum yang digunakan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 untuk mengubah Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 seperti dimuat dalam mukadimahny, salah satu diantaranya adalah disebabkan keikutsertaan Indonesia dalam TRIPs, yang merupakan bagian dari Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia membawa akibat timbulnya kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional di bidang HaKI termasuk Hak Cipta.

Berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 secara utuh artinya tanpa perubahan, hanya kurang lebih empat tahun. Pada tanggal 29 Juli 2002 *Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 42, diganti dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002.*

⁹⁵ Baca Sudargo Gautama, *Pembaharuan Undang-undang no 12 tahun 1997*, Op.Cit., hal. 129.

3.5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 yang diundangkan pada tanggal 29 Juli 2002 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, menggunakan empat pertimbangan hukum yang sekaligus merupakan tujuan pengundangannya yang kutipannya adalah sebagai berikut :

- a. bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman etnik/suku bangsa dan budaya serta kekayaan yang di bidang seni dan sastra dengan pengembangan-pengembangannya yang memerlukan perlindungan Hak Cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut;
- b. bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai konvensi/perjanjian internasional di bidang hak kekayaan intelektual pada umumnya dan hak cipta pada khususnya yang memerlukan pengejawantahan lebih lanjut dalam sistem hukum nasionalnya;
- c. bahwa perkembangan di bidang perdagangan, industri dan investasi telah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas;
- d. bahwa dengan memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan Undang-undang Hak Cipta yang ada, dipandang perlu untuk menetapkan Undang-undang Hak Cipta yang baru menggantikan

Undang-undang Nomor 6 tahun 1982 tentang hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997.

Latar belakang pertimbangan hukum di atas didasarkan karena Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para penciptanya. Dengan demikian, kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi para penciptanya saja, tetapi juga bagi bangsa dan negara.

Indonesia telah ikut serta dalam pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi anggota dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights/TRIPs* (persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual), melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. selain itu Indonesia juga meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, disahkan melalui Kepres Nomor 18 Tahun 1997, dan *World Intellectual Property Organization/WIPO Copyright Treaty*, disahkan melalui Kepres Nomor 19 Tahun 1997.

Tiga Undang-undang Hak Cipta yang telah ada sebelumnya, walaupun perubahan-perubahan yang dilakukan telah memuat beberapa penyesuaian pasal yang sesuai dengan TRIPs, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk memberikan perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang hak cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya tersebut di atas, masih terdapat beberapa ketentuan yang sudah sepatutnya dimanfaatkan. Selain itu kita perlu menegaskan dan memilah kedudukan hak cipta di satu pihak dan hak terkait di lain pihak dalam rangka memberikan perlindungan bagi karya intelektual yang bersangkutan secara lebih jelas.

Secara umum *bidang dan arah penyempurnaan* tersebut memuat beberapa ketentuan baru, antara lain, mengenai :

1. *database* merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi
2. penggunaan alat apa pun baik melalui kabel termasuk media internet, untuk pemutaran produk-produk cakram optik (*optical disc*) melalui media audiovisual dan/atau sarana telekomunikasi;
3. penyelesaian sengketa oleh pengadilan, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa;
4. penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi pemegang hak;
5. batas waktu proses perkara perdata di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait, baik di pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung;

6. pencantuman hak informasi manajeken elektronik dan sarana kontrol teknologi;
7. pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi;
8. ancaman pidana terhadap Hak Terkait;
9. ancaman pidana dan denda minimal;
10. ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan Program Komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum.

Namun demikian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, mulai diundangkan pada tanggal 26 Juli 2003 sesuai dengan ketentuan Pasal 8*, sebagai berikut “ *Undang-undang ini mulai berlaku 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diundangkan*”, yaitu 29 Juli 2003. sesuai dengan ketentuan aturan peralihan Pasal 74 “*bahwa segala Perundang-undangan hak cipta yang telah ada pada tanggal berlakunya undang-undang ini, tetap berlaku selama tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini*”.

C. PRINSIP-PRINSIP DASAR DALAM HAK CIPTA DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK DALAM UNDANG-UNDANG HAK CIPTA INDONESIA

Pada dasarnya negara-negara penganut *Common Law Sistem* dan *Civil Law System* menggunakan prinsip-prinsip dasar sama dalam pemberian perlindungan hukum Hak Cipta terhadap karya cipta lagu dan atau musik.

Kedua sistem hukum ini pada analisis akhir pemikiran teorinya mendasarkan pada penggunaan akal atau nalar sehingga hukum dianggap sebagai karya akal. Hanya saja perbedaannya bahwa negara-negara penganut *Common Law System* menggunakan akal melalui empirisme, sedangkan negara-negara penganut *Civil Law System* menggunakan akal melalui perundang-undangan. Ini berarti ciri *Common Law Sistem*, terletak pada kaidah-kaidahnya yang bersifat kongkrit yang sudah mengarah kepada penyelesaiannya suatu kasus tertentu dimana pengadilan memegang peranan yang utama (*Judge Made Law*). Lain halnya dengan negara-negara *Civil Law System* yang membentuk kaidah-kaidah hukumnya secara sistematis doktrinal dan berdasarkan perundang-undangan yang merupakan produk badan legislatif negara.⁹⁶

⁹⁶ Eddy Danian, Op.Cit., hal. 98. Bdgk. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bhakti, Bandung: 2000, hal.251; Lily Rasyidi, Filsafat hukum , Apakah Hukum itu, Remaja Rosda Karya, 1991, hal. 51 menjelaskan buah pikiran John chipman, yaitu, bahwa selain penggunaan unsure akal atau logika yang memegang factor penting dalam pembentukan perundang-undangan, juga unsur kepribadian, prasangka dan unsure lain diluar logika berpengaruh sangat besar; factor-faktor dimaksud dapat berupa factor-faktor politik, kualitas individual hakim dalam penyelesaian

1. Prinsip-Prinsip Dasar Hak Cipta

1.1. Hak Cipta adalah hak Khusus.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997, Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dimaksud dengan hak eksklusif menurut penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982, adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Dalam pengertian mengumumkan atau memperbanyak, termasuk kegiatan menterjemahkan mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam dan mengomunikasikan Ciptaan kepada publik melalui sarana apa pun.

Hak cipta sebagai bagian dari hak milik yang abstrak (*incopreal property*) merupakan penguasaan atas hasil kemampuan kerja dari gagasan serta hasil pikiran. Perlindungan hak cipta mempunyai suatu batasan waktu

perkara, sehingga timbul slogan terkenal :: All The Law is Judge-Made Law; bandingkan juga pendapat W. Friedmann, Legal Thori, tevens & Sons, 1953, hal 368 tentang perbedaan prinsip pembuktian dan hukum acara dalam Common Law Sistem dan Civil Law Sistem.

tertentu. Hak cipta akan menjadi milik umum setelah habis masa perlindungannya.⁹⁷

Michael B. Smith dan Merritt R. Blakeslee mengemukakan hak cipta dapat pula diartikan sebagai :

*“ Hak Eksklusif yang diberikan pemerintah untuk jangka waktu tertentu kepada pencipta karya sastra atau seni seperti buku, peta artukel, gambar, foto, komposisi musik, gambar hidup, rekaman atau program komputer Program komputer dilindungi sebagai karya sastra dan kompilasi pangkalan data sebagai hasil ciptaan intelektual.”*⁹⁸

Istilah hak cipta di Indonesia untuk pertama kali diusulkan oleh St. Moh. Syah pada Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951 sebagai pengganti istilah hak pengarang (*Auteurs Rechts*) yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya.⁹⁹

Menurut L.J Taylor hak cipta melindungi suatu ekspresi dari suatu ide, sedangkan ide yang belum diwujudkan belum dilindungi.¹⁰⁰

1.2. Hak Cipta dapat dialihkan

Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak yang dapat dialihkan (Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2002). Hak cipta beralih

⁹⁷ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik intelektual : Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya bakti, 1997) hal. 55.

⁹⁸ Michael B. Smith dan Merritt R. Blakelee, *Bahasa Perdagangan*, (Bandung : Penerbit ITB Bandung, 1995), hal. 47.

⁹⁹ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, *Op.Cit.*, hal. 34-35. dinyatakan “kurang luas” karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan “penyempitan” arti seolah-olah yang dicakup oleh hak pengarang itu hanyalah hak dari seorang pengarang saja, atau yang ada sangkut pautnya dengan karang mengarang.

¹⁰⁰ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 1997, *Op.Cit.*, hal. 56

atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena ; pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Beralih atau dialihkannya hak cipta tidak dapat dilakukan secara lisan, tetapi harus dilakukan secara tertulis baik dengan maupun tanpa akta notaries. Dalam masalah pengalihan ini, dalam bahasa asing dikenal dua istilah yaitu ; “*transfer*” dan “*assignment*”.

Transfer mengacu pada pengalihan yang berupa/berisikan pelepasan hak kepada pihak lain. Hal demikian dapat dalam bentuk atau karena pewarisan, hibah, wasiat, ataupun karena perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan *assignment* mengacu kepada pengalihan yang berupa/berisikan pemberian izin untuk memanfaatkan dalam jangka waktu tertentu. *assignment* umumnya berbentuk *Perjanjian Lisensi*, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2002, pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

1.3. Ciptaan-Ciptaan yang Dilindungi Hak Cipta

Undang-undang nomor 19 Tahun 2002 telah merinci empat belas (12) kelompok ciptaan sesuai dengan jenis dan sifat ciptaan, baik ciptaan-ciptaan yang tergolong tradisional dan yang tergolong baru.

Seperti yang telah diterangkan dalam paragraf terdahulu, pada dasarnya yang dilindungi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 adalah pencipta yang atas inspirasinya menghasilkan setiap karya dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Ciptaan yang lahir harus mempunyai bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi pencipta.

Dengan perkataan lain ciptaan harus mempunyai unsure refleksi pribadi (=alter-ego) pencipta, seperti yang diungkapkan dari kata-kata mutiara dalam bahasa Inggris kuno oleh **Lord Thomas Brown** ¹⁰¹:

Not pict from the leaves of any author, but bred amongst the weeds and tares of mine own brain.

Ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, menetapkan ciptaan-ciaptan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mencakup :

- a. buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay-out*), karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya cipta lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lainnya yang sejenis dengan itu;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. *lagu atau musik dengan atau tanpa teks*;
- e. drama atau drama musical, tari, *koreograf*, pewayangan, pantomin;

¹⁰¹ Eddy Damian, *Op.Cit.*, hal. 132, yang dikutip dalam buku Leddie, Prescott, and Victoria, *The Modern Law of Copyright*, London : 1980, Butterworths, hal 234.

- f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. arsitektur;
- h. peta;
- i. seni batik;
- j. fotografi
- k. sinematografi
- l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lainnya dari hasil pengalihwujudan.

Terhadap ciptaan-ciptaan yang tidak memperoleh perlindungan atas ciptaannya adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 bahwa tidak ada ciptaan atas :

- 1. hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara;
- 2. peraturan perundang-undangan;
- 3. pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah;
- 4. putusan-putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau
- 5. keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

1.4. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta Terhadap Jenis-jenis Ciptaan

Hukum hak cipta Indonesia dan juga hukum nasional tentang hak cipta pelbagai negara lain, biasanya mengatur secara jelas ciptaan-ciptaan yang dilindungi dan berapa lama masa berlaku perlindungan hukum yang diberikan

dilindungi dan berapa lama masa berlaku perlindungan hukum yang diberikan terhadap suatu jenis ciptaan. Berdasarkan prinsip kedaulatan, setiap negara berhak untuk mengatur ciptaan-ciptaan yang berkembang di dalam negaranya. Seperti telah disinggung di atas hukum hak cipta Indonesia, berdasarkan Pasal 12 mengatur ciptaan-ciptaan mengatur ciptaan-ciptaan atau karya cipta yang sifatnya asli yang dapat dibedakan dengan karya cipta yang bersifat turunan atau derivatif.

Menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, untuk ciptaan-ciptaan yang tergolong asli:

- (a) buku, pamflet, semua hasil karya cipta lainnya;
- (b) drama atau drama musical, tari, koreografi;
- (c) segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung,;
- (d) seni batik;
- (e) *lagu atau musik dengan atau tanpa teks*;
- (f) arsitektur;
- (g) ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya;
- (h) alat peraga;
- (i) peta;
- (j) terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai.

Masa berlaku perlindungan hak cipta adalah selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia.

Selanjutnya, masa berlaku perlindungan hak cipta untuk ciptaan-ciptaan yang tergolong derivatif (turunan), pengaturannya menurut Pasal 30

ayat (1) Program komputer, sinematografi, Fotografi, *database* dan karya hasil pengalihwujudan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan. Pasal 30 ayat (2) hak cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan. Pasal 30 ayat (3) hak cipta atas ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini serta pasal 29 ayat (1) yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

Masa berlaku perlindungan hak cipta untuk ciptaan-ciptaan yang tergolong khusus, ketentuan Pasal 31 ayat (1) Hak ciptaan atas ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh negara berdasarkan Pasal 10 ayat (2) berlaku tanpa batas waktu; dan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diketahui umum. Ayat (2), Hak cipta atas ciptaan yang dilaksanakan oleh penerbit berdasarkan Pasal 11 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diterbitkan.

2. Pengertian Pencipta dan Hak Terkait

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melahirkan suatu ciptaan. Selanjutnya dapat pula diterangkan bahwa yang

mencipta suatu ciptaan menjadi pemilik pertama dari hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan.¹⁰²

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (2) mendefinisikan Pencipta¹⁰³ secara rinci sebagai berikut :

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Definisi di atas menjelaskan bahwa pada dasarnya secara konvensional yang digolongkan sebagai pencipta adalah seorang yang melahirkan suatu ciptaan untuk pertama kali sehingga ia adalah orang pertama yang mempunyai hak-hak sebagai pencipta, misalnya : pencipta suatu karangan ilmiah adalah seorang yang menulis tulisan ilmiah yang bersangkutan; pencipta suatu ciptaan musik dan atau lagu adalah pencipta lagu bisa sekaligus sebagai *arranger* atau berdiri sendiri-sendiri¹⁰⁴; dan pencipta suatu ciptaan potret adalah fotografer.

Meskipun demikian, dengan semakin berkembangnya teknologi canggih pada akhir-akhir ini, untuk menentukan siapa yang menjadi pencipta pertama dari suatu ciptaan tertentu memerlukan penjelasan dengan suatu

¹⁰² Eddy Damian, Op.Cit., hal. 124

¹⁰³ Bagian ketiga dari Bab I Undang-undang nomor 12 Tahun 1997 mengatur orang perorangan dan badan hukum yang dapat menjadi pencipta dalam penggolongan :

- a. seorang tertentu (Pasal 5)
- b. dua atau lebih orang (Pasal 6 dan 7)
- c. seorang karyawan (Pasal 8)
- d. badan hukum (Pasal 9)

pembedaan pencipta dalam beberapa golongan implikasinya sangat penting terhadap hak dan kewajiban pencipta, pendaftaran ciptaan, lama berlaku hak cipta dan pertanggungjawaban dalam hal terjadinya pelanggaran hak cipta. *Ibid.*, hal 125

¹⁰⁴ yang dimaksud, bisa terjadi dalam sebuah karya cipta musik dan atau lagu, adalah aransemen, notasi dan lirik adalah satu kesatuan yang saling mendukung dan tak dapat dipisahkan

pendekatan yang agak berbeda. Terutama dalam menentukan pencipta dari ciptaan-ciptaan yang tergolong sebagai hak-hak yang berkaitan¹⁰⁵ dengan pencipta, misalnya : pelaku (*Performer*)¹⁰⁶; pencipta dari rekaman suara suatu lagu dalam bentuk *compact disc* atau pita *seluloid* adalah produser rekaman¹⁰⁷; dan pencipta dari tayangan pertunjukkan/pagelaran musik melalui siaran televisi adalah lembaga penyiaran¹⁰⁸.

¹⁰⁵ WIPO, *Glosarry of Terms of the Law of Copyright and Neighboring Rights*, Geneva, World Intellectual Property Organization, 1980, hal. 167; dikutip dari Eddy Damian, *Op.Cit.*, cett. Kaki 34 mengartikan hak-hak yang berkaitan : Pada umumnya diartikan sebagai hak-hak yang berkaitan hak-hak untuk melindungi kepentingan-kepentingan pelaku-pelaku, produser-produser rekaman suara dan lembaga-lembaga penyiaran sehubungan dengan aktifitas-aktifitas mereka yang berkenaan dengan penggunaan secara umum suatu ciptaan seorang pencipta, semua bentuk pertunjukkan oleh artis-artis atau menyiarkan kepada umum pertunjukkan-pertunjukkan, informasi dan suara-suara atau gambar-gambar hidup. Golongan-golongan utama yang termasuk didalamnya adalah :

- (1) hak pelaku untuk melarang penggunaan tanpa ijin pembuatan gambar (*fixation*), menyiarkan rekaman suara atau mengkomunikasikan kepada umum dari pertunjukanya;
- (2) hak produser rekaman suara, untuk memberi ijin atau melarang reproduksi karya rekaman suara mereka dan melarang pengimporan dan pendistribusian produk-produk bajakan rekaman suara;
- (3) hak lembaga penyiaran untuk memberi ijin atau melarang menyiarkan ulang atau mereproduksi karya siaran mereka.....

¹⁰⁶ Disebut sebagai aktor, penyanyi, musisi, penari dan mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra dan karya seni lainnya. Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Op.Cit.*, hal. 7.

¹⁰⁷ Adalah seseorang atau Badan Hukum yang pertama kali merekam atau memiliki prakarsa untuk membiayai kegiatan rekaman suara atau bunyi, baik dari suatu pertunjukan maupun suara bunyi lainnya. *Ibid.*

¹⁰⁸ Adalah Organisasi Penyelenggara Siaran, baik lembaga penyiaran pemerintah maupun lembaga penyiaranswasta yang berbentuk Badan Hukum yang melakukan atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dan atau tanpa kabel melalui system elektro magnetic. *Ibid.*, hal. 8.

3. Hak yang Berkait dengan Lagu dan/atau Musik

3.1. Hak Ekonomi

Hak cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait, hak demikian ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 seperti telah dikemukakan sebelumnya pada prinsipnya menyatakan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah ciptaan itu dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apa yang dimaksud dengan mengumumkan dan memperbanyak, Undang-undang nomor 19 Tahun 2002 secara eksplisit menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan *mengumumkan dan memperbanyak*, termasuk kegiatan menterjemahkan, mengadaptasi, mengeransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam dan mengomunikasikan Ciptaan kepada publik melalui sarana apa pun.

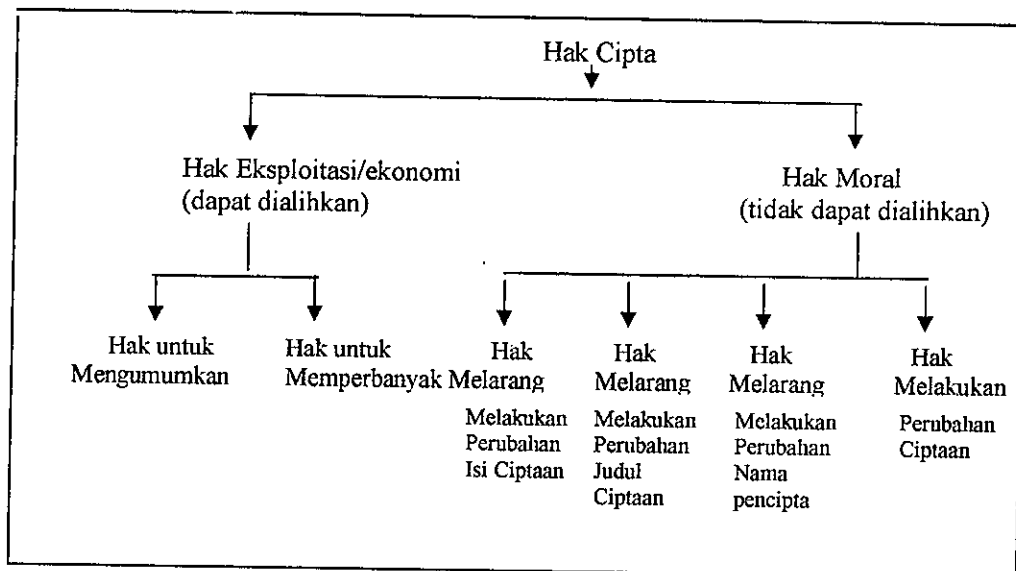
3.2. Hak Moral

Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.

Dengan adanya hak moral tersebut, pencipta suatu karya cipta memiliki hak untuk :

- a. dicantumkan nama atau nama samarananya di dalam ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum;
- b. mencegah bentuk-bentuk distorsi, multilasi atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta selain itu tak satupun hak-hak di atas dapat dipindahkan selama penciptanya masih hidup, kecuali atas wasiat pencipta berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tabel.2
Dua macam hak cipta : hak eksploitasi/ekonomi dan hak moral¹⁰⁹



¹⁰⁹ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*, Op.Cit., hal.63. baca juga A. Komen et.al., *Compendium van her Auterrsrecht*, Kluwer Deventer, 1970, hal.7.

4. Faktor Ekonomi Dalam Perlindungan Hak Cipta yang Berkaitan dengan Lagu dan/atau Musik

Sebagai hak yang bersifat khusus, hak cipta memberikan kepada pemilik atau pemegang-nya untuk dalam waktu tertentu memetik manfaat ekonomi dari ciptaan itu. Manfaat ekonomi tersebut dapat bersumber dari kegiatan mengumumkan (*performing right*), memperbanyak (*mechanical right*) atau menjualnya.¹¹⁰ Hal tersebut dapat juga berasal dari imbalan yang dipetik pemilik atau pemegang atas izin atau persetujuan yang diberikannya kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan-kegiatan sebagai diatas.¹¹¹

Untuk memudahkan gambaran mengenai masalah ini, mungkin baik kita gunakan data di bidang musik sebagai di bawah ini .

Berdasarkan data yang dimiliki PAPPRI (Paguyuban Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia) dari April 1987 – 5 Desember 1989, jumlah ciptaan, jumlah album kaset dan penciptanya adalah sebagai berikut

,¹¹²

¹¹⁰ Bambang kesowo, *Pengantar Umum mengenai Hak atas Kekayaan Itelektual (HaKI) di Indonesia, Op.Cit.*, hal.58.

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² *Ibid.*

Tabel.3
Jumlah Ciptaan, Jumlah Album Kaset dan Penciptanya

Pencipta	Jenis Lagu	Jumlah Ciptaan	Jumlah Album
926	Pop Indonesia	7.752	705
	Pop Dangdut	5.632	512
	Pop Daerah	704	63
926	-	14.088	1.280

Sumber : PAPPRI

Angka di atas belumlah berbicara banyak, dari ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia), kita peroleh data *besaran* sebagai di bawah ini

113.

Tabel.4
Jumlah Besaran Kaset

TAHUN	JUMLAH PRODUKSI KASET		
	INDONESIA	BARAT/ASING	TOTAL
1987	44 Juta	21 Juta	65 Juta
188	34 Juta	11 Juta	45 Juta
1989	28 Juta	7 Juta	35 juta
1987-1989	106 juta	39 Juta	145 Juta

Sumber : ASIRI

Dengan tingkat harga jual pada tahun-tahun tersebut, yaitu antara Rp. 2.500 – Rp. 3.000 (kaset lagu Indonesia) dan antara Rp. 3.000 – Rp. 5.000 (kaset lagu barat/asing), angka-angka/nilai penjualan sebagai berikut :¹¹⁴

¹¹³ *Ibid.*, hal. 59.

¹¹⁴ *Ibid.*, hal. 60.

Tabel.5
Jumlah/Angka Penjualan Album Rekaman

TAHUN	JUMLAH KASET	HARGA	NILAI
1987	65 Juta		(183.500.000.000)
	I : 44 Juta	2.500	110.000.000.000
	B : 21 Juta	3.500	73.500.000.000
1988	45 Juta		(157.000.000.000)
	I : 34 juta	3.000	102.000.000.000
	B : 11 Juta	5.000	55.000.000.000
1989	35 Juta		(119.000.000.000)
	I : 28 juta	3.000	84.000.000.000
	B : 7 juta	5.000	163.500.000.000
1987-1989	145 Juta		(458.500.000.000)
	I 106 Juta		296.500.000.000
	B : 39 Juta		163.500.000.000

Sumber : ASIRI

Apabila nilai penjualan kaset oleh perusahaan industri rekaman yang ditunjukkan ASIRI selama 1987-1989 menunjukkan total Rp. 459.500.000.000,- yaitu total nilai penjualan kaset lagu-lagu Indonesia sebesar Rp. 296.000.000.000 (± 64 %) dan lagu-lagu baarat/asing sebesar Rp. 163.500.000.000,- (36%), baik pula bila kita perhatikan data dari PAPPRI mengenai berapa sebenarnya penghasilan para penciptanya?

PAPPRI mengajukan tingkat penghasilan rata-rata per bulan menurut penggolongan pencipta sebagai berikut :¹¹⁵

Tabel.6
Penggolongan Pencipta

Kelas Pencipta	Penghasilan Perbulan	%
Pemula	25.000 – 50.000	± 50 %
Sudah Dikenal	100.000 – 400.000	± 40 %
Hit Makers	2.500.000 – 5.000.000	± 10 %

Sumber : PAPPRI

Bilamana data di atas kita jumlahkan untuk periode 1987-1989, maka tingkat penghasilan rata-rata para pencipta tersebut adalahg (Rp.,-):

Pemula : 900.000-1.800.000

Sudah dikenal : 3.600.00-14.400.000

Hit Makers : 90.000.000-180.000.000

Ini berarti tingkat penghasilan rata-rata secara total dalam periode 1987-1989 hanya sebesar antara Rp. 94.000.000-196.200.000,-¹¹⁶

Dibandingkan dengan penjualan kaset lagu-lagu Indonesia untuk periode 1987-1989 yang disajikan ASIRI yang berjumlah Rp. 296.000.000.000,- maka sebenarnya para pencipta lagu tersebut hanya menerima paling besar 0,06 % saja!¹¹⁷

¹¹⁵ *Ibid*

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ *Ibid.*

Sumber lainnya yaitu penggunaan karya cipta di berbagai tempat hiburan yang bersifat komersial, seperti Hotel, Restoran, Pub, Stasiun Penyiaran TV/radio dll.

Gambaran betapa penghasilan yang linier itupun masih diperoleh dengan cara dan bentuk yang sederhana tersaji melalui data PAPPRI 1989 :

Tabel. 8
Cara Pembayaran Royalti

Jenis Lagu	Cara Pembayaran Royalti	
	LUMPSUM	FLAT
Pop Indonesia	100.000-1.000.000	1) 100-400/kaset
Pop Dangdut	50.000-500.000	2) Kombinasi
Pop Daerah	25.000-250.000	DP Plus Flat/fee

Sumber : PAPPRI

Terlepas dari angka-angka tersebut, menarik untuk diperhatikan beberapa hal mengenai PAPPRI sebenarnya menamakan "Lumpsum" untuk menyebut bentuk pembayaran yang sebenarnya "Flat Fee", Sebaliknya ASIRI menamakan Flat Fee atau lebih lazimnya dikenal sebagai bentuk pembayaran berdasar nilai satuan per-kaset. Pembayaran royalti berdasarkan prosentase terhadap harga jual¹¹⁸. Pada sekitar 1987-1989 Royalti belum dikenal, tapi sekarang mulai berjalan yang dirintis oleh YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia), yang dibentuk oleh

¹¹⁸ *Ibid.*

PAPPRI untuk menangani hak-hak ekonomii dari sebuah karya cipta lagu dan/atau musik.

Apa yang dapat kita tarik dari gambaran angka dan data di atas bahwa hak cipta di bidang lagu dan/atau musik memiliki potensi ekonomi/bisnis yang besar, Industri hak cipta memiliki potensi sebagai sumber pendapatan negara melalui pajak, industri hak cipta merupakan sumber penghasilan yang tidak kalah prestisius bagi para penciptanya.¹¹⁹

5. Pelanggaran terhadap Karya Cipta Lagu dan/atau Musik

Seiring dengan kemajuan teknologi di bidang industri rekaman lagu dan/atau musik, saat ini pelanggaran yang terbesar adalah *pembajakan* CD dan VCD yang kian bertambah maju dan terorganisir karena masalah rekaman CD dan VCD sudah menjadi barang konsumen dimana trend dari penjualannya sudah bukan pada rental saja tapi sudah menjadi barang koleksi pribadi.

Pada dasarnya bentuk pelanggaran dan/atau kejahatan di bidang hak cipta, khusus terhadap hasil rekaman Lagu dan/atau musik dalam bentuk kepingan CD dan VCD biasanya berbentuk¹²⁰ : membuat rekaman, selain yang diperuntukkan bagi kepentingan pribadi,

¹¹⁹ *Ibid.*, hal.62

¹²⁰ Wiyadi Wiyanto, *Seminar Internasional Penegakan Hukum di Bidang HaKI : Perlindungan Hak Cipta dan Penegakan Hukumnya di Indonesia*, KORSERSE POLRI; Bali, April, 2000, hal. 2-3.

pembajakan berupa pengcopian atau penggandaan di dalam bentuk CD/VCD tanpa pembayar royalty baik kepada pemegang hak maupun pemilik judul, Penggandaan CD/VCD dilakukan bukan oleh importir resmi pemegang ijin usaha, tidak membayar pajak pertambahan nilai (PPn), tindakan-tindakan menyiarkan, mengedarkan, atau menjual, menyimpan, menyewakan, menawarkan termasuk memajang untuk dijual atau disewakan hasil rekaman yang tidak sah, patut diketahui bahwa hasil rekaman tersebut dibuat dengan melanggar hak orang lain, mengimpor karya-karya bajakan untuk dijual.

Ketentuan Pasal 15, "Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan dengan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta", huruf (a) penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan dan penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tujuan masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.

Pembatasan itu perlu dilakukan karena ukuran kuantitatif untuk menentukan pelanggaran hak cipta sulit diterapkan. Dalam hal ini akan lebih tepat apabila penentuan pelanggaran hak cipta didasarkan pada ukuran kualitatif. Misalnya, pengambilan bagian yang paling substansial dan khas yang menjadi ciri dari ciptaan, meskipun pemakaian itu kurang dari 10 %. Pemakaian seperti itu secara substantif merupakan pelanggaran hak cipta.

Dalam kaitannya dengan masalah potensi ekonomi ini menjadi semakin perlu untuk diperhatikan akibat dari kegiatan pembajakan Hak Cipta di bidang lagu dan/atau musik. Apabila kerugian yang dinyatakan ASIRI dalam tahun 1986 dijadikan contoh, yaitu \pm Rp. 10 milyar, maka kerugian royalty 100-200/kaset, berarti kerugian tersebut menyangkut 10 juta-5juta kaset (hasil bajakan).¹²¹

Dari segi pendapatan negara, maka hilangnya pajak (PPh) dari sektor perusahaan industri rekaman, sebagai ilustrai memakai data ASIRI diambil untuk tahun 1988 :dengan penurunan produksi sebesar 10 juta kaset (dari angka tahun 1987), dengan memakai asumsi bahwa seolah-olah semuanya karena pembajakan, maka jumlah tersebut menunjukkan total nilai penjualan kaset sebesar \pm Rp. 30 milyar (harga kaset : Rp. 3000,-). Dengan ilustrasi di atas hilangnya pendapatan negara dari segi pajak penghasilan (PPh) (\pm Rp. 30 milyar \times 10 %) \times 29 % = Rp. 870 juta.¹²²

Dampak pembajakan hak cipta ini dapat pula dilihat dari segi perdagangan internasional. Indonesia pernah pula memiliki pengalaman bagaimana beberapa negara atau kelompok negara pernah mengancam untuk menghentikan fasilitas GSP (*Generlized Sistem of Preferences*) yang mereka berikan terhadap beberapa komoditi ekspor Indonesia,

¹²¹ Bambang kesowo, *Pengantar Umum mengenai Hak atas Kekayaan Itelektual (HaKI) di Indonesia, Op. Cit.*, hal.63

¹²² *Ibid*

dengan cara melakukan tekanan-tekanan politis dan ekonomis dalam usahanya memperoleh perlindungan hukum sebaik mungkin bagi produk-produk HaKI-nya yang dipasarkan di Indonesia.

6. Yayasan Karya Cipta Indonesia

KCI (Karya Cipta Indonesia), sebagai Organisasi Profesi di bidang hak cipta, merupakan salah satu organisasi yang khusus bergerak di bidang hak cipta khususnya pencipta atas karya lagu dan/atau musik. Dalam melakukan kegiatannya KCI bereperan dalam pengumpulan royalty yang menjadi hak pencipta dalam *Performing Right* dan *Mechanical Right* secara kolektif.

KCI (Karya Cipta Indonesia) merupakan badan administrasi kolektif untuk mengurus masalah pungutan royalty dari *performing right* dan *mechanical right* suatu karya cipta musik dan atau lagu di wilayah Negara Republik Indonesia, didirikan berdasarkan atas Akta Notaris Nomor : 42 bertanggal 12 Juni 1990.¹²³

Tujuan didirikannya KCI dalam Pasal 4 anggaran dasarnya adalah bertujuan mengurus kepentingan para pencipta musik dan/atau lagu peserta KCI dari dalam atau luar negeri untuk memungut royalty dari para pemakai atas musik dan/atau lagu bersangkutan yang dikomersialkan di Wilayah Negara Republik Indonesia; mewakili dan mempertahankan serta melindungi kepentingan para pencipta atau pemegang hak cipta atas pelanggaran karya

¹²³ Dimuat dalam Tambahan Berita negara Republik Indonesia. Tanggal 8 November 1991 No.90.

cipta yang bersangkutan; meningkatkan kreatifitas para pencipta, melalui pendidikan, pembinaan dan pengembangan serta kemampuan pengetahuan di bidang musik.

Hal demikian sejalan dengan Visi dan Misi KCI kepada anggota yaitu Visi KCI adalah mengoptimalkan pendapatan royalty untuk kesejahteraan anggotanya, dan menjalankan fungsi administrasi kolektif secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan pendapatan royalty serta meminimalkan biaya, kepada pengguna musik adalah memberikan informasi yang akurat dan lengkap serta ilmiah kepada pengguna musik, sehingga dapat memberikan manfaat yang diperoleh untuk menghindari sekecil mungkin atas pelanggaran hak cipta.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA MUSIK dan atau LAGU

Karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, pada dasarnya adalah juga karya intelektual manusia yang dilahirkan sebagai perwujudan kualitas rasa, karsa dan ciptanya. Pencipta atas karya-karya tersebut memang pada akhirnya tidak hanya memiliki arti sebagai karya yang hadir dan dapat kita lihat secara fisik. Karya tersebut juga hadir sebagai sarana pemenuhan kebutuhan terutama yang bersifat batiniah. Semakin banyak dan semakin besar karya-karya tersebut, pada umumnya juga memberi nilai tambah terhadap harkat dan martabat manusia yang melahirkannya, dan kehidupan manusia pada umumnya.

Pengertian hak cipta mengacu pada ketentuan Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ciptaan merupakan obyek yang dilindungi oleh hak cipta, menurut rumusan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam ilmu pengetahuan, seni atau

sastra. Mengenai siapa yang disebut sebagai pencipta itu, yang dimaksud dengan pencipta, ketentuan Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 1 angka 2, adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Yang dimaksud dengan Ciptaan Pasal 1 angka 3 adalah setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra, sehingga Ciptaan itu dapat *dilihat, dibaca, atau didengar*. Dari uraian di atas, dapat diuraikan bahwa unsur-unsur ciptaan adalah : 1. ekspresi dari suatu ide yang dapat dilihat dibaca atau didengar, dan ; 2. ekspresi ide demikian harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keasliannya atau originalitas dari ekspresi tersebut.

Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, dilindungi oleh hak cipta. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002. Terhadap ciptaan-ciptaan yang dilindungi dalam undang-undang Nomor 19 tahun 2002 yang akan efektif berlaku pada bulan Juli 2003 Pasal 12 sudah tidak dicantumkan lagi karya pertunjukan dan karya siaran yang merupakan perlindungan terhadap hak-hak terkait, dimasukkan dalam satu bab tersendiri tentang perlindungan terhadap hak-hak terkait. Hal demikian menunjukkan bahwa dalam undang-undang 12 Tahun 1997 hak cipta dan hak-hak terkait merupakan satu dan melebur dalam hak cipta, akan tetapi dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 adanya pemisahan konsep antara hak cipta dengan hak-hak terkait. Hak cipta untuk pencipta, sedangkan hak-hak terkait itu hak untuk pelaku

seperti penyanyi, hak untuk produser rekaman dan kemudian hak lembaga penyiaran. Menurut Adi Supanto, ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 memisahkan secara tegas *Neighboringright* dan Copy right sedangkan undang-undang yang ada sebelumnya, masih rancu *Neighboringright* sekaligus sebagai copy right.¹²²

Hasil wawancara dengan Adi Supanto, terhadap pendaftaran ciptaan atas karya cipta lagu dan atau musik di Direktorat Jenderal masih sangat sedikit, hal demikian dapat dilihat dalam data-data Direktorat jenderal di bawah ini :

Tabel .8
Permohonan Pendaftaran Ciptaan Tahun 1991 s/d 16 november 2002

Tahun	Permohonan Pendaftaran Ciptaan			Ciptaan Terdaftar		Ciptaan ditolak	
	Dalam Negeri	Luar Negeri	Jumlah	Dalam Negeri	Luar Negeri	Dalam Negeri	Luar Negeri
1991	2785	50	2835	1551	33	1182	16
1992	2887	93	2980	1919	69	939	20
1993	3591	128	3719	2356	121	1055	7
1994	3738	209	3947	2366	143	1093	61
1995	4373	184	4557	3134	114	1245	70
1996	4646	294	4940	2869	195	1147	38
1997	2065	120	2185	594	42	223	5
1998	580	26	606	311	6	222	20
1999	684	14	698	686	14	138	0
2000	1026	23	1049	608	10	5	0
2001	1501	34	1535	992	13	6	0
S/d 16 Agustus 2002	763	9	772	884	0	8	0
Jumlah	28639	1184	29823	18270	760	7263	237

Sumber : Data Direktorat jenderal Hak Kekayaan Intelektual

¹²² Wawancara dengan Adi Supanto, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 7 November 2002 di Jakarta.

Tabel. 9
Data Statistik Permintaan pendaftaran Hak Cipta
Tahun 2001

Bulan	Permohonan Pendaftaran Ciptaan		Pemindahan Hak	Petikan	Perubahan Nama/Alamat
	Dalam Negeri	Luar Negeri			
Januari	56	-	1	-	-
Februari	120	-	1	-	3
Maret	131	6	-	-	-
April	72	-	1	1	1
Mei	104	5	1	-	1
Juni	100	21	21	-	-
Juli	140	1	4	1	-
Agustus	164	-	3	1	-
September	121	-	3	-	-
Oktober	209	-	9	1	4
November	224	-	-	-	-
Desember	60	1	3	-	-
Jumlah	1501	34	47	4	8

Sumber : Data Direktorat jenderal Hak Kekayaan Intelektual

Tabel 10
Permohonan pendaftaran Ciptaan
Tahun 1991 s/d Juli 2002

Tahun	Permohonan Pendaftaran Ciptaan		
	Dalam Negeri	Luar Negeri	Jumlah
1991	2785	50	2835
1992	2887	93	2980
1993	3591	128	3719
1994	3738	209	3947
1995	4373	184	4557
1996	4646	294	4940
1997	2065	120	2185
1998	580	26	606
1999	684	14	698
2000	1026	23	1049
2001	1501	34	1535
S/d Juli 2002	763	9	999
Jumlah	28639	1184	30050

Sumber : Data Direktorat jenderal Hak Kekayaan Intelektual

Tabel 11
Data Statistik Permintaan Pendaftaran Hak Cipta Tahun 2002
Data Direktorat Jenderal Hak Kekayaan intelektual

Bulan	Permintaan Pendaftaran Hak Cipta							Jumlah
	Seni	IP	Sastra	P H	Petikan	P.N/A	LN	
Januari	89	28	4	0	0	0	0	123
Februari	49	4	6	1	0	0	0	60
Maret	76	12	1	2	0	3	0	94
April	146	15	30	0	1	0	0	192
Mei	107	28	27	1	3	1	0	167
Juni	159	35	37	5	1	0	0	237
Juli	117	19	10	1	1	0	0	148
Agustus	184	22	9	1	0	1	0	217
September	145	49	26	1	4	1	17	226
Oktober	85	5	6	0	1	1	1	99
Jumlah	1161	217	126	12	11	7	18	1563

Sumber : Data Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

Satu hal yang tidak kalah pentingnya dalam kaitannya dengan perlindungan hak cipta adalah peran organisasi profesi di bidang hak cipta, dimana keberadaannya sangat membantu para pencipta dalam membantu mengurus, mengawasi hak-hak yang dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta dan hak-hak terkait, baik dalam kaitannya dengan fungsinya untuk memajukan kepentingan atas hak pencipta para anggota organisasi maupun dalam rangka upaya perlindungan dan penegakan hukum terhadap hak pencipta

Perlindungan termasuk didalamnya hak untuk mengeksploitasi terhadap hak cipta yang dimiliki oleh pencipta, pemegang hak cipta dikelola secara kolektif oleh KCI. KCI (Karya Cipta Indonesia) merupakan badan administrasi kolektif untuk mengurus masalah pungutan royalty dari

performing right dan *mechanical right* suatu karya cipta musik dan atau lagu di wilayah Negara Republik Indonesia, didirikan berdasarkan atas Akta Notaris Nomor : 42 bertanggal 12 Juni 1990.¹²³ Selain Hak ekonomi yang secara khusus ditangani oleh KCI, pencipta juga memiliki hak moral. Moral right selalu dicantumkan karena tidak sedikit pencipta lagu mendapat honor dari users, bukan dari penyanyinya.¹²⁴

Pasal 4 Anggaran Dasar KCI, KCI didirikan dengan maksud untuk mewakili para pencipta atau pemegang hak cipta musik dan/lagu dengan tujuan :

1. mengurus kepentingan para pencipta musik dan/atau lagu peserta KCI dari dalam atau luar negeri untuk memungut royalty dari para pemakai atas musik dan/atau lagu bersangkutan yang dikomersialkan di Wilayah Negara Republik Indonesia;
2. mewakili dan mempertahankan serta melindungi kepentingan para pencipta atau pemegang hak cipta atas pelanggaran karya cipta yang bersangkutan;
3. meningkatkan kreatifitas para pencipta, melalui pendidikan, pembinaan dan pengembangan serta kemampuan pengetahuan di bidang musik.

Pasal 5 Anggaran dasar KCI, KCI bertugas:

1. melaksanakan administrasi kolektif atas pemakaian karya cipta pada umumnya dan pencipta musik pada khususnya baik dari dalam ataupun dari luar negeri;

¹²³ Dimuat dalam Tambahan Berita negara Republik Indonesia. Tanggal 8 November 1991 No.90.

¹²⁴ Wawancara dengan Adi Supanto, Op.Cit

2. melakukan pemungutan fee atau royalty atas pemakaian (*performing Rights*) ataupun penggandaan (*Mechanical Rights*) secara komersial dari musik dan/atau lagu milik peserta KCI;
3. mendistribusikan hasil pemungutan fee atau royalty tersebut kepada yang berhak setelah dipotong biaya administrasi.

Visi KCI adalah mengoptimalkan pendapatan royalty untuk kesejahteraan anggotanya, yaitu para pencipta lagu, lirikus, penata musik atau pemegang hak cipta nya. Misi KCI ; kepada anggota adalah menjalankan fungsi administrasi kolektif secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan pendapatan royalty serta meminimalkan biaya, kepada pengguna musik adalah memberikan informasi yang akurat dan lengkap serta ilmiah kepada pengguna musik, sehingga dapat memberikan manfaat yang diperoleh untuk menghindari sekecil mungkin atas pelanggaran hak cipta.

Lembaga ini didirikan untuk menjembatani para pencipta musik dengan para pengguna musik dalam mengurus administrasi penggunaan hak cipta. KCI merupakan salah satu dari *Collective Management Organization (CMO)*, anggota dari :

- CISAC, *International Confederation of Societies of Authors and Composers.*
- BIEM, *International Organization for administration of mechanical reproductions rights.*

Tabel 12
PENGELOMPOKAN ANGGOTA BEBERAPA SOCIETY

No. Society	Klasifikasi Anggota
1. APRA (Australia)	Pencipta (Full, Associate & Successors) Publisher (Full & Associate)
2. JASRAC (Jepang)	Pencipta (Full, Ass, Trustors & Successors) Publisher (Full, Trustors & Associate)
3. IPRS (India)	Pencipta (Full, Ass, Provision & Successors) Publisher (Full & Associate)
4. COMPASS (Singapura)	Pencipta (Full, Associate & Successors) Publisher (Full & Associate)
5. KOMCA (Korea)	Pencipta (Full, Associate & Successors) Publisher (Associate)
6. MACP (Malaysia)	Pencipta (Full, Associate & Successors) Publisher (Full & Associate)
Full = Penuh, Associate = tidak Penuh, Successors = Penerima Waris, Provision = Calon Anggota, Trustors = yg Percaya	

Sumber data : KCI

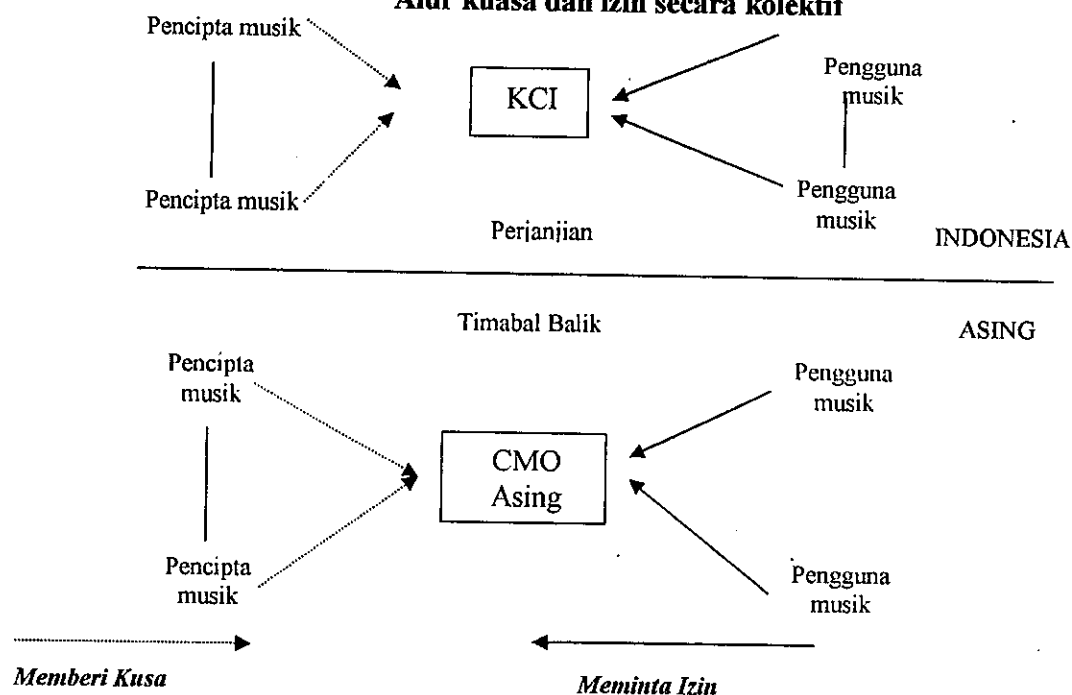
Pencipta yang diwakili oleh KCI adalah dari kalangan : *Writers* (Komposer, Lirikus, Arranger, Adapter), Penerbit Musik (*music publishers*) dan juga penerima hak cipta (ahli waris dari *Writers*).

Sampai dengan akhir tahun 2001, telah bergabung sebanyak 1.890 pencipta musik Indonesia yang mendaftarkan sekitar 70.000 karya ciptanya. Jenis musik yang terdaftar meliputi semua jenis Pop, Jazz, dangdut hingga Jingle Iklan.

Para pencipta musik ini terdiri dari, mulai dari mereka yang senior seperti H. Mutahar, Maladi, Gesang, hingga yang lebih muda seperti Melly Guslaw dan Dhani Ahmad (Dewa). Termasuk didalamnya terdaftar para ahli waris dari almarhum Ismail Marzuki, Ibu Sud, Kusbini dsb (daftar lihat dalam lampiran).

Sehingga jika karya cipta musik pencipta asing tersebut digunakan di wilayah Indonesia, KCI adalah lembaga yang berhak memberikan izin atau lisensi penggunaannya, khususnya untuk hak mengumumkan. Demikian sebaliknya jika musik dari pencipta KCI digunakan di luar negeri akan diwakilkan oleh CMO.

Tabel. 13
Alur kuasa dan izin secara kolektif



Bagi pencipta yang sudah menjadi anggota di KCI, bentuk izin yang diberikan oleh KCI kepada pengguna musik adalah lisensi penggunaan musik yang dituangkan dalam sebuah sertifikat lisensi (terlampir). Untuk hak mengumumkan, KCI memberikan lisensi pemakaian musik untuk menggunakan seluruh karya musik pencipta yang diwakilkan oleh KCI dalam kegiatan usahanya (*Blanket License*).

Sedangkan untuk hak memperbanyak, KCI memberikan lisensi berdasarkan atas setiap karya cipta musik yang digunakan. Sertifikat lisensi ini membebaskan dari segala macam tuntutan/gugatan dari pencipta yang diwakilkan oleh KCI atas penggunaan karya ciptanya atas hak mengumumkan (*Performing Right*). Ketidadaan lisensi KCI itu menandakan bahwa tempat-tempat hiburan tersebut tidak menghargai hak cipta seseorang khususnya *Performing Right* di bidang lagu dan/atau musik terhadap royalty yang berhak diterima seorang pencipta baik yang mengatur dan mengurus hak royaltinya sendiri atau yang pengadministrasian kolektifnya dikelola oleh pencipta KCI yang diberi kuasa oleh para pencipta dan pemegang hak cipta yang menjadi anggota KCI.

Kewajiban dari penerima lisensi adalah :

1. Membayar biaya lisensi (*royalty*) untuk penggunaan selama periode tertentu.
2. diwajibkan untuk memberikan laporan penggunaan musiknya (*Logsheet/Program Return*) untuk kepentingan pembayaran royalty kepada pencipta.

Pembayaran royalty merupakan konsekuensi logis dari menggunakan jasa/ karya orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, musik merupakan salah satu sarana penunjang dalam kegiatan usaha misalnya dari restoran atau diskotik hingga usaha penyiaran.

Perlindungan hukum terhadap pencipta, bagi manusia yang menghasilkannya, karya cipta tersebut memang memberikan kepuasan bathin.

Tetapi dari segi yang lain karya cipta tersebut sebenarnya juga memiliki arti ekonomi. Hal terakhir ini perlu dipahami, dan tidak sekedar menganggapnya semata-mata sebagai karya yang memberi kepuasan bathiniah, bersifat universal dan dapat dinikmati siapapun, dimanapun dan kapanpun juga, apalagi dengan sikap bahwa sepantasnya hal itu dapat diperoleh secara cuma-cuma.

Bagi seorang pencipta, keahlian mencipta bukan saja merupakan kelebihan atau anugerah dari Tuhan Yang Maha Kusasa. Keahlian itu juga menjadi sumber penghidupannya. Dari keahlian yang dimiliki pencipta memperoleh nafkah. Salah satu usaha untuk mengeksploitasi secara ekonomi atas karya cipta yang diberi hak eksklusif, pencipta dapat : mengumumkan atau memperbanyak sendiri atas karya ciptanya guna diambil manfaat ekonominya; atau mengalihkan hak ciptanya kepada pihak lain melalui suatu perjanjian; atau menerima royalty dari pihak lain yang beritikad baik atas pengeksplotasian karya cipta itu.

Setiap pencipta patut mendapatkan hak ekonomi apabila lagu dan atau musik hasil karyanya diumumkan atau diperbanyak. Hak ekonomi tersebut dalam prakteknya biasa disebut dengan penerimaan pendapatan. Cara pembayaran yang lazim dipakai yaitu dalam bentuk royalty.

Dalam mengeksploitasi hak cipta, seorang pencipta tidak dapat melaksanakan sendiri secara maksimal tanpa adanya organisasi profesi hak cipta yang menangani khusus hal itu, terutama untuk ciptaan lagu atau musik. Salah satu belum terlaksananya mekanisme performing right adalah kesulitan

jika para pencipta atau pemegang hak cipta secara perorangan mendatangi setiap penyelenggara acara musik di Indonesia satu persatu untuk menagih hak ekonominya. Di Indonesia tugas tersebut diemban oleh KCI yang khusus melaksanakan pengadministrasian kolektif atas pemakaian hak cipta dari para pencipta lagu dan/atau musik, baik ciptaan Indonesia maupun asing dan dalam perkembangannya sejak tahun 1996, juga telah melaksanakan pengadministrasian kolektif atas hak memperbanyak lagu dan/atau musik para pencipta.

Dengan adanya Undang-Undang Hak Cipta Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1997 jo 7/1987 jo 6/2002 maupun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, pencipta memiliki hak khusus untuk mengumumkan atau memperbanyak karya ciptanya maupun memberi izin untuk itu. Peran Organisasi Profesi Hak Cipta mengenai pengumpulan dan distribusi Royalti yang menjadi hak para pencipta ditangani oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) untuk pencipta yang menjadi anggota KCI.

Hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta adalah kegiatan mengumumkan seperti pembacaan, penyuaran, penyiaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain (Pasal 1 angka 5 Undang - Undang No. 19/2002), yang merupakan hak eksklusif dari seorang pencipta atau pemegang hak cipta (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 19 / 2002). Dengan kata lain khusus di bidang lagu dan/atau musik, pengumuman berarti penyuaran, penyiaran,

pertunjukkan atau penyiaran suatu ciptaan lagu dan/atau musik termasuk rekaman suara yang dilakukan oleh para pemakai (*Users*) seperti : Radio Republik Indonesia, Stasiun Radio Swasta Nasional, TVRI, RCTI, SCTV, TPI, Indosiar, ANTV, Trans TV, Metro TV, TV 7, Global TV, MTV, Badan Penerbangan, Hotel, Karaoke, Pub, Diskotik, Restoran, Bar, Kafe, Mall, Rumah Sakit, Fitness Center dan lain-lain dalam rangka pelayanan pada masyarakat luas dan memungut bayaran (bersifat komersial), sehingga dalam pelayanan atas jasa mereka dengan menggunakan ciptaan lagu atau musik, para pemakai (*Users*) diwajibkan membayar sejumlah fee atau royalty atas pemakaian lagu atau musik tersebut.

Para pemakai adalah atau *users* adalah seseorang atau badan hukum yang melaksanakan pengumuman, penyiaran, pertunjukkan atau penyebaran suatu ciptaan lagu dan atau musik termasuk rekaman suara dengan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga orang lain dapat mendengarnya, dalam bentuk; background musik, live musik, diskotik, karaoke, atau video screen. Dalam formulir aplikasi lisensi pengumuman musik KCI dijelaskan, video screen adalah layar lebar untuk memutar siaran televisi dan/atau video/laser disc yang mengandung musik. Jenis ini tidak diperhitungkan lagi dalam pembayaran royalty jika dipergunakan untuk kepentingan karaoke.

Contoh pihak-pihak yang harus memiliki izin adalah pengguna musik dalam bentuk pengumuman, termasuk didalamnya : Stasiun pemancar televisi dan radio (dengan/tanpa kabel), Perusahaan penerbangan, badan udara, Pengelolaan tempat hiburan, bioskop, Penyelenggara konser atau

pertunjukkan musik, Pengusaha restaurant, café, karaoke, discotheque, Medical center, rumah sakit, Pameran, Fashion show, Pengelola mal, supermarket, pertokoan, perkantoran, bank, Pengelola musik yang ditransmisikan secara digital (*website, ringtone, online radio* dsb)

Istilah dalam Distribusi Royalty Khusus Hak Mengumumkan ditangani oleh KCI, diatur dalam Peraturan Distribusi Royalti Karya Cipta Indonesia (Khusus Hak Mengumumkan) Pasal 1 tentang pengertian :

- a. Distribusi adalah kegiatan penyaluran, pembagian atas pembayaran royalty yang diterima KCI dari pihak yang mengumumkan atau menggandakan musik untuk kepentingan komersil kepada pihak yang berhak menerimanya berdasarkan ketentuan yang berlaku setelah dipotong biaya administrasi. Pasal 1 Peraturan Distribusi Royalty Khusus hak Mengumumkan KCI.
- b. Royalty adalah merupakan hak ekonomi para pencipta lagu/pemegang hak cipta karya musik jika karyanya dipergunakan.
- c. Bagian/*share* adalah bagian dari royalty yang merupakan hak ekonomi para anggota KCI sebagai pencipta musik dan/atau lagu jika karyanya dipergunakan.
- d. Anggota adalah perorangan atau badan hukum yang memegang hak cipta atas karya musik dan/atau lagu, dan telah menyerahkan pengelolaan pengumpulan royaltinya tersebut kepada KCI, baik dalam kedudukannya sebagai pencipta/pemegang hak cipta atau wakilnya yang sah.

- e. Karya musik adalah tiap ciptaan baik yang sekarang telah ada maupun yang dibuat kemudian termasuk didalamnya melodi dengan maupun tanpa lirik, gubahan/aransemen, atau adaptasi.
- f. Karya musik iklan adalah karya musik yang khusus digunakan untuk kepentingan iklan.
- g. Karya musik ilustrasi (*Illustration Music*) adalah karya musik yang digunakan sebagai ilustrasi pada film, drama, sinetron, sandiwara, dan sejenisnya.
- h. Karya musik *Signature Tune* adalah karya musik yang khusus digunakan untuk kepentingan identitas suatu acara.
- i. Karya musik utama (*Featured Music*) adalah karya musik yang digunakan sebagai musik utama, di mana dalam penggunaannya peran musik sangat dominan.
- j. *Repertoire* adalah daftar karya musik anggota KCI yang telah diserahkan/dinotifikasikan kepada KCI untuk dikelola hak mengumumkannya
- k. *Log-Sheet / Program Return* adalah daftar lagu yang digunakan pemakai dalam bentuk yang ditentukan KCI, yang merupakan kewajiban bagi para pemakai untuk mengisi dan menyerahkannya secara berkala
- l. Nilai adalah satuan yang dipergunakan untuk menghitung pembagian royalty yang diberikan kepada setiap karya yang terdaftar berdasarkan ketentuan yang ditetapkan KCI.

- m. Frekwensi adalah satuan yang menunjukkan berapa kali sebuah lagu digunakan.
- n. UPA / *Unlogged Performance Allocation* adalah ssuatu alokasi yang prosentasenya ditentukan oleh badan pengurus KCI untuk mengkompensasi atas lagu-lagu yang tidak dicatat pada program return, namun dalam kenyataannya bisa saja digunakan.
- o. Subyek distribusi adalah orang/pihak maupun badan hukum dalam kedudukannya selaku anggota maupun pihak yang berafiliasi, yang berhak menerima bagian / *Share* dari pengumuman, penyiaran, pertunjukkan atau memperbanyak karya musik jika karyanya dipergunakan.
- p. *Confederation of societies of Authors and Composers (CISAC)* adalah organisasi internasional yang beranggotakan *Collecting Society* se-dunia yang memiliki konvensi tersendiri mengenai Distribusi Royalti pemakaian karya musik.

Berkaitan dengan hak mengumumkan yang secara kolektif ditangani oleh KCI, yang menjadi Subyek Distribusi Royalti, dalam bidang musik dan/atau lagu, pemegang hak cipta sebagai subyek distribusi atau para pihak yang berhak menerima bagian dari perolehan hak mengumumkan yang dipungut oleh KCI, Pasal 2 Peraturan Distribusi Royalty Karya Cipta Indonesia (Khusus Hak Mengumumkan) adalah :

- 1) Komposers, adalah orang yang menciptakan melodi dari karya tersebut.
Ciptan melodi tersebut lahir atas inspirasi komposer berdasarkan

kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

- a) jika melodi tersebut diciptakan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, maka mereka disebut sebagai komposer. Menurut Ketentuan-ketentuan di dalam skala distribusi, bagian/*share* komposer dari perolehan hak mengumumkan ciptaan yang dipungut KCI akan dibagi rata diantara ko-komposer tersebut, kecuali diperjanjikan lain.
- b) Seseorang yang dalam menciptakan musik memanfaatkan melodi karya musik yang dilindungi hak cipta milik komposer lain, maka ia dapat dianggap sebagai ko-komposer atau *arranger* bergantung pada besarnya kontribusi yang ia berikan. Untuk itu diperlukan izin tertulis dari pencipta atau pemegang hak cipta yang berwenang mengeluarkan izin tersebut. Dalam hal melodi karya musik asli yang dimanfaatkan adalah *Public Domain*, izin komposer asli tidak diperlukan, dengan ketentuan bahwa si Komposer/*Arranger* yang bersangkutan harus mencantumkan nama pencipta melodi asli tersebut.
- c) Jika si komposer di dalam menciptakan karya-karya musik memanfaatkan lirik yang dilindungi hak cipta, untuk itu ia harus meminta izin tertulis dari pencipta lirik/pemegang hak cipta lirik. Dalam hal lirik yang dipergunakan adalah *Public Domain*, dimana lirik tersebut tidak lagi dilindungi hak cipta kecuali hak moralnya, izin

pencipta lirik tidak lagi diperlukan dengan ketentuan bahwa si komposer yang bersangkutan harus mencantumkan nama pencipta lirik tersebut.

- 2) Lirikus, adalah orang yang menciptakan teks/lirik dari karya musik tersebut. Ciptaan lirik tersebut lahir atas inspirasi lirikus berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
 - a) jika lirik tersebut diciptakan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, maka mereka disebut sebagai ko-lirikus. Menurut Ketentuan-ketentuan di dalam skala distribusi, bagian/share lirikus dari perolehan hak mengumumkan ciptaan yang dipungut KCI akan dibagi rata diantara ko-lirikus tersebut, kecuali diperjanjikan lain.
 - b) Jika seorang lirikus di dalam menciptakan karya-karya musik memanfaatkan melodi karya musik yang dilindungi hak cipta, untuk ia harus meminta izin tertulis dari komposer/pemegang hak cipta musik. Dalam hal melodi karya musik yang dipergunakan adalah *Public Domain*, dimana melodi karya musik tersebut tidak lagi dilindungi hak cipta kecuali hal moralnya, izin koimposer tidak lagi diperlukan, dengan ketentuan si lirikus yang bersangkutan harus mencantumkan nama komposer tersebut.
 - c) Lirikus juga menerima bagian/*share* dari perolehan royalti yang dipungut KCI meski karya musik yang memiliki lirik ciptaannya digunakan tanpa menggunakan lirik.

3) *Arranger* (Penata Musik) adalah orang yang mengubah/menambah suatu karya musik ciptaan orang lain sampai ke tingkat tertentu atau menambah sedemikian rupa, sehingga dengan kontribusi kreatifnya karya musik tersebut diwarnai dimensi yang khas dan bersifat pribadi.

a) Jika arransemen tersebut diciptakan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, maka mereka disebut sebaga ko-arranger. Menurut ketentuan-ketentuan di dalam skala distribusi, bagian/*share* *arranger* dari perolehan hak mengumumkan ciptaan yang dipungut KCI akan dibagi rata diantara para ko-*arranger* tersebut.

b) Kegiatan-kegiatan yang tidak termasuk sebagai aransemen musik dan karya musik adalah :

- Koreksi pembetulan-pembetulan kesalahan tulis pada transkrip atau kegiatan-kegiatan serupa lainnya.
- Transposisi (menulis atau memainkan karya musik yang telah ada pada kunci/register yang berbeda)
- Simplikasi dari aransemen karya musik yang telah ada
- Perubahan-perubahan di dalam karya musik yang tidak menimbulkan dimensi yang khas yang bersifat pribadi..

c) Arranger hanya menerima bagian/*share* jika aransemennya benar-benar digunakan.

d) jika *arranger* memanfaatkan karya musik yang dilindungi hak cipta, ia harus meminta izin tertulis dari pencipta/pemegang hak cipta musik yang bersangkutan. Dalam hal karya musik yang dipergunakan adalah

Public Domain dimana karya musik tersebut tidak lagi dilindungi hak cipta kecuali hak moralnya, izin pencipta tidak lagi diperlukan, dengan ketentuan bahwa si arranger yang bersangkutan harus mencantumkan nama pencipta karya musik tersebut.

- e) bagian/*share arranger* untuk karya *public domain*, jika arrasemennya benar-benar digunakan, mendapat bagian yang sama dengan komposer
- 4) Pengadaptasi Lirik, adalah orang yang menciptakan lirik baru atau menterjemahkan lirik asli dari suatu karya musik yang diterbitkan kembali di wilayah Indonesia.
 - a) jika si pengadaptasi lirik menggunakan lirik yang dilindungi hak cipta. Untuk itu ia harus meminta izin tertulis dari pencipta/pemegang hak cipta. Dalam hal lirik yang dipergunakan adalah *Public Domain*, dimana lirik tersebut tidak lagi dilindungi hak cipta kecuali hak moralnya. Izin pencipta lirik tidak lagi diperlukan, dengan ketentuan bahwa si komposer yang bersangkutan harus mencantumkan nama pencipta lirik tersebut.
 - b) Pengadptasi lirik hanya menerima bagian/*share* jika adaptasi lirik tersebut benar-benar dipergunakan.
- 5) Publisher, adalah pihak maupun badan hukum yang diberi kuasa oleh pencipta untuk menjadi pemegang hak cipta dan oleh sebab itu memiliki kepentingan terhadap seluruh hak cipta musik tersebut kecuali hak untuk memungut *performing right*.

- a) Dalam situasi dimana pencipta tidak memberikan kuasa ke pihak lain maka dirinya sendiri adalah *Self-Publisher* (melakukan kegiatan publishing sendiri).
- b) Kegiatan-kegiatan di bawah ini merupakan hak cipta yang dipegang *publisher* berdasarkan kuasa pencipta dan bertindak atas nama dan untuk kepentingan pencipta, yaitu :
 - 1) Penerbitan dan perbanyakan karya musik dalam bentuk apapun termasuk penerbitan buku musik/lembaran transkripsi, penggandaan mekanik kedalam bentuk pita rekaman, piringan hitam, CD, VCD, DVD dan bentuk-bentuk lain yang berkembang di kemudian hari, merekam musik untuk ilustrasi film, maupun memberi izin kepada pihak lain untuk melakukan hak-hak tersebut.
 - 2) Memberi izin kepada pihak lain yang hendak mengubah melodi karya musik tersebut.
 - 3) Memberi izin kepada pihak lain yang hendak mengadaptasi lirik karya musik tersebut.
 - 4) Memberi izin kepada pihak lain untuk memperbanyak dan menerbitkan karya musik tersebut di negara lain.
- c) Seseorang/pihak atau badan hukum tidak dapat dikatakan sebagai *publisher* hanya karena memiliki hak menerbitkan dan memperbanyak musik secara mekanik atau sinkronisasi saja.

- d) Jika dua pihak atau lebih secara bersama-sama menerbitkan karya musik maka mereka disebut sebagai *sub-publisher*. Menurut ketentuan-ketentuan di dalam skala distribusi, bagian/share publisher dari perolehan hak mengumumkan ciptaan yang dipungut KCI akan dibagi rata diantara para *sub-publisher* tersebut.
 - e) Publisher yang telah memperoleh hak/hak lisensi penerbitan untuk suatu wilayah khusus di dalam kedudukannya sebagai publisher pengganti (*sub-publisher*) berdasarkan kontrak dengan publisher aslinya, dianggap sebagai publisher yang berhak menerima bagian/share jika karya musik tersebut dipergunakan.
 - f) Ketentuan dalam huruf e diatas juga berlaku, dalam hal publisher asli tidak berdomisili di Indonesia.
- 6) Lembaga asing anggota CISAC, bagian/*share* dari pemakaian karya asing diberikan KCI kepada *Collecting Society* negara yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a) yang diserahkan adalah bagian/*share* dari pemakaian karya musik yang merupakan *Repertire Colledting Society* bersangkutan
 - b) untuk karya asing yang diterbitkan kembali di Indonesia, royalty yang dibagi hanya dari pemakai karya musik (*Users*) yang membayar royalty. Diperhitungkan dengan bagian/*share* sub *publisher*/pemegang lisensi penerbitan di Indonesia, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam skala distribusi.

- c) KCI tidak melakukan distribusi langsung dengan subyek distribusi yang berkepentingan dengan hak cipta karya musik asing yang diumumkan dan atau diperbanyak di Indonesia, kecuali dengan lembaga asing/badan pengumpul anggota CISAC.

Prinsip-prinsip dasar disitribusi royalty yang dilakukan oleh KCI, diatur dalam ketentuan Pasal 3 angka 8 Peraturan Distribusi Royalti Karya Cipta Indonesia (Khusus Hak mengumumkan), sebagai berikut :

- (a) Royalti dibagi hanya dari pemakai karya musik (User) yang membayar royalty
- (b) Royalty dibagi berdasarkan laporan penggunaan karya musik (*Losheet*)
- (c) Royalty dibagikan berdasarkan kelompok pemakaian musik (*Pool*) distribusi
- (d) Royalty dibagikan hanya untuk anggota KCI dan Anggota Badan Pengumpul Royalti anggota CISAC
- (e) Royalti dibagi sesuai dengan data karya musik (*Repertoire*) yang didaftarkan oleh anggota KCI dan atau didaftarkan oleh Badan Administrasi Pengumpul Royalti anggota CISAC
- (f) Royalty dibagi habis atas pemakaian karya musik dalam suatu kurun waktu.

Tabel 14
SKALA DISTRIBUSI KARYA MUSIK BUKAN MILIK UMUM

Tanpa Publisher			%			Dengan Publisher		
Komposer	12 / 12	100				Komposer	8 / 12	67
						Publisher	4 / 12	33

Komposer	6 / 12	50	Komposer	4 / 12	34
Lirikus	6 / 12	50	Lirikus	4 / 12	33
			Publisher	4 / 12	33

Komposer	11 / 12	92	Komposer	7 / 12	59
Arranger	1 / 12	8	Arranger	1 / 12	8
			Publisher	4 / 12	33

Komposer	5 / 12	42	Komposer	3 / 12	26
Lirikus	6 / 12	50	Lirikus	4 / 12	33
Arranger	1 / 12	8	Arranger	1 / 12	8
			Publisher	4 / 12	33

Komposer	6 / 12	50	Komposer	4 / 12	33
Lirikus	5 / 12	42	Lirikus	3 / 12	26
Arranger	1 / 12	8	Sub-Lirikus	1 / 12	8
			Publisher	4 / 12	33

Komposer	5 / 12	42	Komposer	3 / 12	26
Lirikus	5 / 12	42	Lirikus	3 / 12	25
Arranger	1 / 12	8	Arranger	1 / 12	8
Sub-Lirikus	1 / 12	8	Sub-Lirikus	1 / 12	8
			Publisher	4 / 12	33

SKALA DISTRIBUSI KARYA MUSIK UMUM (PUBLIC DOMAIN) :

Tanpa Publisher			Dengan Publisher		
Komposer PD & Lirikus PD	6 / 12	50	Komposer PD & Lirikus PD	4 / 12	34
Arranger	6 / 12	50	Arranger	4 / 12	33
			Publisher	4 / 12	33

Sumber : KCI

Di samping hak untuk mengumumkan pencipta atau pemegang hak cipta dan hak-hak terkait mempunyai hak untuk memperbanyak, yang

dimaksud dengan memperbanyak karya cipta adalah menambah suatu ciptaan, dengan perbuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan sesuatu ciptaan (Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002). Misalnya memperbanyak musik ke dalam bentuk kaset, Compact Disc, VCD atau bentuk-bentuk Phonogram seperti film, sinetron, video clip, memperbanyak musik ke dalam bentuk cetakan seperti majalah, buku, majalah atau media cetak lainnya.

KCI sejak tahun 1993 sebenarnya telah mewakili pencipta dalam memungut hak mereka di bidang hak memperbanyak atau lebih dikenal dengan *Mechanical Right*, 2 tahun ketinggalan jika dibandingkan dengan pengelolaan hak mengumumkan. Prinsipnya sama seperti hak mengumumkan, yaitu Pencipta memberikan kuasa kepada KCI. Kemudian KCI akan mewakili pencipta dengan memberi ijin (lisensi) jika karyanya hendak diperbanyak seperti dijadikan kaset, CD, VCD, DVD, dicetak dalam buku, majalah, digunakan untuk iklan atau sinetron dan lainnya kepada user / pengguna. User pada hak memperbanya (*Mechanical Right*) biasanya adalah Perusahaan Rekaman, Perusahaan Film, rumah Produksi, Advertising Agency, percetakan, dll.

Pemberian kuasa hak memperbanyak ke KCI tidak harus atas seluruh karya musik yang dimiliki oleh pencipta seperti dalam hak mengumumkan, tetapi bisa sebagian atau bahkan satu buah karya pun akan diterima. Untuk wilayah pengelolaan pun demikian sebagai pencipta berhak menentukan KCI

mewakili untuk Indonesia saja atau seluruh dunia. Masa waktu kuasa pun hanya 2 (dua) tahun, diperpanjang secara otomatis jika tidak ada keberatan dari salah satu pihak. Sebagai biaya administrasi KCI akan memotong 10 % dari setiap royalty yang berhasil dikumpulkan dari hak memperbanyak akan didistribusikan kepada penciptanya empat (4) kali dalam setahun, yaitu pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober.

Satu perbedaan mendasar antara KCI dengan *Publisher*, yaitu KCI tidak memasarkan karya musik secara aktif kepada perusahaan rekaman atau user lainnya. Sementara *Publisher* wajib melakukan hal tersebut. Karena itu untuk urusan proteksi di luar negeri (internasional) KCI membuat perjanjian bilateral antara lembaga kolektif di setiap negara. Sehingga dengan sendirinya apabila seorang pencipta kuasakan karyanya ke KCI secara otomatis juga akan diproteksi jika dieksploitasi dinegara lain, seperti Malaysia, singapura dan sebagainya.

Pengguna musik dalam bentuk perbanyakan, termasuk didalamnya: Stasiun Pemancar Televisi dan Radio (dengan/tanpa kabel), perusahaan rekaman, pembuat iklan, pembuat film, pengelola musik yang ditransmisikan secara digital (*website, ringtone, online rado dsb*).

Berhubungan dengan para pengguna karya musik atau user, KCI biasanya hanya mengurus masalah harga, materi perjanjian, kontrol laporan penjualan dan perhitungan royalty. Izin yang diberikan KCI kepada user harus spesifik dan jelas, dituangkan dalam perjanjian dengan batas waktu tertentu. Sebagai gambaran bagaimana KCI menghitung besarnya kompensasi izin

memperbanyak karya musik, berikut ini ditampilkan tiga buah table masing-masing untuk Kaset, CD, VCD.

Tabel. 15
Contoh Perhitungan Royalti Kaset KCI
A. MUSIK KASET (MC)

KETERANGAN	JUMLAH
Harga Eceran	15.000,00
Minus Diskon Agen (28%) (d disesuaikan dengan kelaziman)	4.200,00
Minus Sticker pajak	800,00
Nilai Harga Dasar (Base price)..... (PPD)	10.000,00
Tarip Royalti MC untuk 10 lagu: 5,4% x Harga Dasar	540,00
Rolayti per lagu (pro rata): 1/10 bagian	54,00
Jumlah Unit Minimum (Standar lagu umum): 10.000 unit x Royalti per lagu	540.000,00

Sumber : KCI

Tabel. 16
Contoh Perhitungan Royalti CD KCI
B. COMPACT DISC (CD)

KETERANGAN	JUMLAH
Harga Eceran	35.000,00
Minus Diskon Agen (28%) (d disesuaikan dengan kelaziman)	9.800,00
Minus Sticker pajak	2.000,00
Nilai Harga Dasar (Base price)..... (PPD)	23.200,00
Tarip Royalti CD untuk 10 lagu: 5,4% x Harga Dasar	1.252,80
Rolayti per lagu (pro rata): 1/10 bagian	125,28
Jumlah Unit Minimum (Standar lagu umum): 3.000 unit x Royalti per lagu	375.840,00

Sumber : KCI

Tabel. 17
Contoh Perhitungan Royalti VCD KCI
C. VIDEO COMPACT DISC (VCD)

KETERANGAN	JUMLAH
*Selain Lisensi Mechanical diperlukan juga diperoleh lisensi Synchronization untuk produk rekaman audiovisual. KCI menentukan jumlah (lump sum) Minimum untuk Synchronization (standar lagu umum) @ Rp. 1.000.000 / lagu	
Harga Eceran	45.000,00
Minus Diskon Agen (28%) (d disesuaikan dengan kelaziman)	12.600,00
Minus Sticker pajak	2.000,00
Nilai Harga Dasar (Base price)..... (PPD)	30.400,00
Tarip Royalti VCD, untuk 10 lagu: $5,4\% \times \text{Harga Dasar}$	1.641,60
Rolayti per lagu (pro rata): $1/10$ bagian	164,16
Jumlah Unit Minimum (Standar lagu umum): 3.000 unit x Royalti per lagu	492.480,00
Biaya Synchronization (standar lagu umum) Rp. 1.000.000 per lagu	1.492.480,00

Sumber : KCI

KETERANGAN:

- PPD = Harga Eceran dikurangi Komisi Agen (*28%)
- Base Price = PPD dikurangi Sticker Pajak dan Dana ASIRI
- Sticker pajak untuk: MC = Rp. 800 / unit; CD = Rp. 2000 / unit; VCD = Rp. 2000 / unit

Untuk izin penggunaan karya musik di media cetak atau majalah yang dikenal dengan *Printing Right* adalah 10 % dari harga jual untuk setiap karya musik permajalah (buku). Sedangkan untuk pemakaian karya musik dalam iklan biasanya KCI masih melibatkan penciptanya untuk menentukan nilai royaltinya.

Jika dilihat dari table 4, daftar pengumpulan royalty hak memperbanyak 1993-2000 KCI terlihat bahwa hasil pengumpulan sejak 1995 mengalami peningkatan setiap tahunnya kecuali pada tahun 1998.

Tabel.18
Daftar pengumpulan Royalti hak memperbanyak 1993-2000

Tahun	Total Pengumpulan
2000	711.525.850
1999	343.084.256
1988	169.148.832
1997	250.902.170
1996	207.357.195
1995	64.475.575
1994	141.773.000
1993	26.635.000
Total	1.913.901.878

Sumber : KCI

Per Oktober 2001, nama-nama besar pencipta berikut ini telah mempercayai KCI dengan memberi kuasa kepada KCI atas karya-karya mereka, antara lain : Rinto Harahap, A.T Mahmud, Katon Bagaskara, Sam Bimbo, Ibu Kasur (Alm), Ismail Marzuki (Rachmi Aziah), Ibu Sud, Candra darusman, A. Rafiq, Doel Sumbang, dan lain-lain. Sementara itu dari luar negeri Hary Fox Agency sebuah Asosiation Publishing Independen besar di dunia telah mempercayai KCI dengan menguasai repertoire asing mereka ke KCI. Sehingga di wilayah Indonesia KCI-lah yang berhak memberikan izinnya (Daftar Lihat dalam Lampiran).

Prinsipnya KCI membantu pencipta agar dalam berkarya tidak perlu diganggu dengan kegiatan ekstra diatas, sehingga akan muncul karya-karya yang bagus dan bermutu disamping hak ekonominya tidak akan hilang.

Kaitannya dengan dua hal yang telah dijelaskan di atas (Hak mengumumkan dan memperbanyak) siapa yang wajib memiliki izin ? bagi

mereka-meraka (Pengguna Musik) yang memutar atau mempertunjukkan musik dengan atau tanpa syair yang terdapat didalamnya sedemikian rupa sehingga dapat didengar oleh orang lain baik dalam bentuk musik latar (*Background Music*) yang diputar dalam bentuk Kaset, Piringan Hitam, Compac Disc, VCD. Televisi atau perangkat bunyi (*phonogram*) lainnya maupun bdalam bentuk *Live Music*, *Discotheque*, karaoke, *Video Screen* untuk menarik pengunjung atau memberi kenyamanan para pengunjung pada kegiatan-kegiatan yang bersifat komersial wajib meminta izin dan sebagai konsekuensi logisnya membayar royalty kepada si pencipta atau pemegang hak cipta nya.

Pengguna musik dalam bentuk memperbanyak maupun mengumumkan musik, adalah pihak yang wajib meminta izin. Izin tersebut dapat diperoleh secara langsung kepada pencipta atau penerima hak cipta atau secara kolektif melalui penerbit music (*Music Publishers*) atau melalui *Collective Management Organization* (CMO).

Tabel 19

**HKTISAR PENGUMPULAN & DISTRIBUSI ROYALTI UNTUK TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2001 & 2000**

	2001	2000
Pengumpulan Royalti:		
Hak Mengumumkan	5,197,295,670	3,947,673,679
Hak Menggandakan	424,973,633	711,525,850
Royalti dari Luar negeri	281,936,670	368,708,832
	5,904,205,973	5,027,908,361
Beban Administrasi		
Hak Mengumumkan	1,739,762,766	1,171,353,812
Hak Menggandakan	42,497,363	77,565,569
Royalti dari Luar Negeri	14,096,834	18,435,442
	1,796,356,963	1,267,354,823
Dana Sosial dan Budaya		
Hak Mengumumkan	345,753,290	277,631,986
Jumlah pengumpulan Royalti tahun berjalan	3,762,095,720	3,482,921,552
Royalti yang terkumpul tahun lalu	1,209,525,676	814,912,480
Redistribusi Royalti yang belum diklaim	797,336,776	767,583,788
Pendapatan Bunga	23,956,024	35,024,098
Dikurangi User tutup & Penghapusan Piutang	(264,551,000)	(217,026,988)
	1,766,267,476	1,400,493,378
Jumlah Royalti yang tersedia untuk didistribusikan	5,528,363,196	4,883,414,930
Distribusi Royalti selama tahun berjalan	4,038,676,222	3,673,889,254
Royalti yang akan didistribusikan tahun berikutnya	1,489,686,974	1,209,525,676
	5,528,363,196	4,883,414,930
Distribusi Royalti selama tahun berjalan		
Distribusi ke anggota KCI		
Hak Mengumumkan	1,804,674,314	1,628,938,962
Hak Menggandakan	208,827,658	201,650,052
	2,013,501,972	1,830,589,014
Distribusi ke penulis lagu luar negeri		
Hak Mengumumkan	774,088,299	548,718,470
Hak Menggandakan	173,648,613	432,310,229
	947,736,912	981,028,699
Provisi untuk klaim Royalti	1,077,437,338	862,271,541
	4,038,676,222	3,673,889,254
Sumber : KCI		

Laporan Ikhtisar pengumpulan dan disitribusi royalti (telah diaudit oleh Kantor Akuntan Muhammad Sofwan) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2001 dan 2002 yang dilakukan KCI mengalami peningkatan dalam hal jumlah royalti yang dapat dikumpulkan, hal demikian berarti sudah ada peningkatan kesadaran para users.

Salah satu upaya penegakan hukum terhadap hak mengumumkan yang dilakukan penyidik POLRI, Direktorat Reserse Polda Metro Jaya (kerjasama dengan KCI, Kanwil Pariwisata DKI, Kanwil Kehakiman dan HAM DKI), Harian Sinar Pagi, Rabu, 10 September 1997 adalah penyegelan terhadap 3 (tiga) tempat karaoke di Jakarta Barat yaitu Karaoke Monggo Mas, Karaoke Sydney 2000, dan Karaoke Barcelona, karena selama 3 (tiga) tahun tidak membayar royalti. Harian Kompas, Rabu 10 September 1997, penyegelan atas perangkat dan peralatan musik di ketiga tempat karaoke tersebut dilakukan oleh Polda Metro Jaya setelah melalui proses panjang dan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, yaitu melalui prosedur pemanggilan dan peringatan. Penyegelan dilakukan sebagai upaya penegakan hukum, karena tiga tempat karaoke itu tidak memiliki lisensi.

Pelanggar Hak Cipta Divonis Setahun Penjara Bandung, Kompas 20 September 2002. Ny Delia Wijaya (43), tersangka kasus pelanggaran hak cipta, dijatuhi vonis hukuman penjara selama setahun oleh Pengadilan Negeri (PN) Kota Bandung, Kamis (19/9). Selain itu, Delia dikenai denda Rp 100.000 atau dapat diganti dengan sebulan penjara. Sidang itu dihadiri sejumlah artis yang tergabung dalam Yayasan Karya Cipta Indonesia

(YKCI), di antaranya Rinto Harahap, Benny Panjaitan, dan Obbie Messakh. Dalam sidang yang diketuai Ayub O Taulo itu, majelis hakim memberi waktu seminggu kepada terdakwa untuk mengajukan banding. Setelah mendengar putusan pengadilan, Rinto Harahap menyatakan puas atas putusan pengadilan itu. Karena selama ini belum pernah ada kasus pelanggaran hak cipta yang menetapkan vonis penjara kepada pelaku, yang sudah ada hanya hukuman percobaan. Pihak KCI melihat masih ada 18 tempat karaoke di Bandung yang diduga melanggar hak cipta. Dalam kasus itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Manik Ara mendakwa Delia, pemilik karaoke "DINDA" yang terletak di Jalan Sudirman, Bandung, telah melanggar hak cipta. Menurut dia, sejak tahun 1997, terdakwa sengaja menyiarkan memamerkan, dan menjual kepada umum barang hasil pelanggaran hak cipta. Lagu-lagu yang diputar itu sudah dalam bentuk Video Compact Disc (VCD). Dari setiap pengunjung, Delia menerima imbalan sebesar Rp 21.000.

2. BENTUK-BENTUK PELANGGARAN TERHADAP HAK PENCIPTA atas KARYA LAGU dan/atau MUSIK

Pada tahun 1998, tepatnya pada tanggal 1 Juli, *Indonesian Composers and Arrangers Assosiation*, telah berhasil merumuskan kriteria pelanggaran di bidang karya cipta lagu dan / atau musik. Rumusan kriteria pelanggaran atau

penjiplakan di bidang lagu dan / atau musik dimaksud melalui simposium, yaitu Simposium Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Musik. Simposium dimaksud diselenggarakan oleh pengurus PAPPRI (Peratuan Artis Pencipta lagu dan produser rekaman Indonesia) yang diketuai oleh Enteng Tanamal, dilaksanakan dengan Ketua Pelaksana Tb. Sadikin Zuchra, Ketua Tim Perumus oleh Frans Haryadi dengan anggota : N. Simanugkalit, Tri Sutji kamal, A.Riyanto, Januar Ishak, Tarida Panjaitan Hutahuruk, Candra Darusman.

Adapun kesepakatan tentang kriteria pelanggaran hak cipta yang digolongkan dalam penjiplakan dipakai beberapa ukuran. Ukuran-ukuran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Motif dan karakter

Motif adalah ungkapan gagasan pokok / asli dari si komponis / pencipta lagu yang menjadi titik tolak pembuatan tema dan seluruh musik.

Musik berwujud figure melodic atau ritmik yang bersifat potensial dan mandiri. Dalam sebuah komposisi musik bisa terdapat lebih dari satu motif.

Karakter yang dimaksud adalah sifat atau cirri-ciri khas yang terdapat dalam motif tersebut.

2. Tema

Pengembangan motif berupa melodi yang akan menjadi material pokok dalam pengembangan komposisi; tema adalah kompleks gagasan pokok.

Dalam sebuah komposisi musik bisa terdapat lebih dari satu tema.

3. Struktur Melodi

Susunan nada yang diakibatkan oleh konstruksinya

4. Jumlah Ruas

Ruas adalah ruang antara dua garis vertical yang menyatakan pembagian metrik dari musik.

5. Lirik / teks lagu

Syair sebuah lagu.

Untuk mengukur batasan apakah lagu dan / atau musik itu melanggar hak cipta, *Indonesia Composers and Arrangers Assosiation* merumuskan kriteria pelanggaran hak cipta di bidang lagu dan/atau musik. Adapaun pelanggaran atau penjiplakan lagu dan atau musik yang melanggar hak cipta adalah, apabila sebuah komposisi musik dan/atau lagu :

- a. Motif dan karakternya sama dengan motif dan karakter komposisi musik/lagu yang sudah ada, dan/atau ;
- b. Temanya sama dengan tema komposisi musik/lagu yang sudah ada/diumumkan, dan/atau ;
- c. Struktur melodinya mengandung lebih dari 10% (sepuluh persen) secara berturut-turut melodi asli komposisi musik/lagu yang sudah ada/diumumkan, dan/atau ;
- d. Mempunyai kesamaan lebih dari 10% (sepuluh persen) jumlah ruas secara berturut-turut dari komposisi musik/lagu yang sudah ada/diumumkan, dan/atau ;

- e. Liriknya lebih dari 10% (sepuluh persen) secara berturut-turut sama dengan lirik komposisi musik/lagu yang sudah diumumkan.

Dalam penerapan perlindungan hak cipta tidak selamanya berjalan tanpa hambatan, bahkan sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terutama oleh pemegang hak cipta, yaitu berupa tindakan pelanggaran hak cipta dengan berbagai bentuk. Bentuk pelanggaran hak cipta yang sebagian besar merupakan sasaran pelanggaran atau pembajakan adalah lagu dan/atau musik termasuk karya rekaman suara atau gambar pada pita kaet, VCD dan sejenisnya. Pembajakan semacam ini sudah dikenal dalam masyarakat umum, karena sering terjadi dan mudah dilakukan dengan adanya kemajuan teknologi di bidang perekaman. Pembajakan terungkap di Batam, perusahaan (pabrik) pembuat CD dan VCD yang berhasil disita oleh penyidik Polri bekerjasama dengan ASIRI, ASIREVI dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, berupa barang bukti antara lain : 70 Kardus masing-masing berisi 1000 (seribu) VCD; 2 (dua) mesin pemanas biji plastik, 1 (satu) mesin pencetak, 1 (satu) mesin sablon CD, dan 35 (tiga puluh lima) kaleng bahan baku biji plastik seberat 725,75 kilogram. Pabrik ini diduga telah memproduksi VCD bajakan yang terdiri dari film dan lagu-lagu barat, lagu Indonesia, selama 2 (dua) tahun.¹²⁵

Selain bentuk tindak pidana pelanggaran hak cipta karya seni lagu dan/atau musik berupa penggandaan, peniruan atau pembajakan, juga adanya bentuk tindak pidana atas hak untuk mengumumkan terhadap lagu dan/atau

¹²⁵ Hasil wawancara dengan Adi Supanto, Op.Cit.

musik, dalam permohonan izin performing right yang tidak diindahkan oleh para pemakai atau *users*.¹²⁶

Pelanggaran hak cipta yang lain menurut Adi Supanto, adalah pembuatan lagu atau musik yang mendompleng ketenaran lagu dan atau musik yang sudah dikenal di dalam masyarakat, dan diberikan tanda palsu pada lagu tersebut, sehingga judul lagu maupun melodi lagu dibuat untuk mengelabui supaya orang percaya dan menerima bahwa buah hasil kesenian itu benar buatan orang yang tandanya ditaruh pada hasil sebuah hasil kesenian tersebut. Disamping itu, ada bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pencipta yang satu terhadap pencipta yang lain yaitu dengan tidak menepati kesepakatan diantara mereka dalam suatu “perjanjian pembuatan lagu”, berupa penggantian pencantuman nama penulis syair dalam suatu hasil perekaman album musik. Hal ini menyangkut pelanggaran hak moral dari pencipta itu sendiri yang seharusnya tetap mencantumkan nama pencipta teks atau syair dengan nama pencipta melodi dan teks atau lirik sebenarnya.¹²⁷

Bentuk pelanggaran hak cipta penggunaan lagu, dapat berupa penayangan lagu yang disiarkan di stasiun televisi sebagai lagu tema pada sinetron tanpa izin penciptanya¹²⁸, hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak mengumumkan yang dimiliki pencipta.

Merebaknya pelanggaran hak cipta atas karya lagu dan/atau musik dengan berbagai bentuk baik pembajakan, peniruan, dan perekaman atau

¹²⁶ Hasil wawancara dengan pihak KCI

¹²⁷ Hasil wawancara dengan Adi Supanto, Op.Cit.

¹²⁸ Surat Pengaduan Pencipta Lagu “Kubawa Sepi Ini” kepada Ketua PAPPRI, tanggal 11 Desember 1997.

penggunaan dalam kegiatan bisnis oleh para pemakai atau users tanpa izin oleh pencipta atau pemegang hak cipta dan pemegang ciptaan terhadap hak-hak terkait, merupakan indikasi bahwa tingkat pemahaman akan arti dan fungsi hak cipta serta tingkat kesadaran hukum untuk menghormati hak cipta atas hasil suatu karya intelektual masih memprihatinkan.

Salah satu ciri yang menonjol dalam kasus pembajakan adalah bahwa tindakan pembajakan selalu dilakukan terhadap album-album yang laku dipasaran. Sehingga kerugian yang ditimbulkan terhadap *Mechanical Right* pencipta khususnya dan industri rekaman musik sangat besar. Untuk mengedarkan sebuah CD musik Original perlu biaya yang besar, diantara kepada : Pencipta, Penyanyi, Pemusik, Studio Rekaman, Media (dalam bentuk Kaset, CD, VCD), Promosi, Distributor, Pajak, Figuran dalam pembuatan Video Klip. Sedangkan terhadap barang bajakan tidak perlu mengeluarkan biaya sebesar itu.¹²⁹ Dengan demikian terhadap barang bajakan menurut Adi Supanto harganya lebih murah, dalam cover stiker pajak hanya distempel langsung dan cover lebih jelek.¹³⁰

Tabel 20
Daftar Organisasi dan Tersangka
Pelanggaran di Bidang Hak Cipta Musik dan Rekaman Suara

No.	Tanggal Operasi	Tempat Kejadian	Nama Tersangka	Posisi Kasus dan Barang Bukti	Proses
1	2	3	4	5	6
I	1984	PN Jakarta Utara	Fam Ing Tjun, Pemilik PT Irama Mas	Penjiplakan Lagu Apanya Dong Milik Titik puspa, Milik PT	Divonis 6 (enam Bulan Penjara

¹²⁹ Wawancara dengan Adi Supanto, Op.Cit.

¹³⁰ Ibid.

				D.D. Record	
II	1987	PN Jakarta Pusat	Asiong	Kaset bajakan	Divonis 8 (delapan) bulan penjara
III	Tahun '94				
1.	13 Agust	Darmo, Surabaya	Heri Kuncoro dan Sholeh	Alat cetak offset dan label kaset	Dituntut 5 tahun dan 3 tahun penjara
2.	13 Agust	Pradah, Surabaya	Yanto Kuncoro	Kaset Bajakan dan kaset kosong serta alat perekam	Dituntut 5 tahun penjara
3.	15 Agust	Ps.Johar, Semarang	Basri, Warsi Fauzi dan Ismanto	-	Pembinaan, pengembangan ke Jakarta, kaset ekonomi tanpa stiker
4.	4 Nop	Padang	Pedagang kaki lima Karminda, Jusrial	Kaset bajakan, kaset tanpa stiker dan alat perekam	Pembinaan
5.	29 Nop	Tanah Pasir	Chaerul dan Tuty yana	Kaset bajakan dan alat rekam	Diproses di Kejati DKI Jaya
IV.	Tahun '95				
6.	8 Feb	Sampang, Madura	Ny.Yenny	Compact Disc lagu barat dan seleksi	Perkara diproses di Polda Jatim
7.	25 Sept	Roxy Mas, Jakarta, Jl.Pasar, Jl. Kembang Raya	Suyanto Sadeli dan Phang Tjan Fung, M.Basri	Kaset barat dan Mandarin, alat perekam	Wajib lapor tidak dilanjutkan
8.	28 Apr 96	Kompleks LIK Bugangan Baru Semarang	Hairudin	Alat rekam dan kaset	Sidang, Vonis
9.	15 Mei	Depok	Mamat	Alat rekam dan kaset	Dalam pembinaan
10.	15 Agt 94	-	Panggilan Polisi kepada toko Champion, Son jaya JST dan Lucky	-	Pembinaan
11.	7 Okt 94	Pasar Tangerang	Lukman	-	Pembinaan, dilepas setelah membuat pernyataan

12.	14 Okt 94	Ps. Blok M, ps. Minggu, JakSel	Pedagang kaki lima	-	Pembinaan, dilepas setelah membuat pernyataan
13.	27 Okt 94 4 Nop 94	Padang	Pedagang kaki lima	-	Pembinaan
14.	9 Agt 94	Petojo Melintang	Hendra B. alias Kim Siong dan hadi Supeno alias Wawa	-	Tidak dilanjutkan, kurang alat bukti
15.	30 Nop 94	Kemayoran Jakarta	Ny. Dewi	Kaset bajakan dan alat perekam	Diproses di Kejati DKI Jaya
V	11 Januari 2000	PN Jakarta Pusat	Flower Sound	Wanprestasi terhadap Mechanical Right dan Hak Moral yang dimiliki A. Rafiq	Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 40.000.000,-

Sumber data: BPHN Departemen Kehakiman RI

3. HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK PENCIPTA atas KARYA LAGU dan/atau MUSIK

Dalam melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta lagu dan/atau musik, tidak hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum baik POLRI, Jaksa, maupun Hakim, tetapi juga melibatkan berbagai pihak yang terkait seperti : Departemen Kehakiman, dan Hak Asasi manusia, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Organisasi Profesi Hak Cipta, Lembaga Swadaya Masyarakat dan anggota

masyarakat itu sendiri. Menurut Adi Supanto, upaya penegakan hukum merupakan upaya terakhir setelah upaya-upaya lain dilaksanakan yaitu :¹³¹

- a) Pengaturan perundang-undangan di bidang hak cipta yang jelas;
- b) Adanya kesamaan persepsi diantara aparat penegak hukum mengenai arti, sifat dan fungsi hak cipta;
- c) Sosialisasi perundang-undangan hak cipta itu, sehingga menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
- d) Administrasi pelayanan hak cipta yang tertib, baik oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan intelektual maupun Organisasi Profesi Hak Cipta;
- e) Peningkatan taraf hidup masyarakat, sehingga terbebas dari krisis ekonomi.

Hambatan-hambatan dalam upaya mengatasi banyaknya terjadi pelanggaran hak cipta menurut Adi Supanto¹³², adalah hambatan yang diakibatkan oleh faktor-faktor internal dan eksternal.

Hambatan-hambatan karena faktor internal diantaranya adalah :

- a. minimnya ketersediaan dana sehingga operasi di lapangan kurang dapat maksimal dan teratur dilakukan karena
- b. Belum maksimalnya koordinasi masing-masing instansi terkait dengan pihak berwajib, sehingga operasi ke lapangan masih sering dilakukan sendiri-sendiri.

Hambatan-hambatan karena faktor eksternal diantaranya, adalah :

¹³¹ Wawancara dengan Adi Supanto, Op.Cit.

¹³² *Ibid.*

- a. Kondisi masyarakat yang ingin secara mudah dan cepat memperoleh uang dengan barang bajakan, kemampuan daya beli masyarakat yang masih rendah sehingga lebih memilih barang bajakan dengan harga murah dengan kualitas yang tidak jauh berbeda dengan yang original.
- b. Kemajuan teknologi yang sangat cepat, mempermudah manusia untuk untuk meniru tanpa melalui prosedur yang resmi.
- c. Peredaran barang bajakan sangat rapi, sehingga mempersulit intansi dan aparat terkait untuk memberantas sampai ke akar-akarnya.

Setiap pelanggaran hak cipta adalah kejahatan. Terhadap ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta atau hak-hak terkait serta alat-alat yang digunakan melakukan tindak pidana tersebut dirampas untuk negara guna dimusnahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 Undang-undang hak cipta.

B. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian “Penerapan Undang-Undang Hak Cipta Terhadap Perlindungan Hukum Pencipta atas Karya Cipta Lagu dan / atau Musik”. Perlindungan hukum bagaimanakah yang telah diberikan kepada Pencipta dalam penerapan Undang-undang hak Cipta di bidang lagu dan/atau musik, Bentuk-bentuk pelanggaran yang ditemui dalam rangka perlindungan hukum Hak Cipta terhadap pencipta di bidang lagu dan/atau musik, Bagaimana Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta atas karya lagu dan/atau musik ? Maka dapat dibahas atau dianalisa sebagai berikut :

1. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA MUSIK dan atau LAGU

Isu-isu tentang *Intellectual Property Right* menjadi sangat menarik terutama dalam industri dan perdagangan internasional. *Intellectual Property Rights* mempunyai aspek ekonomis yang menempati posisi strategis, tidak jarang *Intellectual Property Rights* dalam hubungan antar bangsa bisa memberikan warna politik suatu negara yang dituju. Penelitian yang diadakan *Stichting voor Economische Onderzoek (SEO)* Universitas Amsterdam pada tahun 1993 menunjukkan bahwa industri hak cipta bukan saja meningkatkan

PDB tetapi juga menambah angkatan kerja nasional. Penelitian lain membuktikan nilai tambah industri hak cipta diperkirakan pada tahun 1989 berjumlah duapuluh miliar gulden dan angkatan kerja yang tertampung dalam industri ini berjumlah 4,6% dari seluruh angkatan kerja. HaKI senantiasa terkait dengan persoalan perekonomian suatu negara.¹³³

Salah satu bidang di dalam HaKI adalah Hak Cipta. Hak cipta timbul dari hasil karya budaya manusia dalam bidang ilmu seni dan sastra. Untuk melahirkan suatu karya cipta, maka pencipta selalu akan mengeluarkan tenaga, waktu, pikiran dan biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan memiliki nilai. Apalagi ditambah adanya manfaat yang dapat dinikmati, karya-karya seperti itu memiliki nilai ekonomi. Karena adanya nilai, terutama nilai ekonomi itulah kemudian timbul konsepsi kekayaan (*property*) terhadap karya-karya intelektual tersebut.

Pengaturan tentang hak cipta mengalami berbagai perubahan untuk disesuaikan dengan TRIPs, konvensi Berne. Bagi Indonesia yang ikut serta dalam pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi anggota dalam *Agreement the World Trade Organization* (persetujuan

¹³³ *Op.Cit.*, Edi Damian *Hukum Hak Cipta menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*, *Op.Cit.*, hal.2-3. Baca juga: SEO-Report oleh Ms. J.T. Booy kepada Deputi Menteri Kehakim,an Mr. Aad Kosto tahun 1993 dalam *A Unitary European Copyright Law and The Economic Importance of Copyright*, karya tulis Herman Cohen Jehoram dalam buku *Audiovisual Media and Copyright in Europe*, Kluwer-Deventer, 1994, hal. 3.

Pembentukan Organisasi perdagangan dunia) yang mencakup pula *Agreement on Trade related Aspects of Intellectual property Rights* (Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual) selanjutnya disebut TRIPs pada tahun 1994 melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. disamping itu Indonesia juga meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* (Persetujuan Hak Cipta WIPO), melalui keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.

TRIPs yang merupakan salah satu perundingan yang ada didalam Putaran Uruguay, bertujuan untuk : meningkatkan perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan intelektual dari produk-produk yang diperdagangkan; menjamin prosedur pelaksanaan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang tidak menghambat kegiatan perdagangan; merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan Hak Atas kekayaan Intelektual; mengembangkan prinsip, aturan dan mekanisme kerja sama internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan dan pembajakan atas Hak atas Kekayaan Intelektual.

Dari hasil penelitian pengaturan perlindungan hukum bagi pencipta/pemilik hak cipta dan pemegang hak cipta atas lagu dan/atau musik berasal dari perjanjian internasional diantaranya perjanjian

Aspek Dagang Di Bidang Hak Kekayaan intelektual (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Right/TRIPS*) dan konvensi Berne serta aturan hukum dari produk hukum Pemerintah Indonesia baik berupa undang-undang, Peraturan pemerintah, keputusan Presiden maupun Ratifikasi beberapa Konvensi internasional, adalah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak cipta, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta beserta peraturan pelaksanaannya :

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 1986 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 tentang Dewan Hak Cipta;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 1989 tentang Penterjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, ilmu Pengetahuan, Penelitian, dan Pengembangan;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works;

- Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 19 tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO Copyrights Treaty;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 17 Tahun 1988 tentang Pengesahan Persetujuan mengenai Perlindungan Hukum secara timbal balik terhadap Hak Cipta atas karya rekaman suara antara Republik Indonesia dengan masyarakat Eropa;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 1989 tentang Pengesahan Persetujuan mengenai Perlindungan secara timbal balik terhadap hak cipta antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 38 Tahun 1993 tentang Pengesahan Persetujuan mengenai Perlindungan Hukum secara timbal balik terhadap Hak Cipta atas karya rekaman suara antara Republik Indonesia dengan Australia;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 56 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan mengenai Perlindungan Hukum secara timbal balik terhadap Hak Cipta atas karya rekaman suara antara Republik Indonesia dengan Inggris;
- Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan;
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.04..PW.03 Tahun 1988 tentang Penyidikan Hak Cipta;

- Surat Edaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01.PW.07.03 Tahun 1990 tentang Kewenangan Menyidik Tindak Pidana Hak Cipta.

Namun demikian dalam ketentuan peralihan pasal 74 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, dinyatakan bahwa dengan berlakunya undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di bidang hak Cipta yang telah ada pada tanggal berlakunya undang-undang ini, tetap berlaku selama tidak bertentangan atau belum diganti yang baru berdasarkan undang-undang ini.

Terhadap surat pendaftaran Ciptaan yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal berdasarkan Undang-undang nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 yang masih berlaku pada saat diundangkannya undang-undang ini, dinyatakan tetap berlaku untuk selama jangka waktu perlindungannya (Pasal 75 Ketentuan Peralihan Undang-undang nomor 19 Tahun 2002).

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2002. Undang-undang ini mulai berlaku 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diundangkan dan dengan berlakunya undang-undang ini, Undang-undang nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta, Undang-Undang nomor 12 tahun 1997 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dinyatakan tidak berlaku (Pasal 77 dan 78)

Latar belakang disahkannya Undang-undang nomor 19 tahun 2002 adalah, karena Tiga Undang-undang Hak Cipta yang telah ada sebelumnya, walupun perubahan-perubahan yang dilakukan telah memuat beberapa penyesuaian pasal yang sesuai dengan TRIPs, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk memberikan perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang hak cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya tersebut di atas, masih terdapat beberapa ketentuan yang sudah sepatutnya dimanfaatkan. Selain itu kita perlu menegaskan dan memilah kedudukan hak cipta di satu pihak dan hak terkait di lain pihak dalam rangka memberikan perlindungan bagi karya intelektual yang bersangkutan secara lebih jelas.

Perlindungan yang diberikan oleh undang-undang hak cipta Indonesia, disatu sisi memberikan perlindungan kepada pencipta seperti terlihat dalam ketentuan terhadap pelanggaran hak cipta yang mengatur tentang sanksi penjatuhan denda yang lebih memberatkan kepada pelanggar hak cipta, dan adanya penetapan sementara pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 atas permintaan pihak yang merasa dirugikan

pengadilan niaga dapat menerbitkan penerbitan sementara dengan segera dan efektif. Hal ini merupakan pengaruh dan/atau berasal dari aturan *TRIP's* yang mengintruksikan bahwa negara anggota wajib memberikan perlindungan yang sama terhadap karya intelektual warga negara lain seperti yang diberikan terhadap warga negaranya sendiri

Ciptaan merupakan obyek yang dilindungi oleh hak cipta, menurut rumusan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam ilmu pengetahuan, seni atau sastra. Mengenai siapa yang disebut sebagai pencipta itu, yang dimaksud dengan pencipta, ketentuan Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah :

- a. Pasal 1 ayat (2), adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
- b. Pasal 5 Ayat 1 kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta adalah :
 1. orang yang namanya terdaftar dalam Daftar umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal; atau
 2. orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan.

Ayat 2 kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis atau tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya, orang yang berceramah dianggap sebagai pencipta ceramah tersebut.

- c. jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya itu.
- d. Pasal 7, adalah jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang. Penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu.
- e. Pasal 8 ayat (1), adalah jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya. Pemegang hak cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pencipta apabila penggunaan ciptaan itu diperluas sampai keluar hubungan dinas atau berdasarkan pesanan.

- f. Badan hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 9 undang-undang hak cipta.

Ciptaan lagu dan/atau musik terdiri dari motif/karakter, tema, struktur melodi, jumlah ruas dan lirik/teks lagu. Motif/karakter adalah ungkapan gagasan pokok/asli dari si komponis/pencipta lagu yang menjadi titik tolak pembuatan tema dan seluruh musik. Motif berwujud figure melodic atau ritmik yang bersifat potensial dan mandiri. Dalam sebuah komposisi musik bisa terdapat lebih dari satu motif. Karakter yang dimaksud adalah sifat atau ciri-ciri khas yang terdapat dalam motif tersebut. Tema merupakan pengembangan motif berupa melodi yang akan menjadi material pokok dalam pengempangan komposisi; tema adalah kompleks gagasan pokok. Dalam sebuah komposisi musik bisa terdapat lebih dari satu tema. Sedangkan struktur melodi merupakan susunan nada yang diakibatkan oleh konstruksinya. Jumlah ruas adalah ruang antara dua garis vertical yang menyatakan pembagian metrik dari lagu. Lirik/teks lagu adalah syair sebuah lagu.¹³⁴

Karya musikal, merupakan satu kesatuan yang utuh. tetapi dari sisi yuridis, unsur ciptaan terhadap sebuah karya musikal yang lengkap, dengan menggunakan lirik, terdiri atas empat macam unsur

¹³⁴ Rooseno Harjowidigdo, *Penulisan Karya Ilmiah Tentang Lisensi Wajib Terhadap Hak Cipta Lagu/Musik Untuk Production House, Broadcaster dan Pemakai Lainnya*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Tahun Anggaran 1996/1997), hal 13

ciptaan, yaitu : ¹³⁵ Melodi Dasar, Lirik lagu, Aransemen, Notasi. Keempat unsur ciptaan tersebut bisa merupakan ciptaan satu orang pencipta atau masing-masing unsur memiliki pencipta yang berbeda. Aransemen dan notasi (penulisan not balok) sesungguhnya merupakan karya turunan (*Derivatif*) yang termasuk *Neighboring Right*, akan tetapi dalam undang-undang hak cipta kita dilindungi sebagai hak cipta.¹³⁶

Perlindungan terhadap pencipta atas karya lagu dan/atau musik dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, bahwa ciptaan yang dilindungi meliputi; *ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks*, apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 bahwa; “ketentuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan hak cipta”. Ini berarti bahwa pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Hal ini berarti suatu ciptaan baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar tetap dilindungi. Ditegaskan kembali dalam Pasal 36 bahwa ;” pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti atau bentuk dari ciptaan yang didaftar”. Dalam hal ini Direktorat Jenderal

¹³⁵ Rooseno Harjowidigdo, *Laporan Akhir Tim Penyusun Kompilasi Bidang Hukum tentang Yurisprudensi Mengenai Hak milik Intelektual*, (Jakarta; Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman Republik Indonesia Th. Anggaran 1995/1996), hal. 61

¹³⁶ *Ibid.*

yang menyelenggarakan pendaftaran ciptaan tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud dari ciptaan yang terdaftar. Namun sebagaimana juga diuraikan dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982, pendaftaran tidak mutlak harus dilakukan, melainkan semata-mata hanya untuk memudahkan pembuktian milik dalam hal terjadi sengketa mengenai hak cipta.

Undang-undang hak cipta berkaitan dengan pendaftaran ciptaan tidak secara tegas mengatur pendaftaran, artinya terdapat bahwa pendaftaran menggunakan system negatif deklaratif, artinya bahwa pendaftaran suatu ciptaan lagu dan/atau musik itu didaftar ataupun tidak didaftar mempunyai kekuatan hukum yang sama dan pendaftaran berfungsi semata-mata untuk memudahkan pembuktian, karena pendaftaran suatu ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti atau bentuk ciptaan yang didaftarkan. Terhadap pendaftaran ciptaan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 bahwa Direktorat Jenderal, Ketentuan Pasal 1 Undang-undang nomor 2002 menyatakan yang dimaksud Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada dibawah departemen yang dipimpin oleh menteri, menyelenggarakan pendaftaran ciptaan dan dicatat dalam daftar umum ciptaan Dalam undang-undang Nomor 7 tahun 1987 pendaftaran ciptaan dilakukan oleh Departemen kehakiman, namun sejak disyahrkannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 pendaftaran

ciptaan dilakukan oleh Direktorat Jenderal, Jo Pasal Pasal 75 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002.

Perlindungan terhadap pencipta, ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf e lagu atau musik dengan atau tanpa teks, adalah selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Apabila ciptaan dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya.

Perlindungan terhadap ciptaan yang tidak diketahui siapa penciptanya, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 dalam Pasal 10, menetapkan :

1. apabila suatu ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan ini belum diterbitkan, negara memegang hak cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya.
2. Apabila suatu ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya atau pada ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran penciptanya, maka penerbit memegang hak cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya.
3. Jika suatu ciptaan tidak telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya dan/atau penerbitnya, negara memegang hak cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya.

Ketentuan dalam Pasal 10 ini dimaksudkan untuk menegaskan status hak cipta dalam hal suatu karya tidak diketahui penciptanya dan tidak atau belum diterbitkan, sebagaimana layaknya ciptaan yang diwujudkan. Misalnya, dalam karya musik, ciptaan tersebut belum diterbitkan atau belum direkam. Dalam hal demikian, hak cipta atas karya tersebut dipegang oleh negara untuk melindungi hak cipta bagi kepentingan penciptanya. Sedangkan apabila karya musik dan atau lagu tersebut telah diterbitkan atau direkam, hak cipta atas karya yang bersangkutan dipegang oleh penerbit atau produser rekaman.

Dengan demikian pencantuman kata-kata “untuk kepentingan penciptanya” dimaksudkan bahwa negara atau penerbit akan menyerahkan hak cipta atas ciptaan yang tidak diketahui siapa penciptanya kepada seseorang yang kemudian hari dapat membuktikan secara sah di muka pengadilan, sebagai pencipta dari ciptaan yang tidak diketahui penciptanya.

Berbicara tentang hak cipta khususnya pencipta atas sebuah lagu dan/atau musik tidak dapat terlepas dari hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta, karena Indonesia belum meratifikasi *Rome Convention*, ketentuan tentang hak yang terkait dengan hak cipta dimasukkan dalam satu undang-undang dengan hak cipta. Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan

karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.

Berkembangnya teknologi canggih pada akhir-akhir ini, untuk menentukan siapa yang menjadi pencipta pertama dari suatu ciptaan tertentu memerlukan penjelasan dengan suatu pendekatan yang agak berbeda. Terutama dalam menentukan pencipta dari ciptaan-ciptaan yang tergolong sebagai hak-hak yang berkaitan untuk melindungi kepentingan-kepentingan pelaku-pelaku, produser-produser rekaman suara dan lembaga-lembaga penyiaran sehubungan dengan aktifitas-aktifitas mereka yang berkenaan dengan penggunaan secara umum suatu ciptaan seorang pencipta, semua bentuk pertunjukkan oleh artis-artis atau menyiarkan kepada umum pertunjukkan-pertunjukkan, informasi dan suara-suara atau gambar-gambar hidup, misalnya :

- Pelaku (*Performer*) ; adalah aktor penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, folklor, atau karya seni. (Pasal 10 undang-undang Nomor 19 Tahun 2002)
- Pencipta dari rekaman suara suatu lagu dalam bentuk *compact disc* atau pita *sehuloid* adalah produser rekaman; produser rekaman adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau

perekaman bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lainnya (Pasal 1 angka 11); dan

- Pencipta dari tayangan pertunjukan/pagelaran musik melalui siaran televisi adalah lembaga penyiaran. Lembaga Penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran yang berbentuk badan hukum, yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kawat atau melalui sistem elektromagnetik (Pasal 1 angka 12)

Hak-hak yang dimiliki oleh pemegang hak-hak terkait Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 49, menyatakan :

- (1) Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukkannya.
- (2) Produser Rekaman Suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi.
- (3) Lembaga Penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya

melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui system elektromagnetik lain.

Perlindungan terhadap hak terkait diatur dalam Pasal 50, menyatakan:

(1) jangka waktu perlindungan bagi :

- a. Pelaku, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut pertama kali dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau audiovisual;
- b. Produser Rekaman Suara, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut selesai direkam;
- c. Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siaran tersebut pertama kali disiarkan;

(2) Perhitungan jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak tanggal 1 Januari Tahun berikutnya setelah :

- a. Karya pertunjukan selesai dipertunjukkan. Atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audiovisual;
- b. Suatu karya rekaman suara selesai direkam;
- c. Suatu karya siaran selesai disiarkan untuk pertama kali.

Hak-hak terkait sebagaimana diterangkan di atas di dalam ketentuan Perjanjian Mengenai *Trade Related Aspects of Intellectual Property Right's* (Perjanjian TRIP's-1994) Bagian II tentang Standar- Standar Mengenai Kegunaan, Cakupan dan Penggunaan Hak Milik

Intelektual Bab I mengenai Hak cipta dan Hak-Hak yang bersangkutan
Pasal 14:

- 1) Sehubungan dengan penghayatan atas penampilan pada suatu phonogram, para penampil harus juga memiliki kemungkinan untuk mencegah tindakan-tindakan berikut bilamana dilaksanakan tanpa otoritas mereka : penghayatan atas penampilan yang belum selesai dan reproduksi atas penghayatan tersebut. Para penampil harus juga memiliki pilihan untuk mencegah tindakan-tindakan berikut bilamana dilaksanakan tanpa izin mereka: siaran menggunakan peralatan tanpa kabel dan komunikasi kepada masyarakat atas penampilan langsung mereka.
- 2) Produser phonogram dapat menikmati hak untuk mengizinkan atau melarang reproduksi langsung atau tidak langsung atas phonogram mereka.
- 3) Organisasi siaran memiliki hak untuk melarang tindakan-tindakan berikut bilamana dilaksanakan tanpa izin mereka: penghayatan reproduksi atas penghayatan dan siaran ulang dengan peralatan tanpa kabel dari siaran-siaran, sebagaimana komunikasi kepada masyarakat dari siaran televisi yang serupa. Bilamana para anggota tidak memberikan hak tersebut kepada organisasi siaran, mereka harus memberikan pemilik hak cipta dalam hal siaran dengan kemungkinan untuk mencegah tindakan-tindakan di atas sesuai dengan ketentuan-ketentuan konvensi bern (1971).

- 4) Ketentuan Pasal 11¹³⁷ sehubungan dengan program komputer harus berlaku *mutates mutandis* kepada produser phonogram dan pemegang hak cipta atas phonogram lainnya seperti yang diatur dalam undang-undang tiap anggota. Bila pada 15 April 1994 suatu anggota memiliki suatu system yang berlaku atas kompensasi yang adil dari pemegang hak sehubungan dengan penyewaan phonogram, pihaknya dapat memelihara system demikian dengan ketentuan bahwa penyewaan komersial phonogram tidak menambah kerugian material dari hak eksklusif atas reproduksi dari pemegang hak.
- 5) Jangka waktu perlindungan yang tersedia dalam perjanjian ini untuk penampil dan produser phonogram akan berakhir setidaknya sampai dengan akhir periode 50 tahun terhitung dari akhir tahun kalender dimana penghayatan dibuat atau penampilan tersebut diadakan. Jangka waktu perlindungan yang diberikan sesuai dengan ayat (3) akan berlangsung setidaknya 20 tahun dari akhir tahun kalender dimana siaran tersebut berlangsung.
- 6) Tiap anggota dapat, sehubungan dengan hak-hak yang diberikan dalam ayat (1), (2), dan (3), menentukan untuk kondisi, pembatasan, pengecualian dan pelarangan sampai pada perluasan yang dibolehkan oleh konvensi Roma. Meski demikian, ketentuan

¹³⁷ Para anggota menetapkan pembatasan atau pengecualian atas hak eksklusif dari anggota-anggota khusus tertentu yang tidak bertentangan dengan eksploitasi yang wajar dari karya tersebut dan tidak tanpa prasangka merugikan kepentingan hukum pemegang hak.

Pasal 18¹³⁸ Konvensi Bern (1971) akan berlaku *mutates mutandis* untuk hak-hak penampil dan produser phonograms dalam hal phonogram.

Di dalam undang-undang Hak Cipta, Pasal 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 secara *Expressis Verbis*. Dijelaskan bahwa hak cipta dianggap sebagai benda bergerak. Sehingga dapat dialihkan secara keseluruhan maupun sebagian. Hak cipta beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena ; pewarisan, hibah, wasiat, dijadikan milik negara, perjanjian yang harus dilakukan dengan akta, dengan ketentuan bahwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebut di dalam akta tersebut.

Dalam penjelasan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, dinyatakan bahwa beralih atau dialihkannya Hak Cipta tidak dapat dilakukan secara lisan, tetapi harus dilakukan secara tertulis dengan maupun tanpa kata naotariil. Hal ini sama dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) sub (e) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 beserta penjelasannya, dengan ketentuan bahwa pengalihan itu hanya menyangkut wewenang yang tertulis dalam akta tersebut.

Perjanjian mengenai lisensi terhadap hak cipta lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 45 yang menyatakan :

¹³⁸ Karya-karya cipta yang ada pada pemberlakuan Konvensi dapat : 1. dapat dilindungi di mana perlindungan belum berakhir di negara asal; 2. tidak dapat dilindungi dimana perlindungan telah berakhir di negara di mana perlindungan diklaim; 3. pemberlakuan prinsip-prinsip tersebut; 4. kasus-kasus khusus.

- (1) pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
 - (2) kecuali diperjanjikan lain, lingkup lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlangsung selama jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
 - (3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban pemberian royalty kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi.
 - (4) Jumlah royalty yang dibayarkan kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.
- Royalty adalah merupakan hak ekonomi para pencipta lagu/Pemegang Hak Cipta Karya Musik jika karyanya dipergunakan***

Kecuali diperjanjikan lain, pemegang hak cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 2 (ketentuan pasal 46 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002).

Ketentuan-ketentaun mengenai perjanjian lisensi hak cipta harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 47 undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, sebagai berikut :

- (1) Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal.
- (3) Direktorat jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Dalam kaitannya dengan dengan pengalihan atau lisensi hak cipta terdapat asas-asas hukum yang berkaitan, anatar lain : *Asas Hak Milik*, bahwa kepemilikan terhadap hak milik suatu benda memiliki sisi hukum yang lebih pasti dan jelas. Pemilikan juga menunjukkan hubungan antara seseorang dengan obyek yang menjadi sasaran pemilikan itu. Adapun ciri-ciri pemilikan¹³⁹, antara lain :

- Pemilik berhak untuk memiliki barangnya. Ia mungkin tidak memegang atau menguasai barang itu, direbut atau dusewakan atau dicuri oleh orang lain, namun demikian hak atas barang itu tetap pemilik hak semula.

¹³⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 65.

- Pemilik biasanya berhak menggunakan dan menikmati barang yang dimilikinya, yang pada dasarnya merupakan kemerdekaan bagi pemilik untuk berbuat terhadap barangnya.
- Pemilik berhak untuk menghabiskan, merusak atau mengalihkan barangnya. Pada orang yang menguasai suatu barang, hak untuk mengalihkan itu tidak ada padanya karena berlaku "*asas nemo dat quod non habet*", yaitu penguasa tidak berhak mengalihkan hak atas barang itu kepada orang lain.

Didalam perjanjian lisensi terkandung beberapa asas, diantaranya :

- *Asas Eksklusifitas*, yang menentukan bahwa kepemilikan atas suatu ciptaan itu kepada pemiliknya atau penerima hak diberi hak khusus untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut undang-undang yang berlaku, dan kepada yang melakukan tindak pidana kejahatan terhadap hak cipta tersebut negara mengancamnya dengan sanksi penjara atau denda. Di samping itu hak cipta adalah hak yang tidak bisa dicabut dari pencipta atau ahli warisnya, dan kepadanya diberi hak untuk menuntut bagian hasil dari penjualan ulang dari copy asli ciptaan seni dalam jangka waktu perlindungan hak cipta.
- *Asas Kebebasan Berkontrak*, untuk menguji bahwa perjanjian lisensi hak kekayaan intelektual, dalam hal ini hak cipta khususnya

hak cipta lagu dan/atau musik dibuat dengan kesepakatan dan kebebasan para pihak yang membuatnya.

Lisensi hak cipta dalam prakteknya adalah sebuah perjanjian kontrak dalam rangka mengeksploitasi hak ciptanya secara ekonomi.

Perjanjian menurut Prof. Subekti, adalah :

suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan dua orang tersebut yang dinamakan PERIKATAN. Arti perikatan itu sendiri ialah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasar mana pihak satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.

Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disamping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan PERSETUJUAN, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perikatan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya¹⁴⁰.

Dalam perikatan yang timbul dari adanya perjanjian mempunyai dua sudut, yaitu sudut kewajiban-kewajiban (*Obligation*) yang dipikul oleh suatu pihak, dan sudut lain pihak yaitu, hak-hak-hak untuk menuntut dilaksanakannya sesuatu yang telah disanggupi dalam perjanjian tersebut. Pada umumnya perjanjian yang sering terjadi adalah perjanjian timbal balik atau BILATERAL. Artinya bahwa suatu pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian itu, juga menerima kewajiban-kewajiban, juga memperoleh hak-hak yang dianggap sebagai kebalikan dari kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya. Apabila tidak demikian halnya, maksudnya

¹⁴⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta ; PT. Intermasa, Cetakan VI), , hal.1.

apabila pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian itu tidak dibebani dengan kewajiban sebagai kebalikan dari hak-hak itu, atau apabila pihak yang menerima kewajiban-kewajiban tidak memperoleh hak-hak sebagai kebalikannya, maka perjanjian demikian dikatakan sebagai perjanjian sepihak atau UNILATERAL.¹⁴¹

Hal-hal penting dalam perjanjian diatur dalam Buku III KUHPdata, dimana didalamnya terdiri dari bagian umum dan khusus. Buku II KUHPdata yang mengatur tentang perjanjian ini mempunyai ciri khas, yaitu mengenai asas kebebasan berkontrak.¹⁴²

Jadi walau perjanjian lisensi ini tidak diatur dalam Buku III KUHPdata, keberadaannya tetap diakui berdasarkan asa kebebasan berkontrak, serta system terbuka¹⁴³ dalam hukum perjanjian. Hal demikian diatur dalam KUHPdata Pasal 1313, menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah :

Suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih..

Perjanjian dengan sistem terbuka demikian menganut asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, menyatakan bahwa untuk syahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 (empat) syarat antara lain :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

¹⁴¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta; Intermasa, Cetakan XIX ,Oktober 1984), hal.128.

¹⁴² *Ibid.*, hal.127

¹⁴³ artinya bahwa setiap orang bebas untuk membuat segala jenis perjanjian atau kontra kasal tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan sistem sosial..

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, maka perjanjian itu akan menjadi undang-undang bagi para pihak tersebut.

Konsekwensinya apabila terjadi pelanggaran, ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara :

Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Perjanjian lisensi menurut Ibrahim Idham adalah :

Suatu perjanjian kerjasama antara pihak-pihak, dimana pihak pertama (*Licensor*), selaku pemilik teknologi memberikan bantuan, biasanya dalam bentuk know how, ketrampilan teknik dan pemasaran, seiring dengan suatu hak untuk mempergunakan hak milik khusus atau tertentu dengan mendapatkan imbalan yang umumnya dalam bentuk uang dari pihak *Licensee*, yang ingin mendapat kemajuan teknologi.¹⁴⁴

Menurut Sanusi Bintang lisensi berarti izin. Disini pencipta sebagai pemberi lisensi (*Licensor*) memberikan izin kepada penerima lisensi (*Licensee*) untuk jangka waktu tertentu dengan syarat tertentu menikmati manfaat ekonomi suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta.¹⁴⁵

Pengertian lisensi demikian sesuai dengan definisi yang diberikan oleh Michael A. Lechter, yang menyatakan sebagai berikut :

¹⁴⁴ Ibrahim Idham, *Lisensi dan Peranan pemerintah, Hukum dan pembangunan*, No.1 Tahun XV, 1995, hal. 40

¹⁴⁵ Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1988), hal. 3.

*A license agreement is, in general terms, an agreement where by the licensor, for an agreed upon consideration grants to the licensee certain rights with respect to intellectual property of the licensor.*¹⁴⁶

Yang artinya kurang lebih sebagai berikut ; secara umum perjanjian lisensi dapat diartikan sebagai persetujuan dimana pemberi lisensi (*Licensor*), berdasarkan imbalan yang disepakatinya memberikan hak-hak tertentu kepada penerima lisensi (*Licensee*) sehubungan dengan milik intelektualnya.

Lebih lanjut Michael A. Lechter menyatakan bahwa :

*A sale or Assignment transfer substansially all commercial rights and title to the intellectual property to assignee. In the case of all licensee, the licensor retains rights to the intelledtual property.*¹⁴⁷

Pengertian yang dapat ditarik dari pernyataan di atas adalah bahwa hal penting yang perlu diingat ialah bahwa perjanjian lisensi harus dibedakan dengan jual beli atau peralihan hak (*Assigment*). dalam jual beli atau peralihan hak, mengalihkan hak komersial dan hak milik intelektual sepenuhnya kepada penerima hak, sedangkan dalam perjanjian lisensi, akibat pemberian lisensi tetap mempertahankan hak-hak milik intelektualnya.

Hal senada juga dinyakatan oleh *World Intellectual Property Organization (WIPO)*, yang membedakan antara peralihan hak (*Assigment*) dan jual beli dengan perjanjian lisensi. Peralihan hak berarti penyerahan hak itu sendiri sehingga orang lain menjdi pemilik

¹⁴⁶ Michael A. Lechter, *Patent License, and Know How and Technical Assistance Agreements*, National Seminar on Licensing and technology transfer Arrangement, (Jakarta; 7-8 Maret 1990), hal. 5.

¹⁴⁷ *Ibid.*

baru dari hak tersebut. Sedangkan perjanjian lisensi hanya berupa pemberian hak tertentu (*Specified Right*), untuk memanfaatkan suatu hak, sementara pemberi lisensi tetap sebagai pemilik hak.¹⁴⁸

Selain mengenai pengalihan hak cipta sebagai diatur dalam Pasal 3, terhadap Ciptaan lagu dan/atau musik. Sebagai hak yang eksklusif kepada penciptanya diberikan hak untuk mengeksploitasi hak cipta musiknya, misalnya dengan memberi lisensi kepada pihak lain. Arti eksploitasi¹⁴⁹ itu sendiri adalah penguasaan atau pendayagunaan, atau pemanfaatan untuk kepentingan sendiri, atau bisa juga berarti mengeruk keuntungan. Dengan arti kata yang demikian itu maka eksploitasi hak cipta dapat diartikan sebagai suatu hak untuk dalam jangka waktu tertentu mendayagunakan atau mengelola suatu ciptaan guna diambil manfaat ekonomi yang terkandung didalamnya.

Ketentuan mengenai perjanjian lisensi terhadap Hak Cipta mulai diatur Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, dalam penjelasannya menyatakan bahwa penambahan bab baru mengenai perlisensian ini dimaksudkan untuk memberikan landasan pengaturan praktek perlisensian yang berlangsung di bidang

¹⁴⁸ WIPO, *Basic Nations of Copyrights and Neighboring Rights*, Roving Seminar on Copyrights and Neighboring Rights, (Indonesia; 12-17 Febuari 1990), hal.8.

¹⁴⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, (Jakarta ; Balai pustaka,1989) , hal. 222

hak cipta. Pada dasarnya, perjanjian lisensi hanya bersifat pemberian ijin atau hak yang dituangkan dalam akta perjanjian untuk jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu menikmati manfaat ekonomi suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta. Perjanjian lisensi lazimnya tidak dibuat secara khusus. Artinya, pemegang hak cipta tetap dapat melaksanakan hak ciptanya atau memberikan lisensi yang sama kepada pihak ketiga. Perjanjian lisensi dapat juga dibuat secara khusus atau eksklusif, yang berarti secara khusus hanya diberikan kepada pemegang lisensi saja. Perjanjian lisensi yang bersifat eksklusif seperti itu pada dasarnya dapat disalahgunakan untuk memonopoli pasar, atau meniadakan persaingan sehat di pasar. Sebagai contoh; hal itu dapat terjadi apabila pemegang lisensi secara sengaja tidak memanfaatkan atau mengeksploitasi ciptaan yang dilisensikan. Hal itu dilakukan agar dapat menguasai pasar dengan produk lain atau ciptaannya sendiri. Cara demikian jelas akan merugikan hak pencipta dan bahkan dapat mengganggu pertumbuhan perekonomian Indonesia. Dengan memperhatikan kemungkinan seperti itu undang-undang ini memberikan arahan bahwa perlisensian dapat dilaksanakan sepanjang tidak merugikan perekonomian Indonesia. Selanjutnya ditegaskan pula bahwa untuk dapat berlaku bagi pihak ketiga, perjanjian lisensi harus dicatatkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan intelektual.

Usaha untuk mengeksploitasi secara ekonomi atas karya cipta yang diberi hak eksklusif, pencipta dapat : ¹⁵⁰ Mengumumkan atau memperbanyak sendiri atas karya ciptanya guna diambil manfaat ekonominya; atau, mengalihkan hak ciptanya kepada pihak lain melalui suatu perjanjian; atau, menerima royalty dari pihak lain yang beritikad baik atas pengekploitasian karya cipta itu.

Setiap pencipta patut mendapatkan hak ekonomi apabila lagu dan atau musik hasil karyanya diumumkan atau diperbanyak. Hak ekonomi tersebut dalam prakteknya biasa disebut dengan penerimaan pendapatan. Cara pembayaran yang lazim dipakai yaitu dalam bentuk royalti. Namun demikian dalam mengeksploitasi hak cipta, seorang pencipta tidak dapat melaksanakan sendiri secara maksimal tanpa adanya organisasi profesi hak cipta yang menangani khusus hal itu, terutama untuk ciptaan lagu atau musik. Salah satu belum terlaksananya mekanisme *performing right* adalah kesulitan jika para pencipta atau pemegang hak cipta secara perorangan mendatangi setiap penyelenggara acara musik di Indonesia satu persatu untuk menagih hak ekonominya. Di Indonesia tugas tersebut diemban oleh KCI yang khusus melaksanakan pengadministrasian kolektif atas pemakaian hak cipta dari para pencipta lagu dan/atau musik, baik ciptaan Indonesia maupun asing¹⁵¹ dan dalam perkembangannya sejak

¹⁵⁰ Rooseno Harjowidigdo, *Masalah Pungutan Royalti dan perlindungan Karya Cipta*, (Jakarta; Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Tahun Anggaran 1993/1994), hal. 53

¹⁵¹ Pasal 5 Anggaran Dasar KCI

tahun 1996, juga telah melaksanakan pengadministrasian kolektif atas hak memperbanyak lagu dan/atau musik para pencipta.

Dalam proses pengumpulan royalty, terdapat kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh pencipta yaitu melakukan pendaftaran sebagai peserta/anggota KCI, dalam pendaftaran ini pencipta akan memberikan hak pengelolaan pengumuman karya ciptanya kepada KCI melalui surat kuasa dalam blanko standar. Dengan demikian hubungan antara KCI dan pencipta atau pemegang hak cipta adalah kuasa. Pemberian kuasa menurut Pasal 1792 KUHPerdara adalah persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan pada seseorang lain, yang menerimanya atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.¹⁵²

Adapun yang menjadi subyek dalam perjanjian ini adalah pemegang hak cipta atau ahli waris, penerima hibah/testamen, orang tua/wali atau juga kuasa dari pencipta bisa juga selaku publisher/sub-publisher sebagai pemberi kuasa dengan KCI selaku penerima kuasa, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam surat perjanjian kerjasama yang ditandatangani bersamaan surat kuasa/perjanjian kerjasama ini. Berdasarkan Pasal 1797, kuasa tidak boleh melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya, atau bisa dikatakan bahwa kuasa tidak boleh melakukan hal-hal yang

¹⁵² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990), hal. 457.

melampaui wewenangnya.¹⁵³ Menurut M yahya Harahap, persetujuan kuasa adalah kontrak konsesuil, artinya dengan adanya persetujuan pemberian kuasa hal itu sudah berkekuatan mengikat kepada para pihak.¹⁵⁴

Perlindungan hak cipta atas karya musikal, akan menjadi lebih rumit perwujudannya dalam konteks sebuah industri. Karena akan sangat dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan komersial dalam industri itu sendiri, hal ini berkaitan dengan bentuk-bentuk hak atas karya musikal yang muncul dalam industri musik yang diatur dalam undang-undang hak cipta, menurut sifatnya yaitu :

A. Hak moral :

1. Hak seseorang untuk disebutkan sebagai pencipta atas karyanya (*Paternity Right*)
2. hak seseorang untuk melarang orang lain melakukan perubahan atas karya ciptanya (*Integrity Right*)
3. hak seseorang untuk menolak disebut sebagai pencipta atas suatu karya cipta yang bukan merupakan ciptaannya (*False Attribution Right*).

B. Hak Ekonomi :

1. Hak untuk mengumumkan (*Performing Right*), terdiri atas :
 - pertunjukkan hidup (*Live Show*);
 - penyiaran (*Broadcast*)

¹⁵³ Ibid., hal 458

¹⁵⁴ M yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung : Alumni, 1986), hal. 307

2. Hak untuk menggandakan (*Reproduction Right*), terdiri atas :

- a. penggandaan dengan menggunakan cetakan (*Print*)
- b. penggandaan secara mekanis dengan menggunakan penghantar suara (*Mechanical Right*)

3. hak untuk melakukan perubahan (*Alteration Right*), terdiri atas :

- a. terjemahan (*Translation*)
- b. adaptasi (*Adaptation*)
- c. hak untuk menggabungkan dengan hak cipta lain (*Synchronization Right*).

Ketentuan Pasal 2 Undang-undang hak cipta mengenai hak pencipta untuk mengeksplitasi hak ekonominya dilakukan dengan :

- Kegiatan menumumkan
- Kegiatan Memperbanyak

Kegiatan mengumumkan adalah pembacaan, penyuaran, penyiaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain (Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002), yang merupakan hak eksklusif dari seorang pencipta atau pemegang hak cipta (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002). Pengumuman berarti penyuaran, penyiaran, pertunjukkan atau penyiaran suatu ciptaan lagu dan/atau musik termasuk rekaman suara yang dilakukan oleh para pemakai (*Users*) seperti : Radio Republik Indonesia, Stasiun Radio

Swasta Nasional, TVRI, RCTI, SCTV, TPI, Indosiar, ANTV, Trans TV, Metro TV, TV 7, Global TV, MTV, Badan Penerbangan, Hotel, Karaoke, Pub, Diskotik, Restoran, Bar, Kafe, Mall, Rumah Sakit, Fitness Center dan lain-lain dalam rangka pelayanan pada masyarakat luas dan memungut bayaran (bersifat komersial), sehingga dalam pelayanan atas jasa mereka dengan menggunakan ciptaan lagu atau musik, para pemakai (*Users*) diwajibkan membayar sejumlah fee atau royalty atas pemakaian lagu atau musik tersebut.¹⁵⁵

Para pemakai adalah atau *users* adalah seseorang atau badan hukum yang melaksanakan pengumuman, penyiaran, pertunjukkan atau penyebaran suatu ciptaan lagu dan atau musik termasuk rekaman suara dengan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga orang lain dapat mendengarnya, dalam bentuk; background musik, live musik, diskotik, karaoke, atau video screen.¹⁵⁶ Contoh pihak-pihak yang harus memiliki izin adalah pengguna musik dalam bentuk pengumuman, termasuk didalamnya :¹⁵⁷ stasiun pemancar televisi dan radio (dengan/tanpa kabel); perusahaan penerbangan, badan udara, pengelolaan tempat hiburan, bioskop, penyelenggara konser atau pertunjukkan musik; pengusaha restaurant, café, karaoke, discotheque medical center, rumah sakit; pameran, fashion show; pengelola mal,

¹⁵⁵ Lihat dalam penjelasan Pasal 2 undang-undang Nomor 6 tahun 1982 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.

¹⁵⁶ Dalam formulir aplikasi lisensi pengumuman musik KCI dijelaskan, video screen adalah layar lebar untuk memutar siaran televisi dan/atau video/laser disc yang mengandung musik. Jenis ini tidak diperhitungkan lagi dalam pembayaran royalty jika dipergunakan untuk kepentingan karaoke.

¹⁵⁷ KCI (Karya Cipta Indonesia), Pengantar Umum, Departemen Lisensi KCI, hal.3.

supermarket, pertokoan, perkantoran, bank; pengelola musik yang ditransmisikan secara digital (*website, ringtone, online radio* dsb)

Sedangkan yang dimaksud dengan kegiatan memperbanyak karya cipta adalah menambah suatu ciptaan, dengan perbuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan sesuatu ciptaan (Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002). Misalnya memperbanyak musik ke dalam bentuk kaset, Compact Disc, VCD atau bentuk-bentuk Phonogram seperti film, sinetron, video clip, memperbanyak musik ke dalam bentuk cetakan seperti majalah, buku, majalah atau media cetak lainnya.

Menurut Candra Darusman yang dimaksudkan memperbanyak berkaitan dengan lagu dan/atau musik ia mengemukakan terdapat kegiatan-kegiatan sebagai berikut :¹⁵⁸ kegiatan memperbanyak dengan menambah jumlah ciptaan dalam bentuk : Di rekam misalnya dalam kaset, piringan hitam, compact disk, laser disk, video (*reproduction/recording*), Disatukan dalam film (*STINCHRONIZATION*), Dibuat dalam partitur musik (*SHEET MUSIC*).

Ketiga kegiatan tersebut di atas sering disebut dengan istilah hukum *MECHANICAL RIGHT*, atau hak memperbanyak.

¹⁵⁸ Candra Darusman, *Berbagai Aspek yang Perlu Dikelola Secara Layak dalam Pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta, Makalah Penataran PWI*, Cisarua : 1989, hal 3.

Pengguna musik dalam bentuk perbanyakan, termasuk didalamnya.¹⁵⁹ stasiun pemancar televisi dan radio (dengan/tanpa kabel), perusahaan rekaman, pembuat iklan, pembuat film, pengelola musik yang ditransmisikan secara digital (*website, ringtone, online rado dsb*). Berhubungan dengan para pengguna karya musik atau user, KCI biasanya hanya mengurus masalah harga, materi perjanjian, kontrol laporan penjualan dan perhitungan royalty. Izin yang diberikan KCI kepada user harus spesifik dan jelas, dituangkan dalam perjanjian dengan batas waktu tertentu.¹⁶⁰

Untuk izin penggunaan karya musik di media cetak atau majalah yang dikenal dengan *Printing Right* adalah 10 % dari harga jual untuk setiap karya musik permajalah (buku). Sedangkan untuk pemakaian karya musik dalam iklan biasanya KCI masih melibatkan penciptanya untuk menentukan nilai royaltinya.¹⁶¹

Kaitannya dengan dua hal yang telah dijelaskan di atas (Hak mengumumkan dan memperbanyak) siapa yang wajib memiliki izin ? bagi mereka-mereka (Pengguna Musik) yang memutar atau mempertunjukkan musik dengan atau tanpa syair yang terdapat didalamnya sedemikian rupa sehingga dapat didengar oleh orang lain baik dalam bentuk musik latar (*Background Music*) yang diputar dalam bentuk Kaset, Piringan Hitam, Compac Disc, VCD. Televisi

¹⁵⁹ KCI, *Pengantar Umum, Op.Cit.*, hal. 3

¹⁶⁰ *Ibid*

¹⁶¹ Buletin KCI, *CAKRA*, Edisi 04/Th.II/April 2002, hal.5

atau perangkat bunyi (*phonogram*) lainnya maupun bdalam bentuk *Live Music*, *Discotheque*, karaoke, *Video Screen* untuk menarik pengunjung atau memberi kenyamanan para pengunjung pada kegiatan-kegiatan yang bersifat komersial wajib meminta izin dan sebagai konsekuensi logisnya membayar royalti kepada si pencipta atau pemegang hak ciptanya.¹⁶²

Dalam memahami elemen-elemen penghubung antara hukum, karya musikal dan industri, berikut ini akan diuraikan secara skematis gambaran umum tentang rangkaian kerja industri musik Indonesia, sebagai berikut :¹⁶³

Pencipta Lagu (hak cipta)	Produser	Distributor	Agen	Toko
	- penyanyi	-penggandaan	Agen	Toko
	- Penata Rekaman (Arranger)	-Stiker Ppn	Agen	Toko
	- Biaya Distribusi			
	- Musisi			
	- Strudio & Equipment			
	- Promosi			
	Master rekaman			
	(Hak atas karya rekaman)			

Pencipta mengalihkan sebagian hak cipta atas lagu ciptaannya kepada produser berdasarkan kesepakatan tertentu. Kemudian produser rekaman akan memilih penyanyi, penata rekaman, musisi pendukung serta menyewa studio dan menyediakan sarana yang

¹⁶² KCI, Pengantar Umum, Departemen Lisensi KCI, *Op.Cit.*, hal. 3

¹⁶³ Rooseno Harjowidigdo, *Laporan Akhir Tim Penyusun Kompleksi Bidang Hukum tentang Yurisprudensi Mengenai Hak milik Intelektual*, (Jakarta; Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman Republik Indonesia Th. Anggaran 1995/1996), *Op.Cit.*, hal. 59.

dibutuhkan seperti pita dan lain-lain, untuk menghasilkan sebuah master rekaman. Semua biaya yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungan produser. Dengan lahirnya sebuah master rekaman baru, maka bersamaan dengan itu, lahir pula hak milik yang tidak berwujud menjadi hak eksklusif produser, yaitu hak atas karya rekaman suara (*Sound Recording Right*), secara teoritis hak tersebut merupakan suatu hak yang berdampingan dengan hak cipta yaitu "*Neighboring Right*". Akan tetapi dalam hukum positif Indonesia hak atas karya rekaman dianggap sebagai hak cipta.¹⁶⁴

Produser rekaman akan melakukan transaksi lebih lanjut dengan pihak distributor untuk mendistribusikan album rekaman yang diproduksinya kepada konsumen. Dalam jalur distribusi, distributor akan melakukan transaksi melalui beberapa agen, dengan menggunakan harga PPD (*Price Published to Dealer*). Dan selanjutnya agen akan mendistribusikannya melalui toko-toko eceran untuk seterusnya sampai kekonsumen.¹⁶⁵

Pada saat album rekaman sampai di tangan para agen biasanya dalam saat yang bersamaan promosi terhadap album tersebut sudah mulai dilaksanakan melalui media massa. Promosi biasanya dilakukan oleh produser sendiri, walaupun tidak tertutup kemungkinan dilakukan

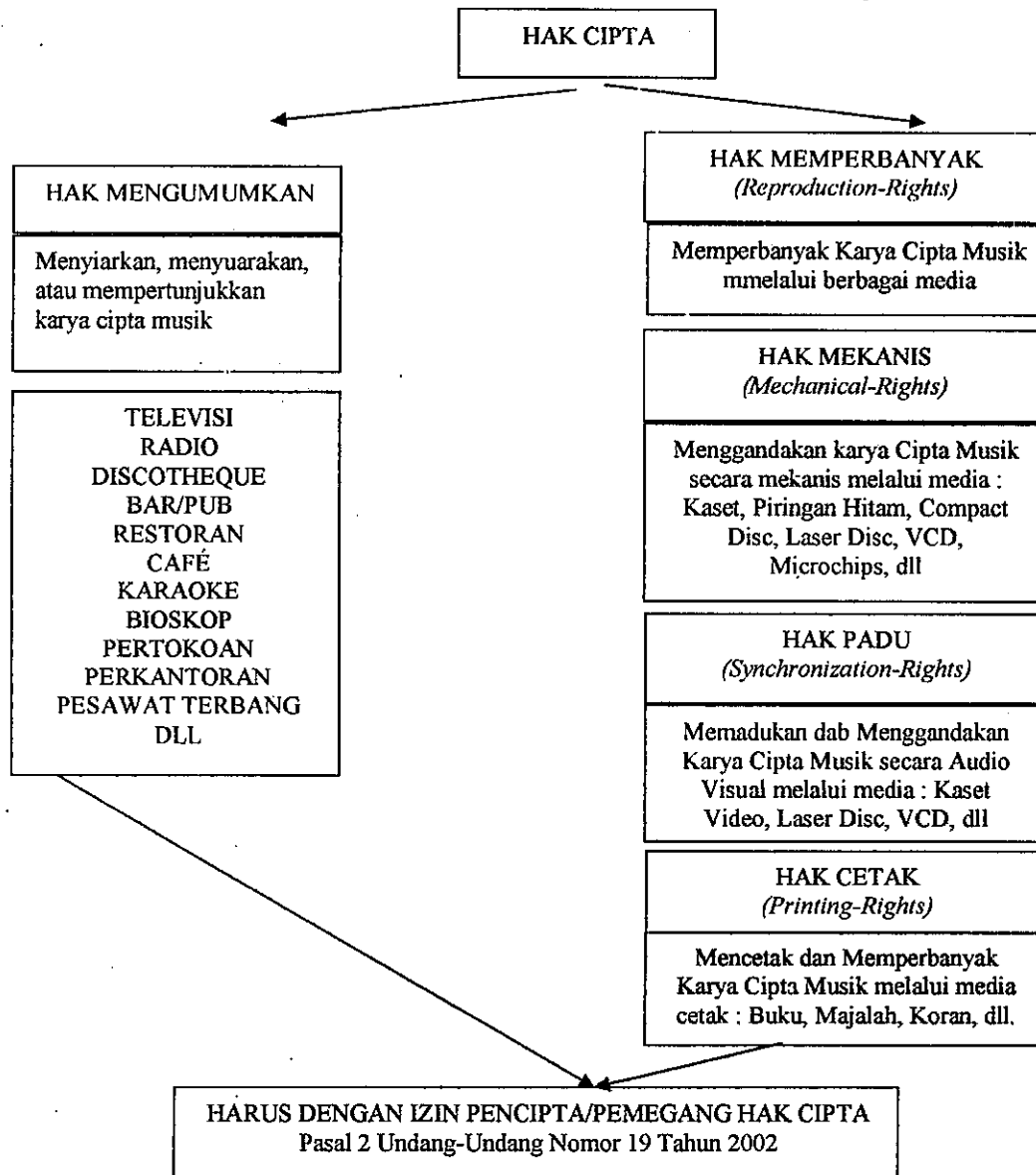
¹⁶⁴ *Ibid.*, hal. 60.

¹⁶⁵ *Ibid*

oleh distributor, akan tetapi beban biaya promosi sepenuhnya menjadi tanggungan produser.¹⁶⁶

¹⁶⁶ *Ibid*

Tabel 21
Hak-hak yang terkandung dalam Hak Cipta



Sumber : KCI

Pengguna musik dalam bentuk memperbanyak maupun mengumumkan musik, adalah pihak yang wajib meminta izin. Izin tersebut dapat diperoleh secara langsung kepada pencipta atau

penerima hak cipta atau secara kolektif melalui penerbit music (*Music Publishers*) atau melalui *Collective Management Organization* (CMO).¹⁶⁷

Prinsipnya KCI membantu pencipta agar dalam berkarya tidak perlu diganggu dengan kegiatan ekstra diatas, sehingga akan muncul karya-karya yang bagus dan bermutu disamping hak ekonominya tidak akan hilang.¹⁶⁸

Hal penting yang perlu diingat bahwa dalam perjanjian lisensi, pencipta tetap mempertahankan hak milik intelektualnya, dimana dalam konteks lisensi yang diberikan kepada KCI adalah Izin untuk mengumumkan karya musik dari pencipta/pemegang hak cipta melalui KCI kepada penerima/users yang bersifat non-eksklusif, dalam arti users berhak untuk mengumumkan sebuah lagu/musik tetapi ia tidak dapat menuntut KCI aats diberikannya lisensi kepada pihak lain.

Selain KCI terdapat bebera organisasi profesi lainnya yang berhubungan dengan perlindungan hak cipta, antara lain :

- Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI)
- Persatuan Artis Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia (PAPPRI)

ASIRI didirikan pada tanggal 1 Febuari 1978. ASIRI mempunyai beberapa tugas pokok, yang dijabarkan dalam Pasal 3 Anggaran Dasarnya, antara lain : mengkoordinasikan kemampuan dan

¹⁶⁷ *Ibid.*

¹⁶⁸ Buletin KCI, *CAKRA*, Edisi 04/Th.II/April 2002, *Op. Cit*, hal.7

mengkoordinasikan kekuatan seluruh penguisaha rekaman nasional guna memperkuat landasan kegiatan industri rekaman Indonesia. Dalam Pasal 4 anggaran dasarnya menegaskan bahwa ASIRI berfungsi sebagai wadah komunikasi, pembinaan dan pengembangan industri rekaman nasional yang bersifat non-politik, tidak menjadi bagian dari salah satu organisasi sosial politik dan tidak menjalankan kegiatan politik praktis, sehingga dalam menjalankan fungsinya, ASIRI menggunakan prinsip dasar mandiri, kooperatif dan professional yang pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan, kepentingan dan perkembangan industri rekaman Indonesia.

Keanggotaan dari pada ASIRI, Pasal 1 anggaran rumahtangganya terdiri dari badan usaha atau badan hukum yang bergerakl dalam usaha-usaha sebagai berikut :

1. perusahaan rekaman yang memproduksi dan/atau mengedarkan karya rekaman suara;
2. studio rekaman suara; studio rekaman untuk memproses ulang rekaman induk (*Mastering*);
3. perusahaan penghasil media penghantar suara (*Phonogram*);
4. perusahaan penggandaan karya rekaman suara.

Dalam rangka pelaksanaan perlindungan hak cipta bagi pencipta dan pemegang hak cipta atas lagu dan/atau musik, termasuk karya rekaman suara serta fungsinya untuk memajukan kepentingan atas hak pencipta para anggota organisasi maupun dalam rangka upaya

penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta. ASIRI mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan aparat penegak hukum (POLRI, Kejaksaan, dan Peradilan), instansi terkait (Direktorat Jenderal HKI) dan organisasi profesi hak cipta lainnya. Badan Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta (BPPHC) ASIRI melakukan kegiatan anti pembajakan dengan tugas melakukan operasi terhadap pembajak, pabrik pengganda, distributor, agen dan pedagang produk bajakan harus diarahkan dalam upaya :¹⁶⁹

1. membentuk jaringan kerja (*Network*) antara ASIRI dengan asosiasi sejenis, masyarakat seni, pekerja industri rekaman, dan masyarakat;
2. memberikan sukungan teknis dan operasional kepada POLRI;
3. membangun opini di masyarakat tentang kerugian akibat pembajakan yang dderita bangsa dan negara, adanya upaya membunuh kreatifitas seni bangsa Indonesia maupun pernyataan sikap perang melawan pembajak.

PAPPRI merupakan organisasi para pencipta baik pencipta lagu lirik maupun penata musik. Organisasi ini berdiri pada tanggal 27 Febuari 1986, yang semula bernama Paguyuban Artis Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia, dibuat dengan Akte Notaris Jl. Waworuntu Nomor 285 tertanggal 18 Juli 1987 dan dikukuhkan

¹⁶⁹ Bulketin ASIRI, Tahun 1-Volume 11, Mei 2000, hal.9.

dengan surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-2939.HT.01.03-TH.90 tertanggal 29 Mei 1990.¹⁷⁰

Tujuan penting didirikannya PAPPRI antara lain :

1. Membina persatuan dan kesatuan di kalangan para pencipta di Indonesia
2. Menciptakan suasana aman di kalangan para pencipta dan pemegang hak cipta.
3. Memperjuangkan hak-hak perlindungan hukum bagi para pencipta maupun pemegang hak cipta.

Salah satu prestasi PAPPRI yang telah dilaksanakan PAPPRI adalah memprakarsai, merintis, mempromosikan serta memperjuangkan didirikannya dalam bidang *Performing Right* yaitu sebuah lembaga *performing right collecting Society* atau suatu badan pengelola *performing right* (hak mengumumkan) dari para pencipta Indonesia, yang akhirnya berdirilah Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI). Karena tidak mungkin bagi seorang pencipta untuk keliling ke seluruh Indonesia untuk mencari siapa-siapa atau perusahaan apa saja yang memutar musik atau lagunya untuk tujuan komersial, dan menarik royalti atas penggunaan hak pengumuman tersebut.

Di bidang *Mechanical Right*, PAPPRI berusaha untuk memperjuangkan hak pencipta dengan mengadakan perundingan-perundingan bersama para produser untuk membicarakan praktek-

¹⁷⁰ Profil Organisasi PAPPRI dan Dunia Musik Indonesia, Edisi Khusus, Mei 97-Juni 98, hal.iii

praktek pemakaian musik dan lagu untuk kepentingan *Mechanical Right*.

Perlindungan terhadap pencipta atas karya lagu dan/atau musik dilindungi oleh Undang-undang hak cipta yang berlaku di Indonesia dengan ketentuan bahwa, Undang-undang hak cipta ini berlaku terhadap semua ciptaan dan hak-hak yang terkait dengan hak cipta (Pasal 76 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002) :

- a. Semua ciptaan warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia;
- b. Bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia dan bukan badan hukum Indonesia yauntuk pertama kali diumumkan di Indonesia yang diumumkan untuk pertama kali di Indonesia;
- c. Semua ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia dan bukan badan hukum Indonesia, dengan ketentuan :
 - 1) negaranya mempunyai perjanjian bilateral mengenai perlindungan hak cipta dengan negara Indonesia;
 - 2) negaranya dan Negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam suatu perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan hak cipta

2. BENTUK-BENTUK PELANGGARAN TERHADAP HAK PENCIPTA atas KARYA LAGU dan/atau MUSIK

Penerapan perlindungan hak cipta tidak selamanya berjalan tanpa hambatan, bahkan sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terutama oleh pemegang hak cipta, yaitu berupa tindakan pelanggaran hak cipta dengan berbagai bentuk. Bentuk pelanggaran atau pembajakan adalah lagu dan/atau musik termasuk karya rekaman suara atau gambar pada pita kaset, VCD dan sejenisnya. Pembajakan semacam ini sering terjadi dan mudah dilakukan dengan adanya kemajuan teknologi di bidang perekaman. Selain bentuk tindak pidana pelanggaran hak cipta karya seni lagu dan/atau musik berupa penggandaan, peniruan atau pembajakan, juga adanya bentuk tindak pidana atas hak untuk mengumumkan terhadap lagu dan/atau musik, dalam permohonan izin *performing right* yang tidak diindahkan oleh para pemakai atau users.

Pelanggaran hak cipta yang terjadi dalam ciptaan karya musik dan atau lagu dapat dilihat dari dua sisi yang berbeda. Pertama adalah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam hubungan pengalihan hak cipta antara pencipta dan produser rekaman, dalam klausula-klausula materi/isi daripada perjanjian pengalihan atau lisensi hak cipta. Bentuk pelanggaran jenis yang kedua dalam skala yang lebih besar,

dan dilakukan dengan tujuan yang tidak mempunyai itikad baik sedikit pun. Pelanggaran jenis ini lebih dikenal dengan pembajakan.¹⁷¹

Data BPHN menyebutkan bahwa pelanggaran hak cipta yang terjadi dalam ciptaan karya musik dan atau lagu dapat dilihat dari dua sisi yang berbeda. Pertama adalah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam hubungan pengalihan hak cipta antara pencipta dan produser rekaman. Bentuk pelanggaran jenis yang kedua dalam skala yang lebih besar, dan dilakukan dengan tujuan yang tidak mempunyai itikad baik sedikitpun. Pelanggaran jenis ini lebih dikenal dengan pembajakan. Dalam industri musik internasional, pembajakan atas karya rekaman suara, dikenal dalam tiga macam bentuk kejahatan yang dipilah-pilah berdasarkan modus operandinya. Masing-masing bentuk kejahatan tersebut juga memiliki pengaruh dalam tingkatan yang berbeda-beda terhadap industri musik. Berikut ini uraian tentang masing-masing bentuk pembajakan, dan kondisi yang ada dalam industri rekaman nasional.¹⁷²

1) Counterfeit

Bentuk pembajakan ini dilakukan dengan menggandakan ulang album rekaman tertentu, yang meniru persis bentuk album tersebut mulai dari susunan lagu sampai ilustrasi cover dan bentuk

¹⁷¹ Rooseno Harjowidigdo, *Laporan Akhir Tim Penyusun Kompilasi Bidang Hukum tentang Yurisprudensi Mengenai Hak milik Intelektual, Op.Cit.*, hal.70

¹⁷² Data diambil dari BPHN

kemasan album. Dalam industri musik nasional, *Counterfeit* lebih dikenal sebagai album rekaman aspal (asli tapi palsu).

2) *Pirate*

Bentuk pembajakan ini dilakukan dengan cara memproduksi album rekaman yang merupakan gabungan (*Kompilasi*) dari beberapa album rekaman tertentu. Bentuk pembajakan seperti ini, di Indonesia terbagi atas beberapa golongan pasar. Ada yang dikemas dengan baik seperti layaknya album rekaman resmi, serta ada pula yang dikemas secara sederhana, biasanya diedarkan di took-toko kecil atau kaki lima dan dikenal dengan istilah ketikan. Bentuk kejahatan ini paling ditakuti dalam industri musik nasional, karena dapat mematikan kesempatan penjualan bagi beberapa album sekaligus. Bagaimanapun konsumen akan lebih tertarik untuk membeli satu album erekaman yang merupakan kumpulan lagu yang tengah populer, dari pada membeli beberapa album rekaman yang asli.

3) *Boot Leging*

Jenis pembajakan ini dilakukan dengan cara merekam langsung (*Direct Dubbing*) sebuah karya musical pada saat berlangsungnya pementasan seorang penyanyi (pada waktu live show). Kemudian hasil rekaman tersebut digandakan dan diedarkan sebagai album khusus *Live Show* dari artis yang bersangkutan.

Pembajakan/penjiplakan lagu dan/atau musik seseorang menurut kesepakatan PAPPRI, merupakan pelanggaran atas hak cipta apabila memenuhi beberapa kriteria, antara lain : Motif dan karakter, Tema, Lirik / teks lagu, hampir sama dengan lagu dan/atau musik yang telah ada dan 10 % struktur melodi dan ruasnya secara berurutan sama dengan lagu yang telah ada.

Dari Kasus yang berhasil ditangani oleh POLRI dapat dianalisa dari anatomi kejahatan di bidang HaKI khususnya Hak Cipta, antara lain.¹⁷³

1. Pelaku, terdiri dari oknum-oknum pengusaha/pedagang baik perorangan maupun yang berebadan hukum, yang seluruhnya berkaitan dengan kegiatan di bidang ekonomi dan perdagangan. Pelaku ini terdiri dari produser/pengelola pabrik (baik resmi maupun gelap, importir, pengusaha ekspedisi, distributor, pemilik took,, pengecer, pedagang kaki lima.
2. Motif, motif kejahatan seperti ini sebagian besar adalah untuk mencari keuntungan yang lebih besar dengan cara melawan hukum.
3. Modus operandi, baik yang menyangkut produk luar negeri maupun dalam negeri, dilakukan dengan cara antara lain :

¹⁷³ Edi Wardoyo, *Pengalaman Penegakan Hukum HaKI Di Indonesia, Penegakan Hukum HaKI Dalam Konteks Perlindungan Ekonomi Usaha Kecil dan Menengah*, Kerjasama, Klinik HaKI Fakultas Hukum Undip dengan Business AOTS Dosokai Indonesia dan Japan External trade Organization (JETRO), (Seminar Nasional; Semarang , Sabtu 25 November 2000), hal.3-4.

menyelundup, memalsu dokumen, memproduksi / menggandakan / membajak, memalsu / meniru.

4. Ciri-ciri, barang tidak resmi adalah ; menyerupai sebagian atau seluruhnya, kualitasnya lebih rendah dari yang asli, harganya lebih murah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran di bidang hak cipta tidak terlepas dari factor lingkungan berbagai aspek yang ada di dalam masyarakat, antara lain :¹⁷⁴ Aspek Ekonomi, Para pelaku cenderung ingin memperoleh keuntungan dalam pemasaran produknya secara mudah dan cepat, dengan membajak produk-produk terkenal tanpa pengeluaran biaya promosi. Para pelaku kejahatan hak cipta banyak mendapat keuntungan, karena tidak perlu membayar royalty kepada pemegang hak cipta yang produknya digandakan dan menghindari pengenaan pajak yang semestinya wajib dibayar; Aspek Sosial, tingginya angka pengangguran dan terbatasnya kesempatan memperoleh pekerjaan, lemahnya daya beli masyarakat, belum meratanya sosialisai masalah HaKI terutama pada kelompok/golongan masyarakat luas terhadap perlunya menghargai hasil karya orang lain.

Merebaknya pelanggaran hak cipta atas karya lagu dan/atau musik dengan berbagai bentuk baik pembajakan, peniruan, dan perekaman atau penggunaan dalam kegiatan bisnis oleh para pemakai

¹⁷⁴ *Ibid.*, hal. 6-8

atau users tanpa izin oleh pencipta atau pemegang hak cipta dan pemegang ciptaan terhadap hak-hak terkait, merupakan indikasi bahwa tingkat pemahaman akan arti dan fungsi hak cipta serta tingkat kesadaran hukum untuk menghormati hak cipta atas hasil suatu karya intelektual masih memprihatinkan.

Pelanggaran atas hak cipta yang dengan sengaja telah diatur dan dijamin berdasarkan Pasal 72 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 yang menyebutkan :

- 1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Ketentuan Pasal 46 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, menyatakan bahwa tindak pidana pelanggaran hak cipta asalkan telah memenuhi kualifikasi delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 adalah kejahatan.

3. HANBATAN-HAMBATAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK PENCIPTA atas KARYA LAGU dan/atau MUSIK

Perlindungan hukum terhadap pencipta dalam undang-undang hak cipta Indonesia, dalam penegakan hukumnya dapat dilakukan secara perdata maupun pidana. Upaya demikian dalam memberikan perlindungan hukum kepada pencipta oleh Undang-undang hak cipta tidak dapat terlepas dari kesadaran pribadi masing-masing pencipta lagu dan/atau musik dalam penciptaan sebuah karya menghargai karya cipta orang lain dengan tidak menjiplaknya dan kesadaran anggota masyarakat untuk tidak menjual dan membeli karya bajakan.

Dalam penegakan hukum terhadap perlindungan pencipta, undang-undang hak cipta menjamin hak-hak yang dimiliki oleh pencipta, Pasal 55 Undang-Undang nomor 19 Tahun 2002 menyebutkan bahwa dalam hal penyerahan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada orang atau badan lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat seseorang yang tanpa persetujuannya :

- a. Meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan itu;
- b. Mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya;
- c. Mengganti atau mengubah judul ciptaan itu; dan atau
- d. Mengubah isi ciptaan itu

Selanjutnya dalam Pasal 56, diterangkan bahwa :

- (1) Pemegang hak cipta berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya ciptaan itu.
- (2) Pemegang hak cipta juga berhak untuk meminta kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah dan pertemuan ilmiah lainnya, atau pertunjukkan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.
- (3) Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyakan, penyiaran, pengedaran, dan penjualan ciptaan atau barang-barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

Dalam hal dimintakan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka hal itu harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan mengenai penyitaan benda bergerak sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata.

Hak dari pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 tidak berlaku terhadap benda yang ada dalam tangan seseorang yang tidak memperdagangkan benda-benda itu dan

memperolehnya untuk keperluan sendiri (Pasal 57). Dengan demikian pencipta atau ahli waris suatu ciptaan dapat mengajukan ganti rugi atas pelanggaran ketentuan Pasal 24 (Pasal 58). Namun demikian hal ini tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak cipta.

Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, sehingga hakim pengadilan diberti kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar hak cipta dan hak terkait ke jalur perdagangan termasuk importasi. Hal ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 mengenai Penetapan sementara, dengan ketentuan bahwa; “atas permintaan yang merasa dirugikan, Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan dengan segera dan efektif untuk :

- a) Mencegah berlanjutnya pelanggaran hak cipta, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar hak cipta atau hak terkait ke dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi;
- b) Menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti;
- c) Meminta kepada pihak yang merasa dirugikan, untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas

hak cipta atau hak terkait dan hak pemohon tersebut tersebut memang sedang dilanggar

Apabila terjadi dalam hal penetapan sementara dibatalkan, pihak yang merasa dirugikan dapat meminta ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara atas segala kerugian yang ditimbulkan (Pasal 70, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002).

Upaya dalam memberikan perlindungan hukum kepada pencipta oleh Undang-undang hak cipta tidak dapat terlepas dari kesadaran pribadi masing-masing pencipta lagu dan/atau musik dalam penciptaan sebuah karya menghargai karya cipta orang lain dengan tidak menjiplaknya dan kesadaran anggota masyarakat untuk tidak menjual dan membeli karya bajakan.

Banyaknya pelanggaran hak cipta lagu atau musik di Indonesia, terutama di kota-kota besar merupakan tantangan tersendiri bagi upaya penegakan hukum, karena dengan diubahnya tindak pelanggaran hak cipta dari tindak pidana aduan menjadi tindak pidana biasa atas pelanggaran hak cipta, akan sulit untuk mencari bukti adanya tindak pidana tersebut, seperti bagaimana membedakan mana ciptaan yang asli dan mana ciptaan yang bajakan. Karena itulah diperlukan adanya keterangan dari si pencipta lagu dan/atau musik yang dapat menentukan tentang ada tidaknya pelanggaran hak cipta, disamping itu juga perlu adanya keterangan dari ahli yang dapat membantu.

Bagi penegak hukum di bidang Hak cipta ada beberapa asas hukum umum sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara hak cipta, antara lain :

- *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, artinya undang-undang yang bersifat khusus dapat mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Sehingga dalam hal penegakan hukum hak cipta aparat penegak hukum benar-benar mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tertuang Undang-undang hak cipta Indonesia dalam penegakan hukumnya berupa denda maupun hukuman penjara.
- *Lex Posteriori Derogat Lex Priori*, artinya bahwa undang-undang yang baru atau yang adanya lebih akhir dapat mengesampingkan undang-undang yang lama. Berkaitan dengan disyahnkannya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 belum dapat sepenuhnya efektif berlaku, ketentuan peralihan pasal 74 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, dinyatakan bahwa dengan berlakunya undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di bidang hak Cipta yang telah ada pada tanggal berlakunya undang-undang ini, tetap berlaku selama tidak bertentangan atau belum diganti yang baru berdasarkan undang-undang ini. Terhadap surat pendaftaran Ciptaan yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal berdasarkan Undang-undang nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1997 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 yang masih berlaku pada saat diundangkannya undang-undang ini, dinyatakan tetap berlaku untuk selama jangka waktu perlindungannya (Pasal 75 Ketentuan Peralihan Undang-undang nomor 19 Tahun 2002). Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 disyahkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2002. Undang-undang ini mulai berlaku 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diundangkan dan dengan berlakunya undang-undang ini, Undang-undang nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta, Undang-Undang nomor 12 tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dinyatakan tidak berlaku (Pasal 77 dan 78)

Sejak berlakunya undang-undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982 hingga sekarang, upaya penegakan hukum di bidang hak cipta telah direalisasikan, namun hasilnya masih jauh dari yang diharapkan, bahkan terlihat para penjual ciptaan lagu dan/atau musik berupa CD musik, VCD musik dan VCD karaoke bajakan merebak bagaikan jamur di hampir seluruh kota-kota di wilayah Indonesia. Hambatan

yang timbul dalam praktek penegakan hukum di bidang hak cipta, sehingga prosesnya tidak berjalan mulus, yaitu :¹⁷⁵

1. Belum adanya kesamaan persepsi tentang sifat dan fungsi hak cipta;

Masalah ini sering timbul dikalangan para penegak hukum, dimana sering timbul penafsiran yang berbeda tentang apa yang dimaksud dalam undang-undang hak cipta sehingga menghambat jalannya proses penyelesaian di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun pengadilan.

2. Perubahan delik aduan menjadi delik biasa

seperti dijelaskan dalam penjelasan umum undang-undang Hak Cipta 1987, bahwa maksud perubahan delik aduan menjadi delik biasa adalah untuk lebih meningkatkan efektifitas penindakan para pelaku tindak pidana di bidang hak cipta, dan delik aduan yang dianut dalam undang-undang hak cipta 1982 dinilai tidak sesuai lagi dengan kebutuhan. Sebagai konsekuensi perubahan delik tersebut, maka penyidik Polri dan penyidik PPNS hak cipta harus aktif melakukan penyidikan atau penyidikan atas pelanggaran hak cipta. Dalam praktek tidak setiap penyidik mengetahui perbedaan antara ciptaan yang asli dan ciptaan hasil bajakan, sehingga sangat diperlukan keterangan si pencipta yang mengetahui persis apakah ciptaannya dilanggar.

¹⁷⁵ Ismuanoro, *Perlindungan Hukum atas Hak Cipta di Indonesia*, makalah disampaikan dalam diskusi tentang pelanggaran dan litigasi di bidang hak cipta, paten dan merk di Batam tanggal 7-9 September 1993.

3. Kesaksian

Sekalipun penyidik telah mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang hak cipta, namun sangat diperlukan keterangan si pencipta yang ciptaannya dilanggar atau dibajak. Hanya penciptalah yang paling mengetahui atas ciptaannya asli atau tidak dan untuk setiap penyidik keterangan si pencipta, dipakai sebagai titik awal dilakukannya penyidikan.

Upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta lagu dan/atau musik ¹⁷⁶:

1. Membentuk jaringan kerja (*network*) antara ASIRI dengan asosiasi sejenis, masyarakat seni, pekerja industri rekaman, dan masyarakat;
2. Memberikan dukungan teknis dan operasional kepada POLRI
3. Membangun opini di masyarakat tentang kerugian akibat pembajakan yang diderita bangsa dan negara, adanya upaya membunuh kreatifitas seni bangsa Indonesia maupun pernyataan sikap perang melawan pembajak.

Semua kegiatan tersebut di atas hanya dapat dilakukan dengan izin si pencipta atau pihak yang diberikan kuasa untuk memberikan izin, yaitu dengan jalan perjanjian. Hak ekonomi sebagai yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 yang

¹⁷⁶ Buletin ASIRI, Tahun Pertama, Volume 11, Mei 2000, hal. 9

bisa dialihkan sementara penguasaannya kepada pihak lain, yakni para pemusik, produser rekaman untuk melakukan semua kegiatan di atas.

Tindak pidana hak cipta bukan merupakan delik aduan, Pasal 46 Undang-undang Hak Cipta dijelaskan bahwa tindak pidana pelanggaran di bidang hak cipta adalah kejahatan, sehingga konsekwensinya apabila aparat penyidik POLRI atau PPNS bertindak secara otomatis setelah ada indikasi pelanggaran hak cipta tanpa menunggu pengaduan dari si korban, hal ini perlu kesiapan aparat untuk dapat mengetahui ada tidaknya pelanggaran hak cipta, dan jangan sampai si pelaku tidak dapat diproses penindakannya disebabkan oleh ketidakmampuan penyidik untuk membuktikannya. Perbedaan penafsiran diantara penegak hukum dapat dihindarkan dengan adanya koordinasi antara hakim, jaksa dan polisi, dengan melibatkan instansi terkait seperti Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (d.h.i. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual), Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Direktorat Jenderal Bea Cukai, dan Organisasi Profesi Hak Cipta.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang hak cipta dalam prakteknya ada dua hal yaitu menerima laporan dari masyarakat karena karya ciptanya dilanggar oleh pihak lain dan dengan melakukan tindakan tanpa ada laporan, artinya berperan aktif untuk mengungkap segala bentuk pelanggaran di bidang hak cipta.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan atas tinjauan pustaka, hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan;

1. Undang-undang Hak cipta telah memberikan ruang bagi perlindungan terhadap karya seni khususnya lagu dan/atau musik sehingga akan merangsang daya kreatifitas, dan kemudian dapat menikmati hasilnya.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, telah mengatur lebih rinci mengenai perlindungan terhadap hak cipta maupun hak terkait, dalam hal terjadi pelanggaran hak atas karya musik dan atau lagu, pencipta/pemilik hak cipta/hak terkait memperoleh ganti rugi sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 maupun dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara.

2. Bentuk pelanggaran atau pembajakan terhadap lagu dan/atau musik, adalah terhadap penggunaan karya cipta baik yang ditayangkan dan diperdengarkan, misalnya distasiun TV sebagai lagu tema pada sinetron tanpa izin penciptanya, Diskotik, pub, karaoke, rumah makan gedung bioskop dan lain-lain yang yang tidak mau membayar fee/royalty yang menjadi hak pencipta termasuk menghasilkan karya cipta lagu dan/atau musik yang meniru sebagian besar/hampir sama dengan karya yang sudah ada dan terkenal, karya rekaman

suara dalam bentuk kaset-kaset palsu, VCD palsu dan sejenisnya. Pembajakan semacam ini dikategorikan dalam 3 kelompok besar, yaitu Counterfeit, Pirate, dan Bootlegging.

3. Hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran hak pencipta, disebabkan oleh dua factor internal dan eksternal. Factor internal karena minimnya dana untuk operasional dilapangan, dan belum maksimalnya koordinasi antar instansi terkait dan pihak kepolisian. Factor eksternal, karena rendahnya daya beli masyarakat dan keinginan untuk memperoleh keuntungan secara cepat, masuknya teknologi sehingga mempermudah pembajakan, peredaran barang bajakan sangat rapi sehingga cukup sulit bagi instansi dan aparat terkait untuk memberantas sampai keakar-akarnya.

B. SARAN

1. Undang-undang yang baik belum tentu memberikan hasil yang baik, hal ini harus diimbangi dengan kesiapan, sikap dan mental dari sesama pencipta, users dan masyarakat untuk menghargai ciptaan orang lain, untuk itu pemerintah, aparat penegak hukum, Organisasi rofesi hak cipta dan masyarakat luas harus benar-benar dan terlibat dalam mengawasi pelaksanaan undang-undang hak cipta semaksimal mungkin, sehingga undang-undang hak cipta dapat mewujudkan perlindungan hukum, kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak.

2. Sekalipun Undang-undang hak cipta tidak mensyaratkan pendaftaran atas ciptaan sebagai suatu hal yang wajib, sebaiknya pencipta, pemegang hak cipta dan pemegang hak-hak terkait melaksanakan pendaftaran ciptaan terutama apabila melaksanakan perjanjian lisensi eksklusif, dengan demikian tanda pendaftaran atas ciptaan dapat dijadikan bukti di Pengadilan apabila timbul sengketa mengenai ciptaan tersebut. Untuk para pencipta, pemegang hak cipta dan pemegang hak-hak terkait dalam melaksanakan pengalihan atau lisensi terhadap ciptaannya untuk membaca secara lebih teliti dan seksama terhadap klausul-klausul yang terdapat dalam kontrak perjanjian tersebut untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.
3. Dalam hal hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap perlindungan pencipta, pencipta untuk lebih proaktif apabila terjadi pelanggaran atas ciptaannya, dan kepada aparat penegak hukum POLRI, PPNS, didukung oleh Organisasi Profesi Hak Cipta serta masyarakat umum perlu secara berkala diadakan pelatihan dan sosialisasi yang luas, bekerja lebih keras dalam membentuk jaringan kerja, membangun opini di masyarakat tentang kerugian akibat pembajakan yang diderita bangsa dan negara serta lebih proaktif dalam menanggulangi banyaknya pelanggaran hak cipta yang terjadi tanpa harus menunggu adanya aduan dari masyarakat maupun pencipta.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adolf Huala & Chanrawulan A., *Masalah-Masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional*, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 1994)

Ashofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 1996

Bintang, Sanusi, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1988)

-----, Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000)

Bruggink, J.J.H, Alih Bahasa Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1999)

Damian, Eddy, *Hukum Hak Cipta menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999)

Djumhana, Muhammad dan R. Djubaidillah, *Hak Milik Intelektual*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993)

-----, *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya bakti, 1997)

Erawaty, A.F. Elly, J.S. Badudu, *Kamus Hukum Ekonomi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997)

Faisal, Sanafiah, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, (Malang : Y A 3, 1990)

Gautama, Sudargo, dan Rizawanto, Winata, *Pembaharuan Undang-Uandang Hak Cipta (1997)*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1997)

Goldstein, Paul, *Hak Cipta : Dahulu, Kini dan Esok* : Pengantar Candra N. darusman ; Penerjemah Masri Maris, (Jakarta : Yayasan Obor Inonesia, 1996)

Harahap, M Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung : Alumni, 1986)

Harjowidigdo, Rooseno, *Masalah Pungutan Royalti dan Perlindungan Karya Cipta*, (Jakarta; Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Tahun Anggaran 1993/1994).

-----, *Penulisan Karya Ilmiah Tentang Lisensi Wajib Terhadap Hak Cipta Lagu/Musik Untuk Production House, Broadcaster dan Pemakai Lainnya*, "Proyek Pengembangan Hukum Nasional", (Jakarta; Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Tahun Anggaran 1996/1997).

-----, *Laporan Akhir Tim Penyusun Kompilasi Bidang Hukum tentang Yurisprudensi Mengenai Hak milik Intelektual*, (Jakarta; Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman Republik Indonesia Th. Anggaran 1995/1996).

-----, *Laporan Akhir Penelitian Tentang Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Lisensi Hak Cipta*, (Jakarta; Badan Pembinaan hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2001)

Hartono, Sunarjati, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad 20*, (Bandung : STHB Press, 1998)

Huijbers, Theo, *filasfat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta : Kanisius, 1995)

Hutagalung, Sophar Maru, *Hak Cipta : Kedudukan dan Peranannya di Dalam Pembangunan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1993)

Ichtiar, Baru van Hoeve, *Ensiklopedia Indonesia 4*, (Jakarta, 1983)

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, (Jakarta ; Balai pustaka, 1989)

Kansil, C.S.T., *HAK MILIK INTELEKTUAL : Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta*, (Jakarta : Sinar grafika, 1997)

Kesowo Bambang. *Pengantar Umum Mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) di Indonesia*, Tanpa Penerbit dan Tanpa Tahun.

Keraf, Gorys, *Komposisi Sebuah Kemahiran Bahasa*, (Flores : Nusa Indah, 1997)

-----, *Eksposisi dan Deskripsi*, (Flores : Nusa Indah, 1982)

UPT-PUSTAK-UNDIP

- Manalu, Paingot Rambe, *Hukum Dagang Internasional : Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Hukum Nasional, Khususnya Hukum Atas hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta : Novindo Pustaka Mandiri, 2000)
- Maulana, Insan Budi, *Pelangi HaKi dan Anti Monopoli*, (Yogyakarta : Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 2000)
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000)
- P M. Sofyan., *Latar Belakang Ekonomi Politik Terhadap Perlindungan Hukum HaKI*, Lembaga Kajian Hukum Teknologi-Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001
- Priapanca, Cita Citrawinda, "*Aspek-Aspek Hukum Lisensi Paten*", Disampaikan pada Seminar Nasional Sosialisasi Paten di Indonesia, Yogyakarta : 9 Desember 1995.
- Prijono Onny S., Amin Pranarka, *Pemberdayaan Konsep Kebijakan dan Implementasi*, (Jakarta : Center For Strategic and international Studies, 1996)
- Radjab, Mohammad, *Pengantar Filsafat Hukum*, Cetakan ketiga, (Jakarta :Bantara Karya Aksara, 1982)
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001)
- Rasjidi Lili., B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum dan Refleksinya*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1994)
- Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997)
- Sasongko, Hari, Arief S., *Undang-Undang Hak Cipta, Merk dan Paten Serta Peraturan dan Pelaksanaannya*, (Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 1995)
- Siahaan, Ronald and Partners, *Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Hak Cipta Paten dan Merk Tahun 1997*, (Jakarta : Novindo Pustaka Mandiri, 1997)
- Smith Michael B. dan Merritt R. Blakelee, *Bahasa Perdagangan*, (Bandung : Penerbit ITB Bandung, 1995)
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : press, 1994)

- , Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja grafindo Persada, 1994)
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994)
- Soeropati Oentung, *Hukum Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi*, (Salatiga : Fakultas Hukum Universitas Kristen Sartya Wacana, 1999)
- Soebagjo Felix O, *Laporan Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan tentang keagenan*, (Jakarta; Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Tahun Anggaran 1995/1996),.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta; Intermasa, Cetakan XIX ,Oktober 1984),
- , *Hukum Perjanjian*, (Jakarta ; PT. Intermasa, Cetakan VI).
- dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990)
- Sugihastuti, *Bahasa Laporan Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar JPF Set, 2000)
- Suherman, Ade Manan, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002)
- Sumarto Harsono Adi, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, (Jakarta : Akademi Pressindo, 1990)
- Tim UNDIP, *Etika Keilmuan dan Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1999)
- Widyopramono, *Tindak Pidana Hak Cipta dan Penyelesaiannya*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992)
- Yayasan Klinik HaKI, *Kompilasi Undang-undang Hak Cipta, Paten dan Merk dan Terjemahan Konvensi-Konvensi Internasional Di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual Seri A*; Pengantar Insan Budi Maulana, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999)
- , *Kompilasi Undang-undang Hak Cipta, Paten dan Merk dan Terjemahan Konvensi-Konvensi Internasional Di Bidang Hak*

Atas Kekayaan Intelektual Seri B; Pengantar Insan Budi Maulana,
(Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999)

-----, *Kumpulan Perundang-undangan Di Bidang HAKI*,
(Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001)

Makalah

Darusman Candra, *Berbagai Aspek yang Perlu Dikelola Secara Layak dalam Pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta, Makalah Penataran PWI*,
(Cisarua ; 1989)

Ismuantoro, *Perlindungan Hukum atas Hak Cipta di Indonesia*, makalah disampaikan dalam diskusi tentang pelanggaran dan litigasi di bidang hak cipta, paten dan merk di Batam tanggal 7-9 September 1993.

Kesowo Bambang, *Perlindungan Hukum serta Langkah-Langkah Pembinaan Oleh Pemerintah dal Bidang Hak Milik Intelektual*, Makalah,
(Jakarta, 7 Agustus 1990)

Michael A. Lechter, *Paten License, and Know How and Technical Assistance Agreements*, National Seminar on Licensing and technology transfer Arrangement, (Jakarta; 7-8 Maret 1990)

Nico, Kansil, *Kejahatan Hak Milik Intelektual*, UNDIP, (Semarang : makalah Seminar Nasional Kejahatan Hak Milik Intelektual, 27 April 1993)

Rahardjo, Satjipto, *Aspek Sosio-Kultural Dalam Pemajuan HaKI*, Makalah disampaikan Pada Seminar Nasional Penegakan Hukum HaKI Dalam Konteks Perlindungan Ekonomi Usaha Kecil dan Menengah, 25 November 2000, Semarang, Kerjasama Klinik HaKI Fakultas Hukum UNDIP dengan Business Forum Aots Dosokai Indonesia dan Japan External Trade Organization (JETRO)

Soekanto, Soerjono, *Tinjauan Sosiologis Terhadap Musik* , "Diskusi Panel Terbatas memantapkan musik kaset Indonesia Setelah diberlakukannya UUHC 1987", (Jakarta, Fakultas Hukum Krishna Dwipayana, 9 Juli 1988)

Wardojo, Edi, *Pengalaman Penegakan Hukum HaKI Di Indonesia*, Makalah disampaikan Pada Seminar Nasional Penegakan Hukum HaKI Dalam Konteks Perlindungan Ekonomi Usaha Kecil dan Menengah, 25 November 2000, Semarang, Kerjasama Klinik HaKI Fakultas Hukum

UNDIP dengan Business Forum Aots Dosokai Indonesia dan Japan External Trade Organization (JETRO)

WIPO, *Basic Nations of Copyrights and Neighboring Rights*, Roving Seminar on Copyrights and Neighboring Rights, (Indonesia; 12-17 Febuari 1990)

Yusuf Muhammad, *Masalah-Masalah Baru Di Bidang Hak Cipta dan Trade Mark Di Australia*, Laporan Pelaksanaan Pelatihan Hak atas Kekayaan Intelektual, Phase II tingkat Advance di fakultas Hukum University of technology, Sydney New South Wales Australia.

Tim Angkatan X Mahasiswa Program Pasca Sarjana Bidang ilmu Hukum KPK UI-UNDIP, *Perlindungan Hak Milik Intelekyual dalam Putusan Pengadilan*, (Semarang : Seminar nasional Kejahatan Hak Milik Intelektual, 1993)

Jurnal dan Buletin

Ibrahim Idham, *Lisensi dan Peranan pemerintah, Hukum dan pembangunan*, No.1 Tahun XV, 1995Gautama Sudargo, *Jurnal hukum Bisnis*, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Volume 1 (Jakarta: 1997)

Djaman Fidel S., *Beberapa Aspek dan Kebijakan Penting di Bidang Hak Milik Intelektual*, Varia Peradilan, No. 106 jakarta: 1994.

Bulketin ASIRI, Tahun 1-Volume 11, Mei 2000.

Profil Organisasi PAPPRI dan Dunia Musik Indonesia, Edisi Khusus, Mei 97-Juni 98

KCI, *Peraturan Distribusi Royalti Karya Cipta Indonesia (Hak Khusus Mengumumkan)*: Jakarta.

KCI, Pengantar Umum, Departemen Lisensi KCI, Tanpa Tahun,

Buletin KCI, *CAKRA*, Edidi 04/Th.II/ April 2002.

Buletin KCI, *CAKRA*, Edisi 04/Th.II/April 2002

Buletin ASIRI, Tahun Pertama, Volume 11, Mei 2000.

Koran dan Majalah

Harian Sinar Pagi, Rabu, 10 September 1997.

Harian Kompas, Rabu 10 September 1997.

Undang-Undang dan Peraturan

Indonesia *Garis-Garis Besar Haluan Negara*, TAP Majelis Permusyawaratan Rakyat/II/Majelis Permusyawaratan Rakyat/1998

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta

Undang-Undang nomor 12 tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 1986 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 tentang Dewan Hak Cipta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 1989 tentang Penterjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, ilmu Pengetahuan, Penelitian, dan Pengembangan

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 19 tahun 1997 tentang Pengesahan *WIPO Copyrights Treaty*

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 17 Tahun 1988 tentang Pengesahan Persetujuan mengenai Perlindungan Hukum secara timbal balik terhadap Hak Cipta atas karya rekaman suara antara Republik Indonesia dengan masyarakat Eropa

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 1989 tentang Pengesahan Persetujuan mengenai Perlindungan secara timbal balik terhadap hak cipta antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 38 Tahun 1993 tentang Pengesahan Persetujuan mengenai Perlindungan Hukum secara timbal balik terhadap Hak Cipta atas karya rekaman suara antara Republik Indonesia dengan Australia

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 56 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan mengenai Perlindungan Hukum secara timbal balik terhadap Hak Cipta atas karya rekaman suara antara Republik Indonesia dengan Inggris

Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.04..PW.03 Tahun 1988 tentang Penyidikan Hak Cipta

Surat Edaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01.PW.07.03 Tahun 1990 tentang Kewenangan Menyidik Tindak Pidana Hak Cipta

Website

[Http//www. Dgip.go.id](http://www.Dgip.go.id)

[Http//www.KCI.or.id](http://www.KCI.or.id)

[Http//www.Hukum online.com](http://www.Hukum online.com)